

**STATISTIK
KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI MALUKU
2018**





**STATISTIK
KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI MALUKU
2018**

**STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI MALUKU 2018**

ISSN : 2442-7144

Nomor Publikasi : 81520.1812

Katalog : 4101002.81

Ukuran Buku : 21 cm x 29 cm

Jumlah Halaman : x+ 201 halaman

Naskah :

Bidang Statistik Sosial

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

Gambar Kulit :

Bidang Statistik Sosial

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

Diterbitkan oleh :

©Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

Dicetak oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU

KATA PENGANTAR

Dukungan data dan informasi yang memotret kondisi masyarakat secara akurat dan lengkap diperlukan dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Data dan informasi diperlukan oleh para perumus dan pengambil kebijakan agar pembangunan dapat direncanakan, diawasi, dan dievaluasi secara terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dukungan data dan informasi yang lengkap serta akurat, kebutuhan masyarakat yang perlu dibangun dapat direncanakan dengan baik, demikian pula evaluasi terhadap hasilnya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat diketahui sehingga perbaikan dan peningkatan di masa depan dapat dirumuskan.

Statistik Kesejahteraan Rakyat dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik memuat berbagai data statistik yang penting dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan, Perumahan, dan indikator sosial-ekonomi lainnya. Angka-angka Statistik Kesejahteraan Rakyat dihasilkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan disajikan dalam publikasi ini adalah data yang dikumpulkan pada Maret 2018.

Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi pemerintah, namun juga masyarakat pada umumnya. Masukan dan koreksi dari pengguna data sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Ambon, Desember 2018
Kepala,

DUMANGAR HUTAARUK

Halaman ini sengaja dikosongkan.

<https://maluku.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Singkatan	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Penulisan.....	4
1.3 Sumber Data	4
1.4 Metodologi.....	4
1.5 Sistematika Penyajian	4
II. KEPENDUDUKAN	5
2.1 Konsep dan Definisi.....	7
2.2 Ulasan Singkat	8
III. KESEHATAN.....	33
3.1 Konsep dan Definisi.....	35
3.2 Ulasan Singkat	36
IV. PENDIDIKAN	65
4.1 Konsep dan Definisi.....	67
4.2 Ulasan Singkat	68
V. FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA	97
5.1 Konsep dan Definisi.....	99
5.2 Ulasan Singkat	100
VI. PERUMAHAN	109
6.1 Konsep dan Definisi.....	111
6.2 Ulasan Singkat	112
VII. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	137
7.1 Konsep dan Definisi.....	139
7.2 Ulasan Singkat	140
VIII. KEADAAN SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA LAINNYA.....	149
8.1 Konsep dan Definisi.....	151
8.2 Ulasan Singkat	151

Halaman ini sengaja dikosongkan.

<https://maluku.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018 12
Tabel 2.2	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018..... 13
Tabel 2.3.A	Persentase Penduduk Laki-Laki Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2018..... 14
Tabel 2.3.B	Persentase Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2018 15
Tabel 2.3.C	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2018 16
Tabel 2.4.A	Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2018 17
Tabel 2.4.B	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2018 18
Tabel 2.4.C	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2018 19
Tabel 2.5.A	Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2018 20
Tabel 2.5.B	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2018 21
Tabel 2.5.C	Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2018 22
Tabel 2.6.A	Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Provinsi Maluku, 2018 23
Tabel 2.6.B	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Provinsi Maluku, 2018 24
Tabel 2.6.C	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Provinsi Maluku, 2018 25
Tabel 2.7.A	Persentase Anak Laki-Laki Berumur 0-4 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Provinsi Maluku, 2018..... 26
Tabel 2.7.B	Persentase Anak Perempuan Berumur 0-4 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Provinsi Maluku, 2018 27
Tabel 2.7.C	Persentase Anak Berumur 0-4 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Provinsi Maluku, 2018 28
Tabel 2.8	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Berstatus Kawin yang Pasangannya Biasa Tinggal di Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018..... 29
Tabel 2.9	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018..... 30

Tabel 2.10	Persentase Penduduk Berumur 17 Tahun ke Atas yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018	31
Tabel 2.11	Persentase Penduduk Berumur 0-4 Tahun yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018	32
Tabel 3.1	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir di Provinsi Maluku, 2018	42
Tabel 3.2	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Maluku, 2018	43
Tabel 3.3	Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018	44
Tabel 3.4	Angka Kesakitan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018	45
Tabel 3.5	Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir yang Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018	46
Tabel 3.6.A	Persentase Penduduk Laki-Laki yang Memiliki Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Tetapi Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2018	47
Tabel 3.6.B	Persentase Penduduk Perempuan yang Memiliki Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Tetapi Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2018	48
Tabel 3.6.C	Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Tetapi Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2018	49
Tabel 3.7.A	Persentase Penduduk Laki-Laki yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2018	50
Tabel 3.7.B	Persentase Penduduk Perempuan yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2018	51
Tabel 3.7.C	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2018	52
Tabel 3.8	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018	53
Tabel 3.9.A	Persentase Penduduk Laki-Laki yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan di Provinsi Maluku, 2018	54

Tabel 3.9.B	Persentase Penduduk Perempuan yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan di Provinsi Maluku, 2018.....	55
Tabel 3.9.C	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan di Provinsi Maluku, 2018	56
Tabel 3.10	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018.....	57
Tabel 3.11.A	Persentase Penduduk Laki-Laki yang Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2018.....	58
Tabel 3.11.B	Persentase Penduduk Perempuan yang Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2018.....	59
Tabel 3.11.C	Persentase Penduduk yang Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2018	60
Tabel 3.12	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018.....	61
Tabel 3.13.A	Persentase Penduduk Laki-Laki yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Hari Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2018.....	62
Tabel 3.13.B	Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Hari Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2018.....	63
Tabel 3.13.C	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Hari Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2018	64
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018	71
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018.....	73
Tabel 4.3.A	Persentase Anak Laki-Laki Berumur 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Maluku, 2018.....	75
Tabel 4.3.B	Persentase Anak Perempuan Berumur 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Maluku, 2018.....	76
Tabel 4.3.C	Persentase Anak Berumur 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Maluku, 2018	77
Tabel 4.4.A	Persentase Anak Laki-Laki Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Maluku, 2018.....	78
Tabel 4.4.B	Persentase Anak Perempuan Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Maluku, 2018	79

Tabel 4.4.C	Persentase Anak Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Maluku, 2018	80
Tabel 4.5.A	Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018.....	81
Tabel 4.5.B	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018.....	82
Tabel 4.5.C	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018.....	83
Tabel 4.6.A	Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018.....	84
Tabel 4.6.B	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018.....	85
Tabel 4.6.C	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018.....	86
Tabel 4.7.A	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Laki-Laki Berumur 5-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2018	87
Tabel 4.7.B	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Perempuan Berumur 5-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2018.....	88
Tabel 4.7.C	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 5-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2018.....	89
Tabel 4.8.A	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Laki-Laki Menurut Kabupaten/Kota dan Jejang Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018	90
Tabel 4.8.B	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Jejang Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018	91
Tabel 4.8.C	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jejang Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018.....	92
Tabel 4.9.A	Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2018.....	93
Tabel 4.9.B	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2018.....	94
Tabel 4.9.C	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2018.....	95
Tabel 5.1	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Maluku, 2018.....	105
Tabel 5.2	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan berat Badan Anak Lahir Hidup Terakhir Ketika Dilahirkan di Provinsi Maluku, 2018.....	106
Tabel 5.3	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penggunaan Alat/Cara KB di Provinsi Maluku, 2018	107

Tabel 5.4	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kabupaten/Kota dan Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Provinsi Maluku, 2018.....	108
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Rumah di Provinsi Maluku, 2018	116
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Provinsi Maluku, 2018.....	120
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Tempat Tinggal (M ²) di Provinsi Maluku, 2018.....	121
Tabel 6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Per Kapita (M ²) di Provinsi Maluku, 2018	122
Tabel 6.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas di Provinsi Maluku, 2018.....	123
Tabel 6.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas di Provinsi Maluku, 2018	124
Tabel 6.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas di Provinsi Maluku, 2018	125
Tabel 6.8	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama Rumah di Provinsi Maluku, 2018.....	126
Tabel 6.9	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Minum di Provinsi Maluku, 2018	127
Tabel 6.10	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung/Tidak dan Mata Air Terlindung/Tidak Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Maluku, 2018	128
Tabel 6.11	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Cara Memperoleh Air Minum di Provinsi Maluku, 2018	129
Tabel 6.12	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Memasak/Mandi/Cuci/DII di Provinsi Maluku, 2018	130
Tabel 6.13	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Memasak/Mandi/Cuci/DII dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung/Tidak dan Mata Air Terlindung/Tidak Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Maluku, 2018 ...	131
Tabel 6.14	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih dan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Maluku, 2018	132
Tabel 6.15	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Maluku, 2018	133
Tabel 6.16	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga di Provinsi Maluku, 2018.....	134
Tabel 6.17	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Maluku, 2018.....	135
Tabel 6.18	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar Utama yang Digunakan Untuk Memasak di Provinsi Maluku, 2018	136

Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah (PSTN), Komputer/Laptop Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2018	143
Tabel 7.2	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018	144
Tabel 7.3	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018.....	145
Tabel 7.4	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Dekstop/Laptop/Notebook/Tablet) Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018	146
Tabel 7.5	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018.....	147
Tabel 8.1	Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Beras Miskin (Raskin) Selama 3 Bulan Terakhir (Desember 2017-Februari 2018 Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Beras yang Dibeli di Provinsi Maluku, 2018.....	155
Tabel 8.2	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kredit Usaha di Provinsi Maluku, 2018.....	156
Tabel 8.3	Persentase Rumah Tangga Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis PIP yang Diterima di Provinsi Maluku, 2018.....	157
Tabel 8.4	Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Aset Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kepemilikan Aset di Provinsi Maluku, 2018.....	158
Tabel 8.5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Sosial di Provinsi Maluku, 2018.....	159
Tabel 8.6	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2018.....	160
Tabel 8.7	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Dalam Periode Maret 2017-Februari 2018 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018.....	161

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Piramida Penduduk Provinsi Maluku, 2018.....	9
Gambar 2.2 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota, 2018	10
Gambar 3.1 Persentase Perempuan Pernah kawin yang Melahirkan Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2018.....	37
Gambar 3.2 Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan dan Kabupaten/Kota, 2018.....	41
Gambar 4.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, 2018.....	70
Gambar 4.2 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, dan 16-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018.....	72
Gambar 4.3 Angka Partisipasi Murni Pendidikan SD, SMP, dan SMA Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018.....	73
Gambar 5.1 Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama, 2018.....	102
Gambar 5.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Pernah/Masih Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kabupaten/Kota, 2018	103
Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Luas Lantai Per Kapita (M ²) di Provinsi Maluku, 2018	114
Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, 2018.....	118
Gambar 7.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018	141
Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2018.....	153

<https://maluku.bps.go.id>

BABI

PENDAHULUAN

<https://id.iduku.org-go.id>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan bernegara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di antaranya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, pembangunan diselenggarakan oleh pemerintah dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan sosial-budaya. Pembangunan tersebut dilakukan baik oleh pemerintah di tingkat pusat maupun di daerah.

Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh banyak faktor, di antaranya yang utama adalah perencanaan. Tanpa perencanaan yang baik dan matang, mustahil proses pembangunan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, proses pembangunan jangka panjang juga memerlukan monitoring yang dilakukan terus-menerus, dan akhirnya pembangunan juga perlu dievaluasi dan dinilai, apakah pembangunan yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan awalnya atau tidak.

Dalam kaitannya dengan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan, diperlukan dukungan data dan informasi yang memotret kondisi masyarakat secara akurat dan lengkap sehingga para perumus dan pengambil kebijakan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dengan dukungan data dan informasi yang lengkap serta akurat, kebutuhan masyarakat yang perlu dibangun dapat direncanakan dengan baik, demikian pula evaluasi terhadap hasilnya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat diketahui sehingga perbaikan dan peningkatan di masa depan dapat dirumuskan.

Statistik Kesejahteraan Rakyat dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik memuat berbagai data statistik yang penting dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan, Perumahan, dan indikator sosial-ekonomi lainnya. Angka-angka Statistik Kesejahteraan Rakyat dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan setiap tahun. Data statistik tersebut dapat disusun berbagai indikator penting misalnya seperti indikator rumah layak, air minum layak, angka kesakitan, sanitasi layak, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan lain sebagainya.

Pembangunan merupakan upaya bersama yang membutuhkan kerja sama banyak pihak. Penyediaan Statistik Kesejahteraan Rakyat ini merupakan sumbangsih BPS bagi proses pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

1.2 Tujuan Penulisan

Penyusunan publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data Statistik Kesejahteraan Rakyat secara berkala dan berkesinambungan. Data dan informasi dalam publikasi ini dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan di Provinsi Maluku pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

1.3 Sumber Data

Seluruh data yang disajikan pada Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Tahun 2018 bersumber dari Susenas Maret 2018. Data disajikan dalam bentuk tabel persentase dan grafik menurut kabupaten dan kota. Pada beberapa tabel, data dibedakan menurut jenis kelamin yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian kesetaraan gender.

1.4 Metodologi

Tabel yang disajikan pada publikasi ini merupakan hasil pengolahan *raw* data Susenas Maret 2018. Faktor pengali/penimbang yang digunakan adalah hasil proyeksi penduduk Provinsi Maluku 2010—2035 menurut kabupaten/kota. Penduduk Provinsi Maluku 2018 berdasarkan proyeksi penduduk tersebut tercatat sebesar 1,77 juta jiwa.

1.5 Sistematika Penyajian

Publikasi ini terdiri atas pendahuluan dan ulasan singkat serta tabel pokok. Bagian pendahuluan terdiri atas latar belakang, tujuan penulisan, sumber data, metodologi, dan sistematika penyajian. Bagian ulasan singkat tabel pokok terdiri dari bab Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Perumahan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Keadaan Sosial Ekonomi rumah tangga lainnya.

BAB II

KEPENDUDUKAN

<https://mku.bpp.go.id>

2.1 Konsep Dan Definisi

Dalam publikasi ini digunakan konsep dan definisi sebagai berikut:

1. **Penduduk** didefinisikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial tertentu selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
2. **Rasio jenis kelamin** didefinisikan sebagai perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.
3. **Angka beban ketergantungan** didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0—14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan usia produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15—64 tahun (usia produktif).
4. **Belum kawin** didefinisikan sebagai status dari mereka yang pada saat pencacahan belum terikat dalam perkawinan.
5. **Kawin** didefinisikan sebagai status dari mereka yang terikat perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.
6. **Cerai hidup** didefinisikan sebagai status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya, tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri yang ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.
7. **Cerai mati** didefinisikan sebagai status dari mereka yang ditinggal mati oleh suami/istrinya dan belum kawin lagi.
8. **Pernah kawin** didefinisikan sebagai status dari mereka yang pada saat pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati.
9. **Akta kelahiran** didefinisikan sebagai surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS).

10. Nomor Induk Kependudukan (NIK) didefinisikan sebagai nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

2.2 Ulasan Singkat

Paradigma pembangunan negara dewasa ini telah bergeser dari yang sebelumnya mengejar pertumbuhan ekonomi semata menjadi peningkatan kualitas manusia atau penduduknya. Penduduk merupakan unsur utama pembangunan selain karena perannya sebagai pelaku, penduduk yang sejahtera dan berkualitas juga merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dari proses pembangunan. Dengan kata lain, penduduk hadir dalam setiap tahapan pembangunan. Sebagai subjek, penduduk melaksanakan pembangunan melalui peran dan kontribusi di berbagai bidang, sementara sebagai objek, penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, dalam hal ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Peran penduduk yang vital dalam pembangunan membawa kita dalam topik diskusi lainnya terkait kuantitas dan kualitas penduduk. Penduduk yang banyak merupakan modal bagi pembangunan (tenaga kerja, iuran pajak, angkatan perang) namun di saat yang sama juga dapat menjadi beban bagi pembangunan karena semakin banyaknya penduduk berarti semakin besar pula permintaan akan sandang, pangan, papan sementara daya dukung negara dan lingkungan tak selalu sejalan. Berangkat dari kenyataan tersebut, diskusi mengenai kualitas dan kuantitas penduduk saat ini lebih banyak bermuara pada penduduk yang seimbang, artinya jumlah penduduk diupayakan tetap tumbuh stabil (fertilitas dan mortalitas yang seimbang) dan juga berkualitas tinggi (sehat, produktif, berpendidikan).

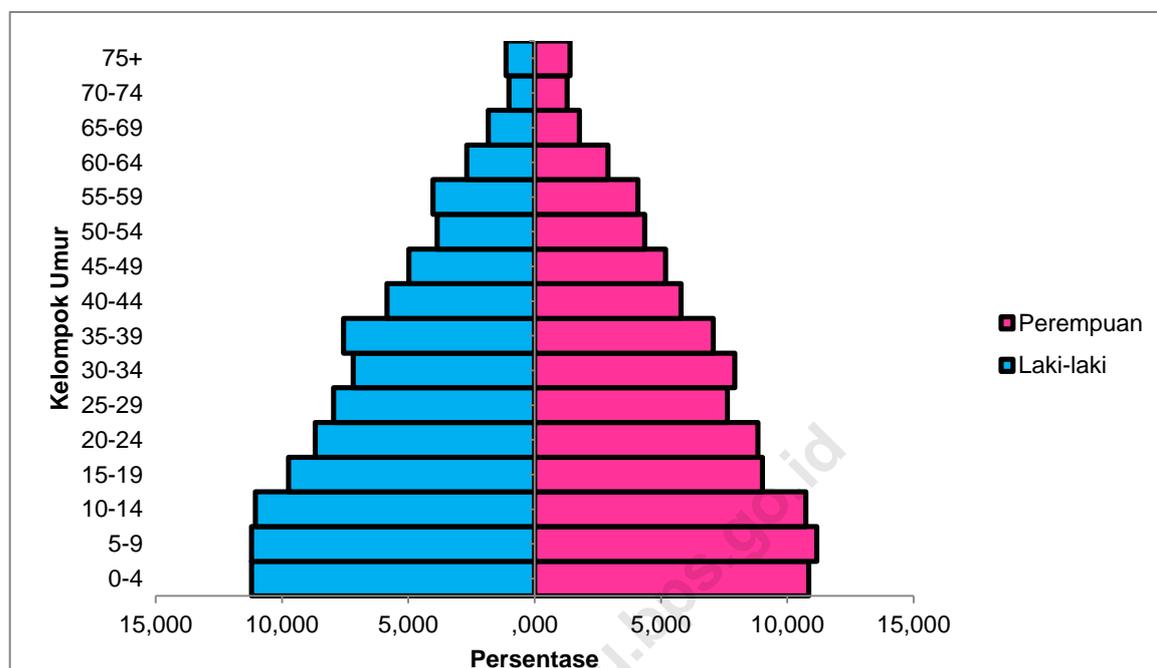
Dalam rangka mencapai kondisi kependudukan yang ideal, yaitu yang pertumbuhannya seimbang dan kualitasnya tinggi, diperlukan data dan informasi kependudukan. Susenas menyediakan beberapa di antaranya, yaitu: data penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur, status perkawinan, kepemilikan akta kelahiran, serta kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Badan Pusat Statistik dan Bappenas memproyeksikan jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2018 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 mencapai sekitar 1,77 juta jiwa. Angka ini juga yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan tabulasi dalam publikasi ini.

Secara umum penduduk laki-laki Maluku lebih banyak dibandingkan perempuan (Gambar 2.1). Sementara itu, komposisi penduduk Provinsi Maluku berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, yang digambarkan dalam bentuk piramida penduduk

menunjukkan bahwa frekuensi terbesar untuk penduduk laki-laki dan penduduk perempuan berada kelompok umur 5 – 9 tahun (Gambar 2.1).

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Provinsi Maluku, 2018

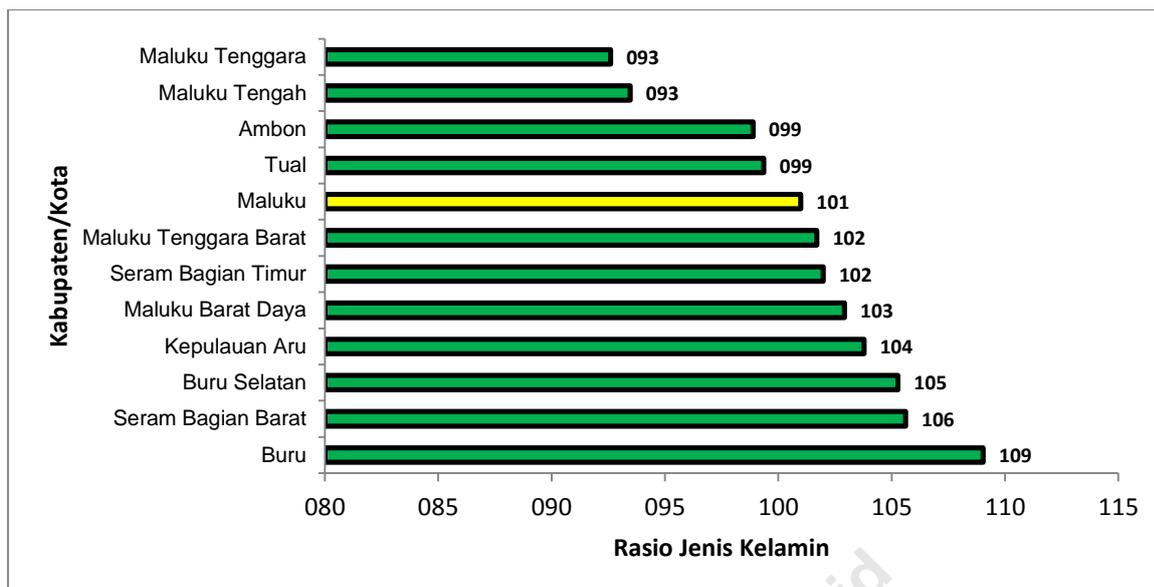


Sumber: Proyeksi Penduduk 2010—2035, BPS - Bappenas

Rasio jenis kelamin penduduk Maluku tahun 2018 sebesar 100,99. Angka tersebut berarti dari setiap 100 orang penduduk perempuan di Maluku terdapat sekitar 101 penduduk laki-laki atau penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.

Rasio jenis kelamin tertinggi tercatat di Kabupaten Buru (109,03) disusul Kabupaten Seram Bagian Barat (105,62). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan di Kabupaten Buru merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yaitu untuk setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Buru terdapat 109 lebih penduduk laki-laki. Sementara itu, rasio jenis kelamin terendah tercatat ada di Kabupaten Maluku Tenggara (92,60), yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 92 atau 93 penduduk laki-laki (lihat Gambar 2.2).

Gambar 2.2 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota, 2018



Sumber: Proyeksi Penduduk 2010—2035, BPS - Bappenas

Angka beban ketergantungan/rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Maluku pada tahun 2018 tercatat sebesar 65,28. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 65 orang penduduk usia tidak produktif. Semakin besar angka ketergantungan, semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Persentase penduduk usia produktif dan tidak produktif secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.C. Secara umum, 33,11 persen penduduk Maluku tercatat berusia muda (0—14 tahun); 62,67 persen berusia produktif (15—64 tahun); dan 4,22 persen berusia 65 tahun ke atas. Proporsi penduduk usia produktif tertinggi tercatat di Kota Ambon (68,14 persen) dan terendah di Kabupaten Maluku Barat Daya (56,89 persen). Hal ini menunjukkan bahwa angka ketergantungan di Kota Ambon lebih rendah dibandingkan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Proporsi penduduk usia muda tertinggi tercatat berada di Kabupaten Buru Selatan (39,25 persen) dan terendah di Kota Ambon (28,28 persen). Sebaliknya, proporsi penduduk usia tua tertinggi di Kabupaten Maluku Barat Daya (6,57 persen) dan terendah di Kabupaten Kepulauan Aru (2,50 persen).

Komposisi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut status perkawinan menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok laki-laki lebih besar dibanding perempuan, yakni 44,00 persen berbanding 36,52 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang tercatat berstatus cerai pada kelompok perempuan sebesar 10,44 persen, jauh lebih besar dibandingkan laki-laki yang hanya 3,89 persen. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.A hingga Tabel 2.4.C.

Dari sisi kelengkapan administrasi kependudukan, terkait kepemilikan akta kelahiran pada anak dengan usia 0-17 tahun di Maluku tercatat sebesar 73,58 persen memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran merupakan salah satu hak anak yang seyogianya dipenuhi karena data yang ada dalam akta kelahiran dapat digunakan sebagai bukti jati diri bagi anak, sehubungan dengan hak waris atau klaim asuransi dan pengurusan hal-hal administratif lainnya, seperti tunjangan keluarga, paspor, KTP, SIM, pengurusan perkawinan, perijinan, masuk sekolah, mengurus beasiswa, dan lain-lain. Berdasarkan Tabel 2.6.C tercatat Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan daerah dengan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun terendah, yakni sebesar 57,61 persen, sementara itu yang tertinggi adalah Kota Ambon sebesar 83,38 persen. Kepemilikan akta kelahiran menunjukkan banyaknya penduduk yang kelahirannya dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil (KCS).

Persentase kepemilikan akte kelahiran pada anak umur 0 – 4 tahun lebih kecil dibanding anak usia 0 – 17 yaitu tercatat sebesar 43,24 persen. Kabupaten Kepulauan Aru merupakan daerah dengan kepemilikan akte kelahiran anak umur 0—4 tahun terendah, yaitu sebesar 32,23 persen, sedangkan tertinggi di Kabupaten Maluku Tenggara tercatat sebesar 56,06 persen. Data selengkapnya dapat dicermati pada Tabel 2.7.A. hingga Tabel 2.7.C.

Sementara itu persentase kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) penduduk Maluku usia 0—4 tahun, 5 tahun ke atas, dan 17 tahun ke atas berturut-turut tercatat sebesar 49,60 persen; 87,78 persen; dan 88,47 persen. Hal ini patut diduga masih rendahnya kesadaran penduduk untuk segera mendaftarkan anggota rumah tangganya yang baru lahir untuk mendapatkan NIK. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.9 hingga Tabel 2.14.

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas berstatus kawin dengan pasangan tidak tinggal di satu rumah, dapat dipakai sebagai indikator kesejahteraan terutama terkait keharmonisan rumah tangga. Di Provinsi Maluku tercatat 96,53 persen penduduk usia 10 tahun ke atas berstatus kawin yang pasangannya tinggal dalam satu rumah. Artinya, hanya 3,47 persen penduduk Maluku usia 10 tahun ke atas berstatus kawin yang tercatat pasangannya tidak tinggal dalam satu rumah.

Tabel 2.1
Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	50,15	49,85	100,00
02 Maluku Tenggara	49,10	50,90	100,00
03 Maluku Tengah	50,48	49,52	100,00
04 Buru	51,35	48,65	100,00
05 Kepulauan Aru	51,79	48,21	100,00
06 Seram Bagian Barat	50,94	49,06	100,00
07 Seram Bagian Timur	50,93	49,07	100,00
08 Maluku Barat Daya	50,37	49,63	100,00
09 Buru Selatan	51,38	48,62	100,00
71 Kota Ambon	49,89	50,11	100,00
72 Kota Tual	49,45	50,55	100,00
Maluku	50,42	49,58	100,00

Tabel 2.2

Persentase Penduduk Berumur 7 – 24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	50,62	49,38	100,00
02 Maluku Tenggara	51,19	48,81	100,00
03 Maluku Tengah	53,15	46,85	100,00
04 Buru	51,11	48,89	100,00
05 Kepulauan Aru	49,80	50,20	100,00
06 Seram Bagian Barat	52,85	47,15	100,00
07 Seram Bagian Timur	49,53	50,47	100,00
08 Maluku Barat Daya	52,47	47,53	100,00
09 Buru Selatan	53,22	46,78	100,00
71 Kota Ambon	49,12	50,88	100,00
72 Kota Tual	50,40	49,60	100,00
Maluku	51,07	48,93	100,00

Tabel 2.3.A

Persentase Penduduk Laki-Laki Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur (Tahun)			Jumlah
	0 – 14	15 – 64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Maluku Tenggara Barat	35,92	59,46	4,62	100,00
02 Maluku Tenggara	36,27	58,40	5,33	100,00
03 Maluku Tengah	32,75	62,49	4,76	100,00
04 Buru	34,85	61,28	3,87	100,00
05 Kepulauan Aru	34,05	63,24	2,71	100,00
06 Seram Bagian Barat	37,25	58,65	4,11	100,00
07 Seram Bagian Timur	35,69	61,12	3,19	100,00
08 Maluku Barat Daya	36,97	57,48	5,55	100,00
09 Buru Selatan	38,82	57,91	3,27	100,00
71 Kota Ambon	28,64	68,04	3,32	100,00
72 Kota Tual	35,52	61,11	3,38	100,00
Maluku	33,46	62,55	3,99	100,00

Tabel 2.3.B

Persentase Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur (Tahun)			Jumlah
	0 – 14	15 – 64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Maluku Tenggara Barat	34,69	59,93	5,39	100,00
02 Maluku Tenggara	32,98	60,49	6,53	100,00
03 Maluku Tengah	31,95	62,92	5,13	100,00
04 Buru	34,37	62,15	3,48	100,00
05 Kepulauan Aru	36,59	61,14	2,28	100,00
06 Seram Bagian Barat	36,78	58,89	4,33	100,00
07 Seram Bagian Timur	35,79	60,65	3,56	100,00
08 Maluku Barat Daya	36,11	56,29	7,61	100,00
09 Buru Selatan	39,71	56,62	3,67	100,00
71 Kota Ambon	27,91	68,23	3,86	100,00
72 Kota Tual	33,14	62,77	4,09	100,00
Maluku	32,75	62,80	4,45	100,00

Tabel 2.3.C
Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur (Tahun)			Jumlah
	0 – 14	15 – 64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Maluku Tenggara Barat	35,31	59,69	5,00	100,00
02 Maluku Tenggara	34,60	59,46	5,94	100,00
03 Maluku Tengah	32,35	62,70	4,94	100,00
04 Buru	34,61	61,70	3,68	100,00
05 Kepulauan Aru	35,27	62,22	2,50	100,00
06 Seram Bagian Barat	37,02	58,77	4,22	100,00
07 Seram Bagian Timur	35,74	60,89	3,37	100,00
08 Maluku Barat Daya	36,54	56,89	6,57	100,00
09 Buru Selatan	39,25	57,28	3,46	100,00
71 Kota Ambon	28,28	68,14	3,59	100,00
72 Kota Tual	34,32	61,95	3,74	100,00
Maluku	33,11	62,67	4,22	100,00

Tabel 2.4.A

Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	36,43	60,22	0,98	2,37	100,00
02 Maluku Tenggara	44,62	52,38	0,21	2,78	100,00
03 Maluku Tengah	43,36	52,17	1,28	3,19	100,00
04 Buru	40,03	57,12	0,83	2,02	100,00
05 Kepulauan Aru	44,86	51,75	0,53	2,86	100,00
06 Seram Bagian Barat	41,04	56,02	0,89	2,06	100,00
07 Seram Bagian Timur	42,44	51,51	2,20	3,85	100,00
08 Maluku Barat Daya	39,39	56,56	0,11	3,93	100,00
09 Buru Selatan	47,49	48,29	0,72	3,50	100,00
71 Kota Ambon	48,33	47,65	0,64	3,39	100,00
72 Kota Tual	46,34	50,71	0,31	2,65	100,00
Maluku	44,00	52,11	0,87	3,02	100,00

Tabel 2.4.B

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	29,60	60,18	2,58	7,64	100,00
02 Maluku Tenggara	36,08	50,49	2,71	10,72	100,00
03 Maluku Tengah	34,23	54,15	3,05	8,57	100,00
04 Buru	32,99	59,91	1,35	5,75	100,00
05 Kepulauan Aru	35,26	56,29	1,66	6,79	100,00
06 Seram Bagian Barat	32,52	59,01	1,22	7,25	100,00
07 Seram Bagian Timur	35,88	54,89	1,99	7,24	100,00
08 Maluku Barat Daya	31,50	57,07	1,45	9,99	100,00
09 Buru Selatan	41,75	49,77	1,37	7,11	100,00
71 Kota Ambon	42,12	46,75	3,51	7,62	100,00
72 Kota Tual	40,08	48,70	2,47	8,75	100,00
Maluku	36,52	53,04	2,55	7,89	100,00

Tabel 2.4.C

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	33,01	60,20	1,78	5,00	100,00
02 Maluku Tenggara	40,22	51,41	1,50	6,87	100,00
03 Maluku Tengah	38,83	53,15	2,16	5,86	100,00
04 Buru	36,61	58,47	1,09	3,84	100,00
05 Kepulauan Aru	40,26	53,93	1,07	4,74	100,00
06 Seram Bagian Barat	36,85	57,49	1,05	4,61	100,00
07 Seram Bagian Timur	39,23	53,16	2,10	5,51	100,00
08 Maluku Barat Daya	35,46	56,81	0,78	6,95	100,00
09 Buru Selatan	44,68	49,01	1,04	5,27	100,00
71 Kota Ambon	45,21	47,19	2,08	5,51	100,00
72 Kota Tual	43,14	49,68	1,41	5,76	100,00
Maluku	40,28	52,57	1,71	5,44	100,00

Tabel 2.5.A

Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 15 – 49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	33,86	64,55	1,25	0,33	100,00
02 Maluku Tenggara	46,47	52,71	0,34	0,48	100,00
03 Maluku Tengah	44,90	53,94	0,75	0,41	100,00
04 Buru	36,86	61,58	0,95	0,60	100,00
05 Kepulauan Aru	44,35	53,36	0,53	1,77	100,00
06 Seram Bagian Barat	38,45	60,61	0,73	0,21	100,00
07 Seram Bagian Timur	40,81	56,42	2,31	0,47	100,00
08 Maluku Barat Daya	38,29	60,81	0,19	0,71	100,00
09 Buru Selatan	42,16	55,56	0,74	1,54	100,00
71 Kota Ambon	49,25	49,16	0,44	1,15	100,00
72 Kota Tual	44,64	53,85	0,45	1,07	100,00
Maluku	43,69	54,80	0,74	0,77	100,00

Tabel 2.5.B

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 – 49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	25,04	71,11	2,89	0,96	100,00
02 Maluku Tenggara	35,42	58,37	3,21	3,00	100,00
03 Maluku Tengah	31,69	62,23	3,64	2,44	100,00
04 Buru	27,23	70,24	1,45	1,09	100,00
05 Kepulauan Aru	28,66	66,69	2,10	2,54	100,00
06 Seram Bagian Barat	26,10	70,60	1,41	1,89	100,00
07 Seram Bagian Timur	30,70	64,13	2,11	3,06	100,00
08 Maluku Barat Daya	26,04	70,62	1,98	1,35	100,00
09 Buru Selatan	31,94	64,70	1,54	1,83	100,00
71 Kota Ambon	41,92	52,29	3,92	1,87	100,00
72 Kota Tual	37,11	57,64	2,75	2,50	100,00
Maluku	33,35	61,66	2,93	2,05	100,00

Tabel 2.5.C

Persentase Penduduk Berumur 15 – 49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	29,48	67,81	2,07	0,64	100,00
02 Maluku Tenggara	40,81	55,61	1,81	1,77	100,00
03 Maluku Tengah	38,36	58,05	2,18	1,42	100,00
04 Buru	32,11	65,85	1,20	0,84	100,00
05 Kepulauan Aru	37,02	59,59	1,26	2,13	100,00
06 Seram Bagian Barat	32,39	65,51	1,06	1,04	100,00
07 Seram Bagian Timur	35,83	60,21	2,21	1,74	100,00
08 Maluku Barat Daya	32,33	65,59	1,06	1,02	100,00
09 Buru Selatan	37,31	59,90	1,12	1,68	100,00
71 Kota Ambon	45,63	50,71	2,16	1,50	100,00
72 Kota Tual	40,81	55,78	1,62	1,79	100,00
Maluku	38,59	58,18	1,82	1,40	100,00

Tabel 2.6.A

Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 0 – 17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akte Perkawinan				Jumlah
	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Punya	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	48,38	18,93	30,96	1,73	100,00
02 Maluku Tenggara	37,34	42,28	19,91	0,47	100,00
03 Maluku Tengah	50,10	24,30	25,29	0,32	100,00
04 Buru	65,40	9,56	24,79	0,25	100,00
05 Kepulauan Aru	34,13	24,20	41,34	0,34	100,00
06 Seram Bagian Barat	51,63	16,61	31,56	0,20	100,00
07 Seram Bagian Timur	32,86	24,79	41,53	0,82	100,00
08 Maluku Barat Daya	49,73	17,63	30,84	1,80	100,00
09 Buru Selatan	47,75	20,09	31,72	0,44	100,00
71 Kota Ambon	63,92	19,52	16,51	0,05	100,00
72 Kota Tual	30,21	50,88	18,15	0,75	100,00
Maluku	50,65	22,63	26,25	0,47	100,00

Tabel 2.6.B

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 0 – 17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akte Perkawinan				Jumlah
	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Punya	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	50,05	18,56	29,83	1,56	100,00
02 Maluku Tenggara	36,78	43,99	18,39	0,83	100,00
03 Maluku Tengah	50,37	21,65	27,68	0,30	100,00
04 Buru	68,48	10,24	21,00	0,29	100,00
05 Kepulauan Aru	37,74	27,71	34,06	0,49	100,00
06 Seram Bagian Barat	57,65	14,21	27,89	0,25	100,00
07 Seram Bagian Timur	31,18	26,39	42,14	0,29	100,00
08 Maluku Barat Daya	45,81	19,97	33,42	0,81	100,00
09 Buru Selatan	43,87	26,00	29,65	0,48	100,00
71 Kota Ambon	61,82	21,50	16,68	0,00	100,00
72 Kota Tual	30,54	47,80	20,03	1,64	100,00
Maluku	50,96	22,94	25,66	0,44	100,00

Tabel 2.6.C

Persentase Penduduk Berumur 0 – 17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akte Perkawinan				Jumlah
	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Punya	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	49,20	18,75	30,41	1,65	100,00
02 Maluku Tenggara	37,07	43,11	19,17	0,64	100,00
03 Maluku Tengah	50,23	23,02	26,45	0,31	100,00
04 Buru	66,89	9,89	22,95	0,27	100,00
05 Kepulauan Aru	35,93	25,95	37,70	0,42	100,00
06 Seram Bagian Barat	54,56	15,44	29,77	0,23	100,00
07 Seram Bagian Timur	32,04	25,57	41,83	0,56	100,00
08 Maluku Barat Daya	47,82	18,77	32,09	1,32	100,00
09 Buru Selatan	45,87	22,95	30,72	0,46	100,00
71 Kota Ambon	62,88	20,50	16,60	0,03	100,00
72 Kota Tual	30,37	49,36	19,08	1,19	100,00
Maluku	50,80	22,78	25,96	0,45	100,00

Tabel 2.7.A

Persentase Anak Laki-Laki Berumur 0 – 4 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akte Perkawinan				Jumlah
	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Punya	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	28,29	11,50	59,02	1,19	100,00
02 Maluku Tenggara	28,99	25,21	45,80	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	20,73	15,59	63,43	0,25	100,00
04 Buru	34,71	10,76	54,53	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	11,87	13,77	73,88	0,48	100,00
06 Seram Bagian Barat	27,88	9,91	62,21	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	16,68	22,10	59,51	1,72	100,00
08 Maluku Barat Daya	27,15	8,77	62,52	1,56	100,00
09 Buru Selatan	30,61	10,95	58,44	0,00	100,00
71 Kota Ambon	46,36	13,00	40,63	0,00	100,00
72 Kota Tual	24,58	32,21	42,99	0,21	100,00
Maluku	28,71	15,03	55,87	0,38	100,00

Tabel 2.7.B

Persentase Anak Perempuan Berumur 0 – 4 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akte Perkawinan				Jumlah
	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Punya	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	30,19	10,17	59,63	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	24,10	33,93	41,97	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	24,59	10,94	64,21	0,26	100,00
04 Buru	44,52	8,20	47,29	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	24,79	15,51	59,62	0,09	100,00
06 Seram Bagian Barat	25,51	9,54	64,94	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	18,55	20,36	59,95	1,14	100,00
08 Maluku Barat Daya	20,01	18,64	61,34	0,00	100,00
09 Buru Selatan	28,39	9,92	61,69	0,00	100,00
71 Kota Ambon	29,71	19,24	51,05	0,00	100,00
72 Kota Tual	24,15	23,50	50,51	1,83	100,00
Maluku	27,38	15,34	57,07	0,21	100,00

Tabel 2.7.C

Persentase Anak Berumur 0 – 4 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akte Perkawinan				Jumlah
	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Punya	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	29,24	10,84	59,33	0,60	100,00
02 Maluku Tenggara	26,62	29,44	43,94	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	22,62	13,31	63,81	0,26	100,00
04 Buru	39,53	9,50	50,97	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	17,68	14,55	67,46	0,30	100,00
06 Seram Bagian Barat	26,72	9,73	63,55	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	17,48	21,35	59,70	1,47	100,00
08 Maluku Barat Daya	23,46	13,88	61,91	0,75	100,00
09 Buru Selatan	29,46	10,42	60,12	0,00	100,00
71 Kota Ambon	38,08	16,10	45,81	0,00	100,00
72 Kota Tual	24,37	27,99	46,64	1,00	100,00
Maluku	28,06	15,18	56,46	0,30	100,00

Tabel 2.8

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Berstatus Kawin yang Pasangannya Biasa Tinggal di Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	99,18	97,96	98,57
02 Maluku Tenggara	96,73	94,77	95,74
03 Maluku Tengah	98,93	96,30	97,60
04 Buru	98,17	94,37	96,27
05 Kepulauan Aru	96,87	96,10	96,48
06 Seram Bagian Barat	97,92	95,66	96,78
07 Seram Bagian Timur	97,09	94,50	95,78
08 Maluku Barat Daya	98,68	96,88	97,78
09 Buru Selatan	97,87	98,87	98,37
71 Kota Ambon	94,22	95,60	94,90
72 Kota Tual	97,23	96,15	96,69
Maluku	97,16	95,91	96,53

Tabel 2.9

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	84,64	80,59	82,62
02 Maluku Tenggara	90,13	91,90	91,04
03 Maluku Tengah	86,31	84,89	85,60
04 Buru	85,77	85,31	85,55
05 Kepulauan Aru	88,94	89,21	89,07
06 Seram Bagian Barat	84,01	83,70	83,86
07 Seram Bagian Timur	76,05	73,28	74,66
08 Maluku Barat Daya	81,59	82,15	81,87
09 Buru Selatan	89,39	89,14	89,27
71 Kota Ambon	94,47	96,01	95,24
72 Kota Tual	91,05	89,67	90,35
Maluku	87,91	87,66	87,78

Tabel 2.10

Persentase Penduduk Berumur 17 Tahun ke Atas yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	83,95	81,08	82,50
02 Maluku Tenggara	90,78	91,82	91,33
03 Maluku Tengah	86,08	84,04	85,05
04 Buru	85,46	84,52	85,00
05 Kepulauan Aru	89,10	89,79	89,42
06 Seram Bagian Barat	82,88	82,26	82,57
07 Seram Bagian Timur	77,41	73,88	75,69
08 Maluku Barat Daya	84,53	84,13	84,33
09 Buru Selatan	90,55	91,09	90,81
71 Kota Ambon	97,21	96,93	97,07
72 Kota Tual	92,65	91,46	92,04
Maluku	88,92	88,02	88,47

Tabel 2.11

Persentase Anak Berumur 0 – 4 Tahun yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	38,46	39,70	39,08
02 Maluku Tenggara	57,94	62,36	60,08
03 Maluku Tengah	41,91	50,28	46,01
04 Buru	49,77	45,93	47,88
05 Kepulauan Aru	42,26	54,21	47,64
06 Seram Bagian Barat	53,03	34,55	43,93
07 Seram Bagian Timur	49,71	54,28	51,68
08 Maluku Barat Daya	40,46	39,44	39,93
09 Buru Selatan	55,19	46,40	50,66
71 Kota Ambon	59,70	59,30	59,50
72 Kota Tual	55,95	45,96	51,10
Maluku	49,74	49,45	49,60

BAB III

KESEHATAN

<https://idku.br.go.id>

II. KESEHATAN

3.1 Konsep dan Definisi

Dalam publikasi ini digunakan konsep dan definisi sebagai berikut:

1. **Penolong persalinan** didefinisikan sebagai orang yang menolong pada saat proses kelahiran anak (bayi). Hingga tahun 2014, penolong persalinan ditanyakan untuk anak usia di bawah lima tahun. Namun, mulai tahun 2015, penolong persalinan ditanyakan untuk wanita usia 15 – 49 tahun berstatus pernah kawin yang melahirkan anak dalam 2 tahun terakhir.
2. **Keluhan kesehatan** didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk, seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.
3. **Menderita sakit** didefinisikan sebagai mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan secara normal, seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya).
4. **Lamanya terganggu** didefinisikan sebagai lamanya hari dalam 1 bulan seseorang terganggu kegiatan sehari-harinya dan tidak merujuk pada keluhan yang terberat saja, mencakup jumlah hari untuk semua keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir.
5. **Berobat jalan** didefinisikan sebagai upaya anggota rumah tangga (ART) yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah ART.
6. **Mengobati sendiri** didefinisikan sebagai upaya oleh anggota rumah tangga/keluarga dengan melakukan pengobatan sendiri (tanpa datang ke tempat fasilitas kesehatan atau memanggil dokter/petugas kesehatan ke rumahnya), agar sembuh atau lebih ringan keluhan kesehatannya, misal dengan cara minum obat modern, jamu, kerokan, kompres, pijat, dan lain lain.
7. **Jaminan kesehatan** didefinisikan sebagai program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan. Menurut UU no. 40 tahun 2004 tentang sistem

jaminan sosial nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

8. **Rawat inap** didefinisikan sebagai upaya penyembuhan keluhan kesehatan dengan menginap 1 malam atau lebih di unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional, termasuk dalam kejadian ini adalah rawat inap untuk persalinan.

3.2 Ulasan Singkat

Pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pencapaian pembangunan kesehatan ditandai dengan terciptanya masyarakat yang secara proaktif berperilaku sehat dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan sasaran untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015—2019 adalah (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan; (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan (Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019, hal. 6).

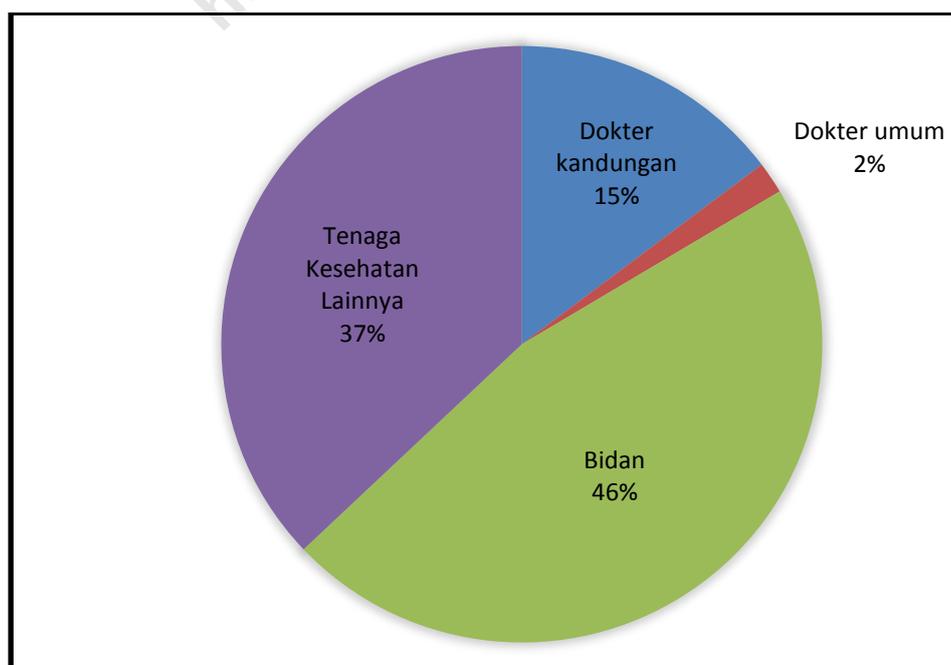
Sejalan dengan tujuan pembangunan di bidang kesehatan tersebut, Bab ini akan menyajikan data statistik kesehatan yang mencakup informasi penolong kelahiran, keluhan kesehatan, angka kesakitan, cara berobat, dan penggunaan jaminan kesehatan.

Data tempat melahirkan dan penolong kelahiran bayi memberikan informasi tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dari sisi kesehatan ibu dan anak, persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai serta ditolong oleh tenaga medis, seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun, famili, atau lainnya.

Berdasarkan hasil Susenas yang disajikan di Tabel 3.1, persentase perempuan pernah kawin (PPK) di Maluku pada 2018 yang melahirkan di rumah masih tinggi yaitu mencapai 65,46 persen, disusul di rumah sakit pemerintah/rumah sakit swasta/rumah sakit ibu dan anak (27,60 persen), di Puskesmas/Pustu/Polindes/ Poskedes (5,28 persen), dan di rumah bersalin/klinik (0,92 persen). Secara umum di Provinsi Maluku, proporsi penduduk perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan masih rendah, yaitu hanya mencapai 33,92 persen yang berarti 66,09 persen yang tercatat melahirkan bukan di fasilitas kesehatan (rumah).

Kemampuan dan ketrampilan penolong proses kelahiran diyakini sangat mempengaruhi tinggi rendahnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan barometer pelayanan kesehatan di suatu negara. Bila AKI masih tinggi patut diduga bahwa pelayanan kesehatan terhadap ibu belum optimal. Sementara itu, Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat, karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Tingginya angka kematian bayi tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah masih kurangnya kemampuan dan keterampilan penolong proses kelahiran. Berikut disajikan persentase perempuan pernah kawin (PPK) yang melahirkan dua tahun terakhir menurut penolong proses kelahiran terakhir di Provinsi Maluku tahun 2018.

Gambar 3.1
Persentase PPK yang Melahirkan Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2018



Sumber: Susenas Maret 2018, diolah.

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa sebagian besar proses kelahiran PPK yang melahirkan dua tahun terakhir di Maluku ditolong oleh tenaga medis terlatih (dokter kandungan, dokter umum, dan bidan) yaitu sebesar 62,80 persen. Masih ada PPK yang menggunakan jasa tenaga kesehatan lainnya sebagai penolong kelahiran (37 persen). Kesadaran perempuan untuk melahirkan secara sehat dan aman tercatat sudah cukup tinggi, hal ini terlihat cukup tingginya persentase penolong kelahiran oleh bidan, yaitu mencapai 46,40 persen. Sedangkan persentase penolong kelahiran yang ditangani oleh dokter kandungan dan dokter umum, masing-masing 14,68 persen dan 1,72 persen. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 3.2.

Tingkat kesakitan (*morbidity rate*) yang pada publikasi ini didekati dengan keluhan kesehatan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk. Pada tahun 2018, sebesar 19,34 persen penduduk laki-laki di Maluku tercatat mengalami keluhan kesehatan, sedangkan penduduk perempuan di Maluku yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 20,66 persen. Pada Tabel 3.3, terlihat bahwa persentase tertinggi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan secara umum tercatat di Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu sebesar 29,71 persen, dengan keluhan kesehatan penduduk laki-laki sebesar 27,97 persen dan penduduk perempuan sebesar 31,51 persen. Sementara itu kabupaten/kota dengan persentase penduduk mengalami keluhan kesehatan terendah tercatat di Kota Tual dengan keluhan kesehatan penduduk laki-laki sebesar 13,88 persen dan penduduk perempuan sebesar 17,38 persen.

Indikator tingkat kesakitan (*morbidity rate*) dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Indikator ini bisa dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dengan jumlah keseluruhan penduduk. Penduduk yang tercatat mengalami gangguan kesehatan adalah mereka yang karena keluhan kesehatan yang dialaminya, menyebabkan tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya.

Data Susenas 2018 yang dapat dicermati pada Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa tingkat kesakitan yang dialami penduduk laki-laki di Maluku hampir seimbang dengan tingkat kesakitan yang dialami penduduk perempuan. Tingkat kesakitan yang

dialami penduduk laki-laki tercatat sebesar 10,73 persen, sedangkan tingkat kesakitan yang dialami penduduk perempuan sebesar 11,28 persen.

Angka kesakitan memberikan gambaran tentang besarnya keluhan kesehatan yang dialami penduduk yang dapat mengganggu kegiatan sehari-harinya. Angka kesakitan penduduk di Maluku tercatat sebesar 11,00 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang yang mengalami keluhan kesehatan, 11 orang di antaranya merasa bahwa keluhannya itu menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Angka kesakitan yang paling besar tercatat dialami oleh penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur (21,26 persen). Angka kesakitan yang tinggi ini perlu mendapat penanganan mengingat tingkat kesakitan yang tinggi berpengaruh terhadap tingkat produktivitas penduduk yang pada akhirnya akan menyebabkan hilangnya peluang dalam perekonomian. Kabupaten Maluku Tengah tercatat memiliki penduduk dengan tingkat kesakitan terendah di Maluku, yaitu sebesar 8,60 persen.

Informasi lain yang juga penting dalam bab ini adalah karakteristik pengobatan. Karakteristik pengobatan yang dimaksud adalah bagaimana cara pengobatan (berobat jalan atau rawat inap), alasan tidak berobat jalan, pemanfaatan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang ada, seperti rumah sakit, dokter praktik, poliklinik, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya, penggunaan jaminan kesehatan, serta lamanya masyarakat melakukan rawat inap.

Karakteristik pertama yang dibahas terkait cara pengobatan adalah berobat jalan. Sebesar 40,87 persen penduduk Maluku yang mengalami keluhan kesehatan tercatat melakukan pengobatan dengan cara berobat jalan (table 3.5). Hal ini berarti sebesar 49,13 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tidak berobat jalan, Pada Tabel 3.6.A hingga Tabel 3.6.C dapat dicermati alasan penduduk Maluku tidak berobat jalan, padahal mengalami keluhan kesehatan. Alasan yang tercatat paling menonjol adalah melakukan pengobatan sendiri, yaitu sebesar 67,95 persen, alasan lain yang cukup menonjol adalah merasa tidak perlu (25,51 persen) dan tidak mempunyai biaya berobat (2,78 persen). Sementara itu, alasan tidak ada biaya transportasi, tidak ada sarana transportasi, waktu tunggu pelayanan lama, dan alasan tidak ada yang mendampingi berkisar di bawah 0,70 persen.

Ada dua kelompok tempat/fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa dituju oleh masyarakat untuk berobat jalan, yaitu fasilitas kesehatan (rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, praktik dokter/bidan, klinik/praktik dokter bersama, puskesmas/puskesmas pembantu (pustu), Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat) dan fasilitas non kesehatan (praktik pengobatan tradisional/alternatif atau tempat lainnya). Susenas 2018 mencatat, penduduk Maluku yang mengalami keluhan atau gangguan kesehatan cenderung lebih memilih tempat pelayanan kesehatan yang

relatif dekat dengan tempat tinggalnya untuk mendapatkan pengobatan. Berturut-turut tempat/fasilitas pelayanan kesehatan yang tercatat paling banyak diminati oleh penduduk Maluku untuk berobat jalan adalah puskesmas/pustu sebesar 59,27 persen, praktik dokter/bidan sebesar 20,75 persen, RS Pemerintah sebesar 7,83 persen, dan Klinik/Praktik Dokter Bersama sebesar 6,41 persen.

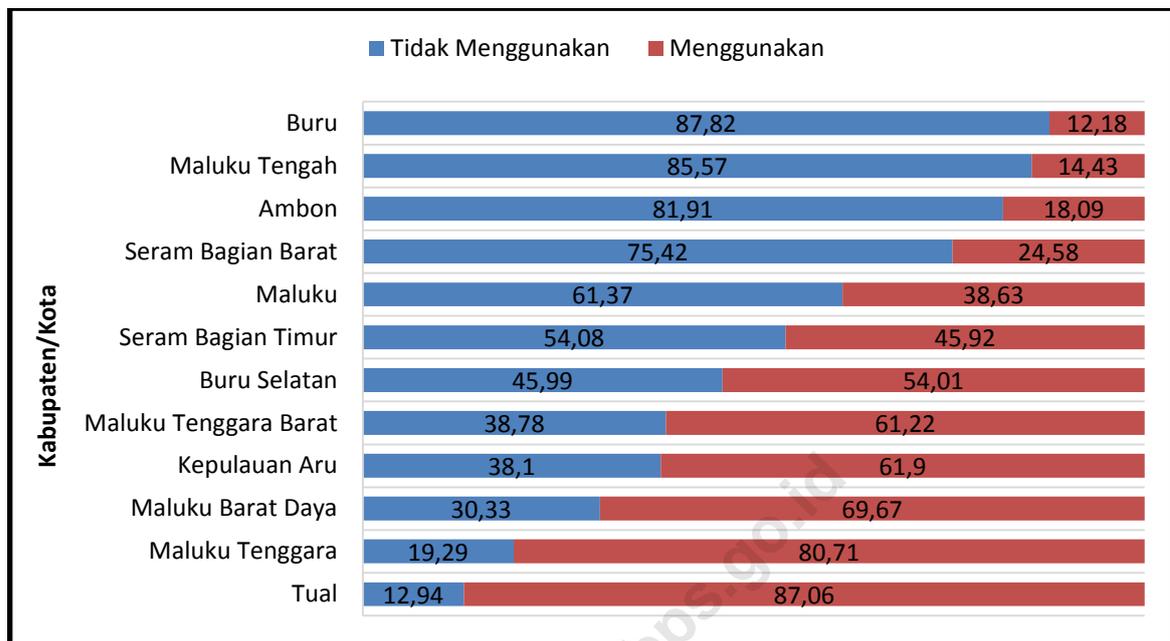
Tempat praktik puskesmas/pustu paling banyak dipilih masyarakat karena tempat tersebut terdapat di setiap kecamatan dan masih terbatasnya rumah sakit di beberapa kabupaten/kota di Maluku. Kabupaten/Kota yang penduduknya tercatat memanfaatkan puskesmas/pustu di bawah rata-rata Maluku adalah Kabupaten Maluku Tengah sebesar 26,65 persen, Kabupaten Buru sebesar 28,76 persen, Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 58,58 persen, dan Kota Ambon sebesar 57,33 persen. Data selengkapnya dapat dicermati pada Tabel 3.7.A hingga Tabel 3.7.C.

Statistik penggunaan jaminan kesehatan oleh masyarakat Maluku untuk berobat jalan dapat dilihat pada Tabel 3.8. Persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan pada sebulan terakhir tahun 2018 di Maluku tercatat sebesar 38,63 persen. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Tual memiliki catatan persentase tertinggi penggunaan jaminan kesehatan untuk berobat jalan, yaitu sebesar 87,06 persen, sedangkan Kabupaten Buru memiliki persentase terendah, yaitu sebesar 12,18 persen.

Sementara itu, pada Tabel 3.9.A hingga Tabel 3.9.C, dapat dilihat tingkat penggunaan jaminan kesehatan oleh penduduk Maluku menurut jenis jaminan kesehatan. Sebesar 21,39 persen penduduk Maluku tercatat menggunakan BPJS Kesehatan Non Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan sebesar 8,06 persen menggunakan BPJS Kesehatan PBI. Sementara itu, penduduk Maluku yang menggunakan jaminan kesehatan berupa Jamkesda, jaminan kesehatan berupa asuransi swasta, dan jaminan kesehatan dari perusahaan/kantor masing-masing berturut-turut sebesar 9,38 persen; 0,02 persen; dan 0,03 persen.

Gambar 3.2 memperlihatkan sebesar 38,63 persen penduduk Maluku tercatat menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Dari sebelas kabupaten/kota di Maluku, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan kabupaten/kota yang persentase penduduknya menggunakan jaminan kesehatan di bawah rata-rata provinsi, yaitu masing-masing tercatat sebesar 12,18 persen; 14,43 persen; 18,09 persen dan 24,58 persen.

Gambar 3.2
Persentase Penduduk Maluku Menurut Penggunaan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dan Kabupaten Kota, 2018



Sumber: Susenas Maret 2018, diolah.

Pada bab kesehatan ini juga dibahas terkait karakteristik penduduk yang pernah menjalani rawat inap selama setahun terakhir. Tabel 3.10 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebesar 2,81 persen penduduk Maluku tercatat pernah menjalani rawat inap. Terdapat kecenderungan persentase penduduk perempuan yang pernah menjalani rawat inap lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Fasilitas kesehatan yang tercatat relatif banyak dimanfaatkan penduduk untuk menjalani rawat inap (Tabel 3.11.A hingga Tabel 3.11.C) adalah Rumah Sakit Pemerintah (68,55 persen), Rumah Sakit Swasta (25,45 persen), dan Puskesmas/Pustu (5,57 persen). Fasilitas kesehatan berupa praktik dokter/bidan, klinik/praktik dokter bersama, dan praktik pengobatan tradisional/alternatif hanya dimanfaatkan masing-masing sebesar kurang dari satu persen penduduk Maluku untuk menjalani rawat inap. Sementara di Kabupaten Maluku Barat Daya lebih dari 51 persen penduduknya memanfaatkan puskesmas/pustu untuk menjalani rawat inap.

Pada Tabel 3.12 dapat dilihat penggunaan jaminan kesehatan oleh penduduk Maluku untuk rawat inap. Sebesar 58,63 persen penduduk Maluku menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap. Persentase penduduk laki-laki menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap tercatat lebih tinggi (60,93 persen) dibandingkan penduduk perempuan (56,89 persen). Apabila dikaitkan dengan jumlah hari/lamanya rawat inap seperti pada Tabel 3.13.A hingga Tabel 3.13.C, ternyata bahwa persentase penduduk laki-laki yang menjalani rawat inap lebih dari 3 hari persentasenya tercatat lebih tinggi (62,13 persen) dibandingkan penduduk perempuan (48,44 persen).

Tabel 3.1

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 – 49 Tahun Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten /Kota	Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir						Jumlah
	RS Pemerintah/ RS Swasta/ RSIA	Rumah Bersalin/ Klinik	Puskesmas/ Pustu/ Polindes/ Poskesdes	Praktik Nakes	Rumah	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Maluku Tenggara Barat	37,44	1,08	14,12	0,00	47,37	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	26,87	0,00	12,52	0,00	60,62	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	18,47	1,56	4,92	0,00	72,47	2,59	100,00
04 Buru	8,09	2,22	6,98	0,79	81,93	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	18,90	0,00	4,26	0,90	75,94	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	11,32	0,00	3,27	0,00	84,26	1,15	100,00
07 Seram Bagian Timur	11,72	0,00	2,00	0,00	86,28	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	7,80	0,00	9,11	0,00	83,09	0,00	100,00
09 Buru Selatan	1,03	0,00	2,43	0,00	96,54	0,00	100,00
71 Kota Ambon	60,60	1,23	1,82	0,00	36,35	0,00	100,00
72 Kota Tual	42,56	1,02	9,14	0,00	47,28	0,00	100,00
Maluku	27,60	0,92	5,28	0,12	65,46	0,63	100,00

Tabel 3.2

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 – 49 Tahun Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Penolong Proses Kelahiran Terakhir				Jumlah
	Dokter Kandungan	Dokter Umum	Bidan	Tenaga Kesehatan Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	13,02	3,19	60,92	22,87	100,00
02 Maluku Tenggara	12,86	4,80	54,27	28,08	100,00
03 Maluku Tengah	7,85	0,00	54,15	38,00	100,00
04 Buru	4,14	0,46	52,45	42,95	100,00
05 Kepulauan Aru	12,28	0,99	25,95	57,75	100,00
06 Seram Bagian Barat	7,09	3,13	44,17	45,62	100,00
07 Seram Bagian Timur	8,57	0,00	33,20	58,23	100,00
08 Maluku Barat Daya	4,91	0,00	41,18	53,91	100,00
09 Buru Selatan	0,00	0,00	18,23	80,15	100,00
71 Kota Ambon	38,16	2,45	40,90	18,48	100,00
72 Kota Tual	4,27	5,14	74,84	15,74	100,00
Maluku	14,68	1,72	46,40	36,99	100,00

Tabel 3.3

Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	20,92	19,39	20,16
02 Maluku Tenggara	23,06	22,14	22,59
03 Maluku Tengah	17,14	17,41	17,27
04 Buru	17,48	16,98	17,24
05 Kepulauan Aru	16,94	18,32	17,60
06 Seram Bagian Barat	21,41	21,58	21,49
07 Seram Bagian Timur	27,97	31,51	29,71
08 Maluku Barat Daya	22,20	23,92	23,06
09 Buru Selatan	16,01	16,65	16,32
71 Kota Ambon	18,99	22,38	20,69
72 Kota Tual	13,88	17,38	15,65
Maluku	19,34	20,66	19,99

Tabel 3.4

Angka Kesakitan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin						Total		
	Laki-Laki			Perempuan			Terganggu Kegiatannya	Tidak Terganggu Kegiatannya	Jumlah
	Terganggu Kegiatannya	Tidak Terganggu Kegiatannya	Jumlah	Terganggu Kegiatannya	Tidak Terganggu Kegiatannya	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Maluku Tenggara Barat	12,80	87,20	100,00	11,16	88,84	100,00	11,98	88,02	100,00
02 Maluku Tenggara	12,31	87,69	100,00	13,05	86,95	100,00	12,69	87,31	100,00
03 Maluku Tengah	8,07	91,93	100,00	9,15	90,85	100,00	8,60	91,40	100,00
04 Buru	12,09	87,91	100,00	10,48	89,52	100,00	11,31	88,69	100,00
05 Kepulauan Aru	9,70	90,30	100,00	10,12	89,88	100,00	9,90	90,10	100,00
06 Seram Bagian Barat	11,82	88,18	100,00	11,18	88,82	100,00	11,51	88,49	100,00
07 Seram Bagian Timur	19,99	80,01	100,00	22,58	77,42	100,00	21,26	78,74	100,00
08 Maluku Barat Daya	15,36	84,64	100,00	17,60	82,40	100,00	16,47	83,53	100,00
09 Buru Selatan	8,35	91,65	100,00	9,27	90,73	100,00	8,80	91,20	100,00
71 Kota Ambon	8,85	91,15	100,00	9,68	90,32	100,00	9,26	90,74	100,00
72 Kota Tual	9,96	90,04	100,00	11,15	88,85	100,00	10,56	89,44	100,00
Maluku	10,73	89,27	100,00	11,28	88,72	100,00	11,00	89,00	100,00

Tabel 3.5

Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir yang Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	37,92	40,29	39,06
02 Maluku Tenggara	64,10	68,88	66,48
03 Maluku Tengah	37,76	33,78	35,77
04 Buru	44,64	43,33	44,01
05 Kepulauan Aru	48,43	43,95	46,18
06 Seram Bagian Barat	41,45	39,39	40,44
07 Seram Bagian Timur	40,64	44,71	42,76
08 Maluku Barat Daya	41,26	46,40	43,90
09 Buru Selatan	24,72	37,99	31,31
71 Kota Ambon	30,23	38,50	34,71
72 Kota Tual	54,60	63,04	59,34
Maluku	39,55	42,14	40,87

Tabel 3.6.A

Persentase Penduduk Laki-Laki yang Memiliki Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Tetapi Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Alasan Utama Tidak Berobat Jalan								Jumlah
	Tidak Punya Biaya Berobat	Tidak Ada Biaya Transport	Tidak Ada Sarana Transportasi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama	Mengobati Sendiri	Tidak Ada Yang Mendampingi	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Maluku Tenggara Barat	0,19	1,79	0,00	0,00	64,91	0,73	26,56	5,81	100,00
02 Maluku Tenggara	0,00	0,81	0,00	2,25	67,27	0,00	28,31	1,36	100,00
03 Maluku Tengah	3,18	0,01	0,00	0,00	83,38	0,00	13,43	0,00	100,00
04 Buru	5,50	0,00	4,74	2,32	65,94	0,00	21,49	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	0,06	1,73	1,36	0,00	65,68	0,00	30,38	0,79	100,00
06 Seram Bagian Barat	4,71	0,60	1,02	1,10	67,17	0,00	24,48	0,93	100,00
07 Seram Bagian Timur	1,10	3,16	0,55	0,00	82,06	1,06	12,07	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,79	0,74	0,00	0,00	58,38	0,00	32,11	7,97	100,00
09 Buru Selatan	6,90	0,95	1,11	0,00	69,70	0,00	21,34	0,00	100,00
71 Kota Ambon	0,76	0,00	0,00	1,13	68,34	0,00	28,29	1,48	100,00
72 Kota Tual	0,00	0,00	0,00	8,47	47,78	1,68	42,07	0,00	100,00
Maluku	2,10	0,65	0,57	0,87	70,96	0,19	23,28	1,39	100,00

Tabel 3.6.B

Persentase Penduduk Perempuan yang Memiliki Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Tetapi Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Alasan Utama Tidak Berobat Jalan								Jumlah
	Tidak Punya Biaya Berobat	Tidak Ada Biaya Transport	Tidak Ada Sarana Transportasi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama	Mengobati Sendiri	Tidak Ada Yang Mendampingi	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Maluku Tenggara Barat	4,91	2,02	0,00	0,00	64,00	0,94	23,24	4,89	100,00
02 Maluku Tenggara	0,00	0,00	0,00	2,24	61,26	0,00	32,65	3,85	100,00
03 Maluku Tengah	4,24	0,00	0,00	0,57	76,40	0,50	18,28	0,00	100,00
04 Buru	4,22	0,00	5,86	0,00	60,26	0,00	29,66	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	0,31	4,06	0,00	0,00	59,40	0,00	35,51	0,72	100,00
06 Seram Bagian Barat	3,95	0,00	1,22	1,09	69,53	0,00	22,61	1,58	100,00
07 Seram Bagian Timur	4,36	1,66	0,90	0,47	75,39	0,49	15,50	1,22	100,00
08 Maluku Barat Daya	1,35	0,77	2,05	0,00	54,98	0,00	35,46	5,39	100,00
09 Buru Selatan	21,94	0,00	0,00	0,00	63,29	0,00	13,94	0,83	100,00
71 Kota Ambon	1,63	0,76	0,00	0,54	56,89	0,00	38,20	1,97	100,00
72 Kota Tual	0,00	0,00	0,00	3,94	59,82	2,47	33,78	0,00	100,00
Maluku	3,46	0,72	0,67	0,60	64,96	0,26	27,73	1,60	100,00

Tabel 3.6.C

Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Tetapi Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Alasan Utama Tidak Berobat Jalan								Jumlah
	Tidak Punya Biaya Berobat	Tidak Ada Biaya Transport	Tidak Ada Sarana Transportasi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama	Mengobati Sendiri	Tidak Ada Yang Mendampingi	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Maluku Tenggara Barat	2,41	1,90	0,00	0,00	64,48	0,83	25,00	5,38	100,00
02 Maluku Tenggara	0,00	0,43	0,00	2,24	64,49	0,00	30,32	2,51	100,00
03 Maluku Tengah	3,72	0,00	0,00	0,30	79,79	0,26	15,93	0,00	100,00
04 Buru	4,88	0,00	5,29	1,20	63,18	0,00	25,45	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	0,19	2,95	0,65	0,00	62,40	0,00	33,06	0,75	100,00
06 Seram Bagian Barat	4,33	0,30	1,12	1,09	68,35	0,00	23,55	1,26	100,00
07 Seram Bagian Timur	2,74	2,41	0,73	0,24	78,71	0,78	13,80	0,61	100,00
08 Maluku Barat Daya	1,07	0,76	1,01	0,00	56,71	0,00	33,76	6,70	100,00
09 Buru Selatan	13,63	0,52	0,61	0,00	66,83	0,00	18,03	0,37	100,00
71 Kota Ambon	1,20	0,39	0,00	0,83	62,50	0,00	33,35	1,73	100,00
72 Kota Tual	0,00	0,00	0,00	6,16	53,92	2,08	37,84	0,00	100,00
Maluku	2,78	0,69	0,62	0,73	67,95	0,22	25,51	1,49	100,00

Tabel 3.7.A

Persentase Penduduk Laki-Laki yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten /Kota	Tempat Berobat Jalan							
	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/ Bidan	Klinik/ Praktik Dokter Bersama	Puskesmas/ Pustu	UKBM	Praktik Pengobatan Tradisional/ Alternatif	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Maluku Tenggara Barat	11,75	0,00	18,68	5,64	59,71	3,05	6,82	0,00
02 Maluku Tenggara	6,80	2,65	5,64	3,46	76,86	5,81	0,00	0,00
03 Maluku Tengah	17,05	3,92	45,58	13,10	23,78	0,00	0,60	0,00
04 Buru	10,65	0,00	42,10	15,72	25,42	3,62	2,74	2,13
05 Kepulauan Aru	7,86	1,09	10,43	5,48	62,58	16,80	0,00	0,49
06 Seram Bagian Barat	7,41	0,00	24,70	2,59	58,97	2,22	4,07	0,91
07 Seram Bagian Timur	6,78	0,00	5,83	2,40	81,79	3,11	3,36	3,12
08 Maluku Barat Daya	5,43	0,00	0,00	3,00	92,62	0,00	0,00	1,94
09 Buru Selatan	7,33	0,00	16,76	2,80	71,42	0,00	4,42	0,00
71 Kota Ambon	9,37	4,86	22,39	8,43	54,93	0,00	1,08	0,00
72 Kota Tual	16,65	0,00	2,07	3,50	80,33	0,40	1,54	0,00
Maluku	10,23	1,98	22,06	7,16	56,27	2,67	1,91	0,70

Tabel 3.7.B

Persentase Penduduk Perempuan yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten /Kota	Tempat Berobat Jalan							
	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/ Bidan	Klinik/ Praktik Dokter Bersama	Puskesmas/ Pustu	UKBM	Praktik Pengobatan Tradisional/ Alternatif	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Maluku Tenggara Barat	3,97	0,00	18,64	1,92	67,22	7,40	5,74	0,84
02 Maluku Tenggara	6,33	2,69	2,59	2,84	78,70	6,85	0,00	0,00
03 Maluku Tengah	7,66	0,78	50,38	11,23	29,86	0,74	0,68	0,71
04 Buru	7,21	0,07	49,18	6,10	32,49	3,53	0,00	1,42
05 Kepulauan Aru	5,19	0,61	15,16	4,12	63,20	14,89	0,00	0,53
06 Seram Bagian Barat	9,71	0,00	18,77	4,92	58,16	6,27	0,00	2,93
07 Seram Bagian Timur	3,27	0,00	4,71	0,00	86,05	4,70	2,63	7,02
08 Maluku Barat Daya	2,92	1,14	0,00	4,68	94,19	0,00	0,00	0,72
09 Buru Selatan	11,50	0,00	11,52	0,00	75,13	0,00	1,85	0,00
71 Kota Ambon	3,31	8,24	17,30	8,27	58,92	0,00	3,96	0,00
72 Kota Tual	8,68	0,00	2,73	5,44	82,11	0,00	1,04	0,00
Maluku	5,68	2,61	19,59	5,73	61,95	3,24	1,82	1,30

Tabel 3.7.C

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten /Kota	Tempat Berobat Jalan							
	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/ Bidan	Klinik/ Praktik Dokter Bersama	Puskesmas/ Pustu	UKBM	Praktik Pengobatan Tradisional/ Alternatif	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Maluku Tenggara Barat	7,90	0,00	18,66	3,80	63,42	5,20	6,29	0,41
02 Maluku Tenggara	6,56	2,67	4,07	3,14	77,81	6,35	0,00	0,00
03 Maluku Tengah	12,62	2,44	47,84	12,22	26,65	0,35	0,64	0,33
04 Buru	9,03	0,03	45,44	11,18	28,76	3,57	1,45	1,79
05 Kepulauan Aru	6,59	0,86	12,69	4,83	62,87	15,89	0,00	0,51
06 Seram Bagian Barat	8,51	0,00	21,85	3,71	58,58	4,16	2,12	1,88
07 Seram Bagian Timur	4,87	0,00	5,22	1,09	84,11	3,98	2,96	5,24
08 Maluku Barat Daya	4,07	0,62	0,00	3,91	93,48	0,00	0,00	1,28
09 Buru Selatan	9,84	0,00	13,60	1,12	73,66	0,00	2,87	0,00
71 Kota Ambon	5,73	6,89	19,33	8,33	57,33	0,00	2,81	0,00
72 Kota Tual	11,89	0,00	2,46	4,66	81,39	0,16	1,24	0,00
Maluku	7,83	2,31	20,75	6,41	59,27	2,97	1,87	1,02

Tabel 3.8

Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir yang Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	61,93	60,49	61,22
02 Maluku Tenggara	78,48	82,80	80,71
03 Maluku Tengah	13,12	15,91	14,43
04 Buru	16,94	6,85	12,18
05 Kepulauan Aru	57,71	66,49	61,90
06 Seram Bagian Barat	22,78	26,52	24,58
07 Seram Bagian Timur	45,79	46,03	45,92
08 Maluku Barat Daya	66,46	72,35	69,67
09 Buru Selatan	51,46	55,70	54,01
71 Kota Ambon	17,73	18,32	18,09
72 Kota Tual	87,71	86,62	87,06
Maluku	37,64	39,52	38,63

Tabel 3.9.A

Persentase Penduduk Laki-Laki yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Jaminan Kesehatan					
	BPJS Kesehatan PBI	BPJS Kesehatan Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	Tidak Menggunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Maluku Tenggara Barat	52,14	4,53	5,26	0,00	0,00	38,07
02 Maluku Tenggara	41,36	14,68	22,43	0,00	0,00	21,52
03 Maluku Tengah	8,18	4,94	0,00	0,00	0,00	86,88
04 Buru	16,40	0,00	0,00	0,54	0,00	83,06
05 Kepulauan Aru	30,72	4,68	22,31	0,00	0,00	42,29
06 Seram Bagian Barat	13,20	7,70	1,88	0,00	0,00	77,22
07 Seram Bagian Timur	12,09	6,17	27,53	0,00	0,00	54,21
08 Maluku Barat Daya	34,18	5,45	32,80	0,00	0,00	33,54
09 Buru Selatan	37,91	4,85	6,81	0,00	1,89	48,54
71 Kota Ambon	7,60	10,13	0,00	0,00	0,00	82,27
72 Kota Tual	51,54	7,91	28,25	0,00	0,00	12,29
Maluku	20,99	7,10	9,77	0,04	0,03	62,36

Tabel 3.9.B

Persentase Penduduk Perempuan yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Jaminan Kesehatan					
	BPJS Kesehatan PBI	BPJS Kesehatan Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	Tidak Menggunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Maluku Tenggara Barat	48,70	4,56	7,23	0,00	0,00	39,51
02 Maluku Tenggara	40,50	20,40	21,91	0,00	0,00	17,20
03 Maluku Tengah	5,86	10,04	0,00	0,00	0,00	84,09
04 Buru	4,16	2,70	0,00	0,00	0,00	93,15
05 Kepulauan Aru	35,21	9,61	19,66	0,00	2,02	33,51
06 Seram Bagian Barat	18,87	7,65	0,00	0,00	0,00	73,48
07 Seram Bagian Timur	13,24	10,78	22,01	0,00	0,00	53,97
08 Maluku Barat Daya	38,76	2,30	36,55	0,00	0,00	27,65
09 Buru Selatan	45,20	7,41	3,09	0,00	0,00	44,30
71 Kota Ambon	9,89	8,43	0,00	0,00	0,00	81,68
72 Kota Tual	60,22	3,84	22,56	0,00	0,00	13,38
Maluku	21,75	8,91	9,03	0,00	0,10	60,48

Tabel 3.9.C

Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Jaminan Kesehatan					
	BPJS Kesehatan PBI	BPJS Kesehatan Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	Tidak Menggunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Maluku Tenggara Barat	50,44	4,54	6,24	0,00	0,00	38,78
02 Maluku Tenggara	40,92	17,63	22,16	0,00	0,00	19,29
03 Maluku Tengah	7,09	7,35	0,00	0,00	0,00	85,57
04 Buru	10,62	1,27	0,00	0,28	0,00	87,82
05 Kepulauan Aru	32,86	7,03	21,04	0,00	0,96	38,10
06 Seram Bagian Barat	15,92	7,68	0,98	0,00	0,00	75,42
07 Seram Bagian Timur	12,72	8,68	24,53	0,00	0,00	54,08
08 Maluku Barat Daya	36,67	3,74	34,84	0,00	0,00	30,33
09 Buru Selatan	42,30	6,39	4,57	0,00	0,75	45,99
71 Kota Ambon	8,98	9,11	0,00	0,00	0,00	81,91
72 Kota Tual	56,72	5,48	24,86	0,00	0,00	12,94
Maluku	21,39	8,06	9,38	0,02	0,07	61,37

Tabel 3.10

Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	1,45	2,68	2,06
02 Maluku Tenggara	3,88	4,11	4,00
03 Maluku Tengah	2,09	2,14	2,12
04 Buru	2,42	1,36	1,90
05 Kepulauan Aru	1,34	1,78	1,55
06 Seram Bagian Barat	1,71	2,00	1,85
07 Seram Bagian Timur	1,30	2,43	1,85
08 Maluku Barat Daya	1,81	1,14	1,47
09 Buru Selatan	0,69	1,49	1,07
71 Kota Ambon	3,47	5,53	4,50
72 Kota Tual	3,60	6,48	5,05
Maluku	2,40	3,22	2,81

Tabel 3.11.A

Persentase Penduduk Laki-Laki yang Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten /Kota	Tempat Rawat Inap						
	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/ Bidan	Klinik/ Praktik Dokter Bersama	Puskesmas/ Pustu	Praktik/ Pengobatan Tradisional/ Alternatif	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Maluku Tenggara Barat	81,86	5,41	0,00	0,00	12,73	100,00	100,00
02 Maluku Tenggara	77,92	23,93	0,00	0,00	4,18	100,00	100,00
03 Maluku Tengah	78,89	16,91	0,00	0,00	5,57	100,00	100,00
04 Buru	82,84	3,87	0,00	5,69	7,60	100,00	100,00
05 Kepulauan Aru	84,80	4,56	0,00	0,00	10,64	100,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	77,61	15,98	0,00	0,00	6,41	100,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	48,57	3,66	0,00	0,00	47,76	100,00	100,00
09 Buru Selatan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
71 Kota Ambon	67,67	32,33	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
72 Kota Tual	81,31	15,30	0,00	0,00	3,39	100,00	100,00
Maluku	75,33	20,03	0,00	0,46	4,96	100,00	100,00

Tabel 3.11.B

Persentase Penduduk Perempuan yang Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten /Kota	Tempat Rawat Inap						
	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/ Bidan	Klinik/ Praktik Dokter Bersama	Puskesmas/ Pustu	Praktik/ Pengobatan Tradisional/ Alternatif	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Maluku Tenggara Barat	86,04	8,22	0,00	0,00	5,74	100,00	100,00
02 Maluku Tenggara	72,33	19,71	0,00	0,00	7,96	100,00	100,00
03 Maluku Tengah	78,02	9,75	0,00	0,00	12,23	100,00	100,00
04 Buru	97,66	2,34	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
05 Kepulauan Aru	94,92	0,00	0,00	0,00	5,08	100,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	76,79	8,54	0,00	0,00	20,79	100,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	86,29	0,00	0,00	0,00	13,71	100,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	24,29	17,45	0,00	0,00	58,26	100,00	100,00
09 Buru Selatan	71,23	7,57	0,00	0,00	21,20	100,00	100,00
71 Kota Ambon	41,78	55,18	1,04	2,01	0,00	100,00	100,00
72 Kota Tual	91,28	6,35	0,00	0,00	2,37	100,00	100,00
Maluku	63,42	29,55	0,47	0,90	6,03	100,00	100,00

Tabel 3.11.C

Persentase Penduduk yang Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Tempat Rawat Inap						
	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/ Bidan	Klinik/ Praktik Dokter Bersama	Puskesmas/ Pustu	Praktik/ Pengobatan Tradisional/ Alternatif	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Maluku Tenggara Barat	84,56	7,23	0,00	0,00	8,21	100,00	100,00
02 Maluku Tenggara	75,00	21,72	0,00	0,00	6,16	100,00	100,00
03 Maluku Tengah	78,45	13,32	0,00	0,00	8,91	100,00	100,00
04 Buru	87,99	3,34	0,00	3,71	4,96	100,00	100,00
05 Kepulauan Aru	90,39	2,04	0,00	0,00	7,57	100,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	77,17	12,03	0,00	0,00	14,04	100,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	91,19	0,00	0,00	0,00	8,81	100,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	39,28	8,94	0,00	0,00	51,78	100,00	100,00
09 Buru Selatan	80,66	5,09	0,00	0,00	14,25	100,00	100,00
71 Kota Ambon	51,73	46,40	0,64	1,23	0,00	100,00	100,00
72 Kota Tual	87,77	9,50	0,00	0,00	2,73	100,00	100,00
Maluku	68,55	25,45	0,26	0,71	5,57	100,00	100,00

Tabel 3.12

Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	87,27	69,38	75,69
02 Maluku Tenggara	78,17	85,92	82,23
03 Maluku Tengah	45,19	54,44	49,82
04 Buru	60,42	66,30	62,46
05 Kepulauan Aru	72,68	68,76	70,52
06 Seram Bagian Barat	68,38	72,78	70,72
07 Seram Bagian Timur	63,51	63,42	63,45
08 Maluku Barat Daya	93,41	74,22	86,07
09 Buru Selatan	41,43	52,88	49,12
71 Kota Ambon	53,75	41,27	46,07
72 Kota Tual	82,04	85,99	84,60
Maluku	60,93	56,89	58,63

Tabel 3.13.A

Persentase Penduduk Laki-Laki yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Jumlah Hari Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Hari Rawat Inap				Jumlah
	≤ 3	4 – 6	7 – 29	≥ 30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	29,76	34,21	36,03	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	17,57	27,98	54,45	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	32,13	24,26	35,24	8,37	100,00
04 Buru	36,30	24,96	38,74	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	42,71	11,96	31,25	14,07	100,00
06 Seram Bagian Barat	35,56	21,40	38,10	4,94	100,00
07 Seram Bagian Timur	20,09	38,61	39,47	1,83	100,00
08 Maluku Barat Daya	45,55	17,18	29,46	7,81	100,00
09 Buru Selatan	13,28	19,33	67,39	0,00	100,00
71 Kota Ambon	48,44	17,51	34,05	0,00	100,00
72 Kota Tual	38,25	31,37	30,38	0,00	100,00
Maluku	37,87	22,61	36,89	2,63	100,00

Tabel 3.13.B

Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Jumlah Hari Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Hari Rawat Inap				Jumlah
	≤ 3	4 – 6	7 – 29	≥ 30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	48,18	14,33	29,64	7,85	100,00
02 Maluku Tenggara	31,48	44,70	23,82	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	50,57	30,14	19,29	0,00	100,00
04 Buru	53,40	31,46	15,14	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	48,38	13,75	37,87	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	26,45	22,82	47,07	3,67	100,00
07 Seram Bagian Timur	56,54	16,99	26,47	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	42,62	19,31	38,07	0,00	100,00
09 Buru Selatan	77,91	0,00	16,67	5,42	100,00
71 Kota Ambon	58,82	14,14	27,04	0,00	100,00
72 Kota Tual	46,06	31,10	22,85	0,00	100,00
Maluku	51,56	21,14	26,58	0,72	100,00

Tabel 3.13.C

Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Jumlah Hari Rawat Inap di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Hari Rawat Inap				Jumlah
	≤ 3	4 – 6	7 – 29	≥ 30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	41,69	21,34	31,89	5,08	100,00
02 Maluku Tenggara	24,85	36,73	38,42	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	41,37	27,21	27,25	4,18	100,00
04 Buru	42,24	27,22	30,55	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	45,84	12,95	34,91	6,30	100,00
06 Seram Bagian Barat	30,72	22,15	42,86	4,27	100,00
07 Seram Bagian Timur	43,52	24,72	31,11	0,65	100,00
08 Maluku Barat Daya	44,43	18,00	32,75	4,82	100,00
09 Buru Selatan	56,71	6,34	33,31	3,64	100,00
71 Kota Ambon	54,83	15,43	29,73	0,00	100,00
72 Kota Tual	43,31	31,19	25,50	0,00	100,00
Maluku	45,66	21,77	31,03	1,54	100,00

BAB IV

PENDIDIKAN

<https://id.gutenberg.org>

4.1 Konsep dan Definisi

Dalam publikasi ini digunakan konsep dan definisi sebagai berikut:

- 4 **Dapat membaca dan menulis** didefinisikan sebagai dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf latin/alfabet (a-z), huruf arab/hijaiyah, atau huruf lainnya (contoh huruf jawa, kanji, dll).
- 5 **Angka Melek Huruf** didefinisikan sebagai proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya terhadap penduduk berusia 15 tahun ke atas.
- 6 **Angka Buta Huruf** didefinisikan sebagai proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang tidak dapat membaca dan menulis.
- 7 **Tidak/belum pernah bersekolah** didefinisikan sebagai anggota ruta berumur lima tahun ke atas yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
- 8 **Pendidikan formal** didefinisikan sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan Perguruan Tinggi.
- 9 **Pendidikan nonformal** didefinisikan sebagai jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, B, C), serta pendidikan lainnya untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- 10 **Masih bersekolah** didefinisikan sebagai anggota ruta berumur lima tahun ke atas yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C). Termasuk bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.
- 11 **Tidak bersekolah lagi** didefinisikan sebagai anggota ruta berumur lima tahun ke atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di

jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.

- 12 Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** didefinisikan sebagai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, ditandai dengan sertifikat/ijazah.
- 13 Tamat sekolah** didefinisikan sebagai menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan formal dan nonformal (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah, Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah.
- 14 Angka Partisipasi Sekolah (APS)** didefinisikan sebagai proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
- 15 Angka Partisipasi Murni (APM)** didefinisikan sebagai proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
- 16 Pendidikan prasekolah** didefinisikan sebagai pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.

4.2 Ulasan Singkat

Mencerdaskan kehidupan bangsa secara tegas dan jelas ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia sebagai salah satu tujuan bernegara kita. Pendidikan merupakan salah satu cara utama dalam upaya untuk mencapai cita-cita tersebut. Sejak awal negara ini memikirkan kemerdekaannya, lembaga dan orang-orang terdidik selalu menjadi garda terdepan dan utama dalam merumuskan nasib bangsa Indonesia. Budi Utomo yang didirikan pada 1908 merupakan salah satu bukti pergerakan oleh para terdidik untuk memerdekakan bangsanya. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan para terdidik belum selesai dan justru lebih relevan lagi, utamanya dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan budi pekerti, agar lebih banyak lagi orang yang mampu mengenyam dan menikmati pendidikan sehingga memiliki kemampuan untuk memperbaiki nasib diri dan bangsanya.

Pembangunan pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa. Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam proses pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan perlu terus diupayakan karena peranan pendidikan sangat strategis. Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Gambaran keadaan pendidikan di Provinsi Maluku akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator penting, yakni kemampuan baca tulis penduduk (Angka Melek Huruf), Tingkat Partisipasi Sekolah yang meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), serta Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Jenjang Pendidikan, dan Partisipasi Sekolah Anak Usia Pra-Sekolah. Indikator-indikator tersebut merupakan indikator pendidikan yang biasanya dipakai untuk mengukur hasil pembangunan di bidang pendidikan, misalnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

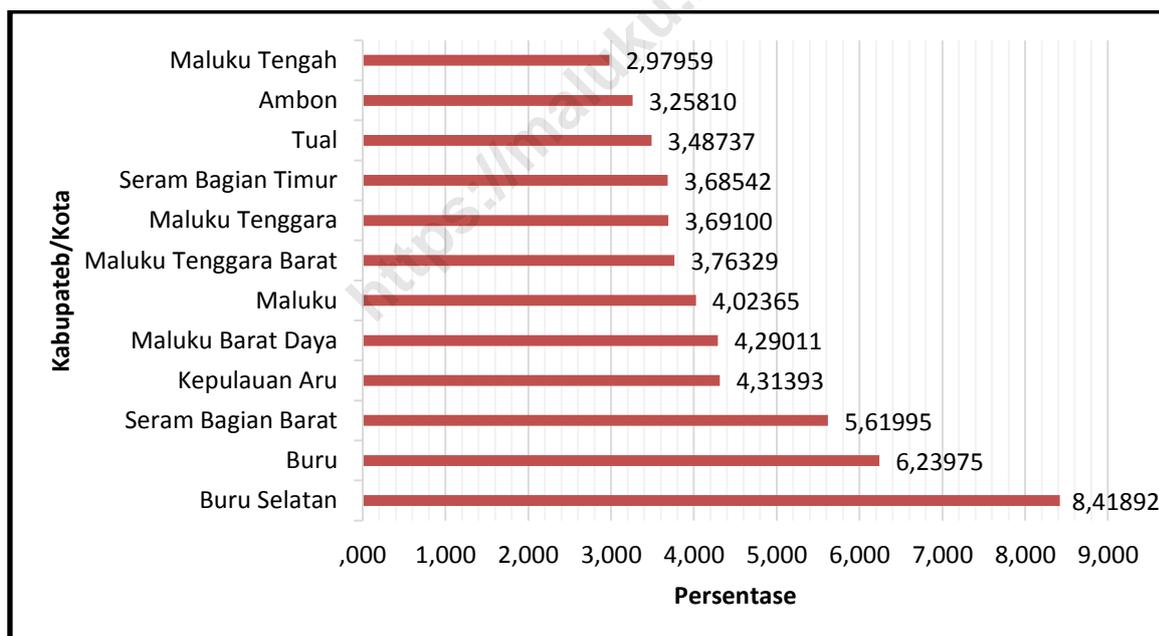
Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Kegiatan prasekolah meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), RA, BA, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak yang mempunyai program pengembangan anak. Susenas tahun 2018, menunjukkan bahwa persentase anak berumur 0—6 tahun yang pernah/masih mengikuti pendidikan pra sekolah di Provinsi Maluku mencapai 17,98 persen. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin persentase anak laki-laki berumur 0—6 tahun yang pernah/masih mengikuti pendidikan pra sekolah lebih tinggi (18,59 persen) dibandingkan anak perempuan (17,34 persen). Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual merupakan kabupaten/kota dengan catatan persentase tertinggi, masing-masing sebesar 30,72 persen dan 27,84 persen. Sementara itu, Kota Ambon memiliki persentase paling rendah, tercatat sebesar 12,03 persen. Sebagian besar (51,20 persen) anak berumur 0—6 tahun yang pernah/masih mengikuti pendidikan pra sekolah menempuh pendidikan pra sekolahnya di Taman Kanak-Kanak. Data

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.4.A hingga Tabel 4.4.C dan Tabel 4.5.A hingga Tabel 4.5.C.

Partisipasi sekolah penduduk disajikan berdasarkan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang tercatat tidak/belum pernah sekolah di Maluku sebesar 4,02 persen, persentase tertinggi di Kabupaten Buru Selatan (8,42 persen) dan terendah di Kabupaten Maluku Tengah yaitu sebesar 2,98 persen (Gambar 4.1). Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan berumur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki, yaitu 4,11 persen dibanding 3,94 persen (Tabel 4.6.A dan Tabel 4.6.B). Pada Tabel 4.6.C juga terlihat penduduk berumur 5 tahun ke atas yang masih bersekolah dan tidak bersekolah lagi, persentase penduduk yang masih bersekolah sebesar 34,04 persen dan yang tidak bersekolah lagi sebesar 61,93 persen.

Gambar 4.1
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, 2018



Sumber: Susenas Maret 2018, diolah.

Secara umum persentase penduduk berumur 7-24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah tercatat sebesar 0,22 persen, masih sekolah sebesar 78,10 persen, dan tidak bersekolah lagi sebesar 21,67 persen (Tabel 4.1). Bila dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan berumur 7-24 tahun yang masih bersekolah lebih besar dibanding penduduk laki-laki, yaitu 78,75 persen berbanding 77,48 persen. Demikian sebaliknya, persentase penduduk laki-laki berumur 7-24 tahun yang tidak

bersekolah lagi lebih tinggi dibanding penduduk perempuan yaitu masing-masing sebesar 22,25 persen dan 21,07 persen.

Partisipasi penduduk bersekolah menurut usia sekolah dari jenjang pendidikan SD sampai Universitas (7—24 tahun) secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.7.A hingga Tabel 4.7.C.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018

Jenis Kelamin	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah					Tidak Bersekolah Lagi	Total
		SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMA dan Sederajat	Diploma I s.d. Universitas	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laki – Laki	0,27	36,57	17,34	14,54	9,03	77,48	22,25	100,00
Perempuan	0,18	36,59	17,01	14,68	10,47	78,75	21,07	100,00
Laki-Laki + Perempuan	0,22	36,58	17,18	14,61	9,74	78,10	21,67	100,00

Sumber: Susenas Maret 2018, diolah.

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak tahun 2009, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

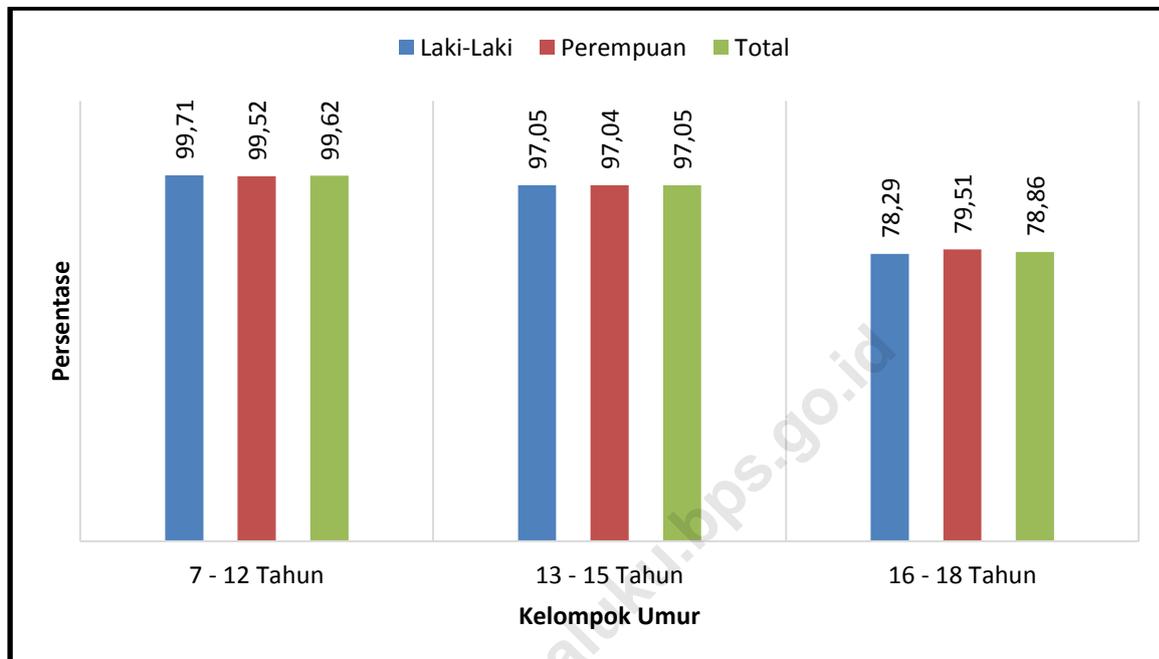
Umur penduduk dalam penghitungan APS tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama umur 7—12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13—15 tahun untuk tingkat pendidikan SLTP, dan kelompok ketiga umur 16—18 tahun untuk tingkat pendidikan SLTA. Namun, pada kenyataannya menunjukkan bahwa cukup banyak penduduk berumur 5—6 tahun telah memasuki pendidikan dasar, sehingga dalam publikasi ini ditampilkan pula APS untuk kelompok umur 5—6 tahun.

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa APS SD (umur 7-12 tahun) mendekati 100 persen. Artinya, hampir semua anak usia 7—12 tahun di Maluku sedang mengikuti pendidikan. Sementara pada jenjang pendidikan SMP (umur 13—15 tahun) baru mencapai 97,05 persen. Lain halnya pada jenjang pendidikan SMA (16—18 tahun), angka APS baru tercatat mencapai 78,86 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, terlihat tidak ada perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan. Hal ini patut diduga bahwa pandangan laki-laki lebih diprioritaskan untuk mendapatkan pendidikan sudah tidak relevan. Namun demikian, semakin tinggi kelompok umur akan semakin rendah APS, baik laki-laki maupun perempuan.

APS kelompok umur 5—6 tahun di Provinsi Maluku tercatat sebesar 37,94 persen. Artinya hampir 40 persen penduduk Maluku berusia 5—6 tahun sudah bersekolah pada jenjang pendidikan dasar. APS kelompok umur 5—6 tahun penduduk

perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 43,56 persen berbanding 32,42 persen. Data APS selengkapnya disajikan pada Tabel 4.9.A hingga Tabel 4.9.C.

Gambar 4.2
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun, 13 – 15 Tahun, dan 16 – 18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

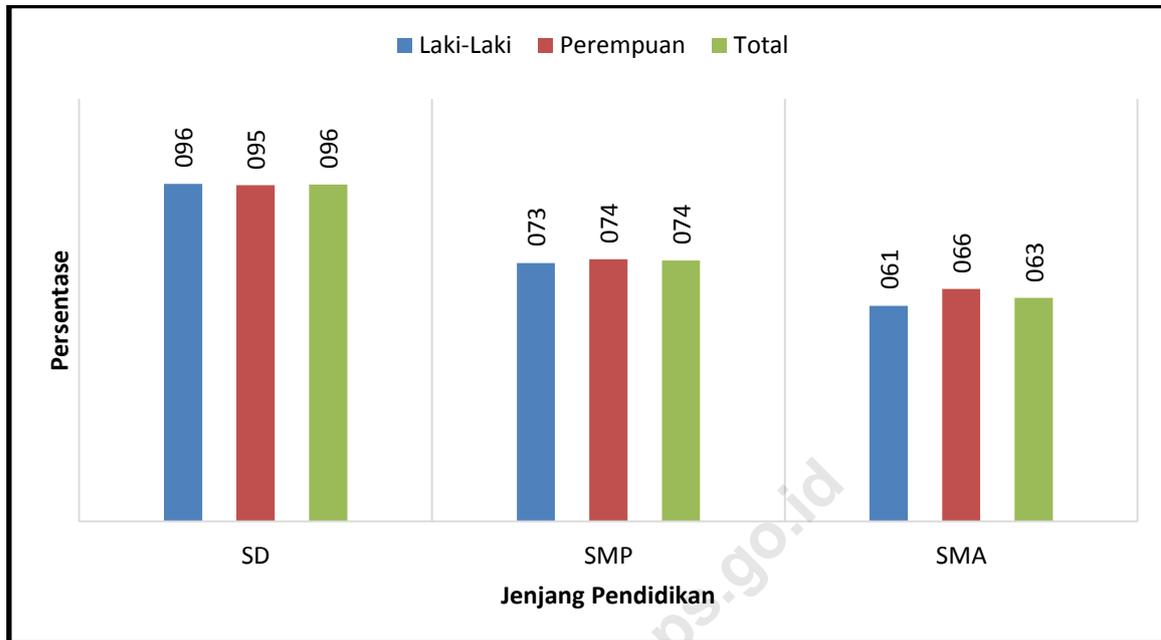


Sumber: Susenas Maret 2018, diolah.

Seperti halnya APS, Angka Partisipasi Murni (APM) juga disajikan pada ketiga jenis/jenjang pendidikan, yaitu pada jenjang SD, SMP, dan SMA.

Tidak jauh berbeda dengan APS, APM juga cenderung tercatat mengalami penurunan seiring tingginya tingkat pendidikan, seperti terlihat pada Gambar 4.4. Angka Partisipasi Murni ini menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Di samping itu, APM juga dapat digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Data APM selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.10.A hingga Tabel 4.10.C.

Gambar 4.3
Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan SD, SMP, dan SMA Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Maluku



Sumber: Susenas Maret 2018, diolah.

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki seseorang merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk suatu daerah maka akan semakin tinggi pula taraf intelektualitas daerah tersebut. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah tercatat sebesar 12,11 persen, tamat SD sederajat 22,29 persen, tamat SMP sederajat 19,24 persen, tamat SMA sederajat 34,08 persen, dan tamat Diploma I sampai dengan S3 sebesar 12,27 persen. Menurut jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang memiliki ijazah/STTB SD sederajat dan Tamat Diploma I sampai S3 lebih kecil dibandingkan perempuan. Sementara itu, persentase penduduk laki-laki yang memiliki ijazah/STTB SMP sederajat dan SMA sederajat lebih besar dibandingkan perempuan.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Jenis Kelamin	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki						Jumlah
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	D-I/ D-II/ D-III	Diploma IV/S1/S2/S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laki-Laki	11,28	21,24	19,63	37,13	2,20	8,53	100,00
Perempuan	12,94	23,34	18,86	31,02	3,31	10,53	100,00
Laki-Laki + Perempuan	12,11	22,29	19,24	34,08	2,75	9,52	100,00

Sumber: Susenas Maret 2018, diolah.

Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kabupaten/kota yang memiliki ijazah/STTB tertinggi SMA sederajat ke atas umumnya lebih besar dari 40 persen, kecuali Kabupaten Maluku Barat Daya (26,36 persen). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.11.A hingga Tabel 4.11.C.

<https://maluku.bps.go.id>

Tabel 4.3.A

Persentase Anak Laki-Laki Berumur 0 – 6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah			Jumlah
	Masih/Pernah Mengikuti Pra Sekolah TA 2017/2018	Pernah Mengikuti PraSekolah TA 2016/2017 dan Sebelumnya	Tidak/Belum Pernah Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Maluku Tenggara Barat	25,06	7,80	67,14	100,00
02 Maluku Tenggara	31,27	8,23	60,50	100,00
03 Maluku Tengah	14,61	3,92	81,46	100,00
04 Buru	14,36	4,91	80,73	100,00
05 Kepulauan Aru	19,94	1,51	78,54	100,00
06 Seram Bagian Barat	17,60	1,24	81,15	100,00
07 Seram Bagian Timur	13,23	0,99	85,78	100,00
08 Maluku Barat Daya	27,57	5,71	66,71	100,00
09 Buru Selatan	31,31	7,06	61,63	100,00
71 Kota Ambon	14,57	7,59	77,84	100,00
72 Kota Tual	23,92	13,77	62,31	100,00
Maluku	18,59	5,33	76,08	100,00

Tabel 4.3.B

Persentase Anak Perempuan Berumur 0 – 6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah			Jumlah
	Masih/Pernah Mengikuti Pra Sekolah TA 2016/2017	Pernah Mengikuti PraSekolah TA 2015/2016 dan Sebelumnya	Tidak/Belum Pernah Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	24,38	4,32	71,29	100,00
02 Maluku Tenggara	30,13	8,72	61,15	100,00
03 Maluku Tengah	15,32	10,31	74,37	100,00
04 Buru	16,80	3,69	79,51	100,00
05 Kepulauan Aru	17,03	5,84	77,13	100,00
06 Seram Bagian Barat	17,10	8,31	74,59	100,00
07 Seram Bagian Timur	14,05	8,15	77,80	100,00
08 Maluku Barat Daya	24,08	11,21	64,71	100,00
09 Buru Selatan	20,88	7,97	71,16	100,00
71 Kota Ambon	9,35	4,03	86,61	100,00
72 Kota Tual	32,08	4,32	63,60	100,00
Maluku	17,34	7,03	75,62	100,00

Tabel 4.3.C

Persentase Anak Berumur 0 – 6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah			Jumlah
	Masih/Pernah Mengikuti Pra Sekolah TA 2016/2017	Pernah Mengikuti PraSekolah TA 2015/2016 dan Sebelumnya	Tidak/Belum Pernah Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Maluku Tenggara Barat	24,74	6,13	69,13	100,00
02 Maluku Tenggara	30,72	8,46	60,82	100,00
03 Maluku Tengah	14,98	7,19	77,83	100,00
04 Buru	15,55	4,32	80,14	100,00
05 Kepulauan Aru	18,59	3,53	77,88	100,00
06 Seram Bagian Barat	17,35	4,82	77,83	100,00
07 Seram Bagian Timur	13,60	4,21	82,19	100,00
08 Maluku Barat Daya	25,80	8,51	65,69	100,00
09 Buru Selatan	26,33	7,49	66,17	100,00
71 Kota Ambon	12,03	5,86	82,11	100,00
72 Kota Tual	27,84	9,22	62,93	100,00
Maluku	17,98	6,16	75,86	100,00

Tabel 4.4.A

Persentase Anak Laki-Laki Berumur 0 – 6 Tahun Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Pendidikan Pra Sekolah					Jumlah
	Taman Kanak-Kanak	Bustanul Athfal/ Raudatul Athfal	PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/ Taman Posyandu, dll	Kelompok Bermain	Taman Penitipan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Maluku Tenggara Barat	62,82	0,00	36,11	1,07	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	15,61	1,44	82,95	0,00	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	52,34	0,00	47,66	0,00	0,00	100,00
04 Buru	48,65	11,24	32,22	5,01	2,89	100,00
05 Kepulauan Aru	47,32	0,00	50,53	2,15	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	63,78	0,00	31,93	4,29	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	57,44	0,00	42,56	0,00	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	53,21	2,11	44,67	0,00	0,00	100,00
09 Buru Selatan	54,11	0,00	45,89	0,00	0,00	100,00
71 Kota Ambon	60,08	0,00	36,02	3,90	0,00	100,00
72 Kota Tual	31,14	0,00	66,36	2,50	0,00	100,00
Maluku	50,41	1,03	46,50	1,87	0,19	100,00

Tabel 4.4.B

Persentase Anak Perempuan Berumur 0 – 6 Tahun Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Pendidikan Pra Sekolah					Jumlah
	Taman Kanak-Kanak	Bustanul Athfal/ Raudatul Athfal	PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/ Taman Posyandu, dll	Kelompok Bermain	Taman Penitipan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Maluku Tenggara Barat	68,69	0,00	31,31	0,00	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	17,53	1,54	79,17	1,75	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	62,15	3,14	34,71	0,00	0,00	100,00
04 Buru	56,29	0,00	43,71	0,00	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	41,18	0,00	58,37	0,46	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	57,18	3,68	39,13	0,00	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	59,74	0,00	40,26	0,00	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	41,53	0,00	56,29	2,18	0,00	100,00
09 Buru Selatan	57,09	0,00	42,91	0,00	0,00	100,00
71 Kota Ambon	60,83	0,00	39,17	0,00	0,00	100,00
72 Kota Tual	26,69	0,00	68,67	4,64	0,00	100,00
Maluku	52,01	1,32	46,02	0,66	0,00	100,00

Tabel 4.4.C

Persentase Anak Berumur 0 – 6 Tahun Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Pendidikan Pra Sekolah					Jumlah
	Taman Kanak-Kanak	Bustanul Athfal/ Raudatul Athfal	PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/ Taman Posyandu, dll	Kelompok Bermain	Taman Penitipan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Maluku Tenggara Barat	65,43	0,00	33,97	0,59	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	16,53	1,49	81,15	0,84	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	58,15	1,86	39,99	0,00	0,00	100,00
04 Buru	52,48	5,60	37,98	2,50	1,44	100,00
05 Kepulauan Aru	44,36	0,00	54,31	1,33	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	59,95	2,14	36,11	1,80	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	58,73	0,00	41,27	0,00	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	47,09	1,01	50,76	1,14	0,00	100,00
09 Buru Selatan	55,32	0,00	44,68	0,00	0,00	100,00
71 Kota Ambon	60,35	0,00	37,17	2,48	0,00	100,00
72 Kota Tual	29,04	0,00	67,45	3,51	0,00	100,00
Maluku	51,20	1,17	46,26	1,27	0,10	100,00

Tabel 4.5.A

Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten /Kota	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah					Tidak Bersekolah Lagi	Total
		SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMA dan Sederajat	Diploma I s.d. Universitas	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Maluku Tenggara Barat	4,23	18,17	6,13	3,89	1,49	29,68	66,09	100,00
02 Maluku Tenggara	3,15	18,47	6,22	6,96	1,06	32,72	64,14	100,00
03 Maluku Tengah	3,17	16,72	8,46	5,45	3,96	34,59	62,23	100,00
04 Buru	5,75	18,79	4,95	6,36	2,39	32,49	61,76	100,00
05 Kepulauan Aru	4,46	16,71	5,26	6,08	1,37	29,41	66,13	100,00
06 Seram Bagian Barat	5,23	18,10	6,95	6,32	2,58	33,95	60,81	100,00
07 Seram Bagian Timur	3,53	17,75	7,59	5,99	2,15	33,48	62,99	100,00
08 Maluku Barat Daya	4,02	20,12	6,81	4,64	0,51	32,08	63,90	100,00
09 Buru Selatan	8,91	20,88	8,41	6,86	1,04	37,19	53,89	100,00
71 Kota Ambon	3,69	12,63	7,36	6,08	9,02	35,09	61,22	100,00
72 Kota Tual	3,29	18,60	6,18	8,13	3,19	36,10	60,61	100,00
Maluku	4,11	16,55	7,09	5,95	4,20	33,79	62,10	100,00

Tabel 4.5.B

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten /Kota	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah					Tidak Bersekolah Lagi	Total
		SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMA dan Sederajat	Diploma I s.d. Universitas	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Maluku Tenggara Barat	3,29	17,14	5,93	4,09	1,18	28,34	68,37	100,00
02 Maluku Tenggara	4,21	17,35	5,78	5,23	1,85	30,21	65,58	100,00
03 Maluku Tengah	2,78	15,70	7,39	5,96	5,13	34,19	63,03	100,00
04 Buru	6,76	16,77	6,72	6,66	2,74	32,89	60,35	100,00
05 Kepulauan Aru	4,16	20,84	6,87	4,68	1,73	34,13	61,71	100,00
06 Seram Bagian Barat	6,02	18,11	7,05	5,45	2,24	32,85	61,13	100,00
07 Seram Bagian Timur	3,85	22,08	5,84	5,65	2,24	35,82	60,34	100,00
08 Maluku Barat Daya	4,57	19,37	6,05	3,86	0,63	29,90	65,53	100,00
09 Buru Selatan	7,89	22,27	7,94	6,18	1,03	37,42	54,69	100,00
71 Kota Ambon	2,83	13,44	6,75	6,19	11,13	37,52	59,65	100,00
72 Kota Tual	3,68	16,39	6,41	8,80	2,60	34,20	62,12	100,00
Maluku	3,94	16,65	6,75	5,83	5,07	34,30	61,76	100,00

Tabel 4.5.C

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten /Kota	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah					Tidak Bersekolah Lagi	Total
		SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMA dan Sederajat	Diploma I s.d. Universitas	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Maluku Tenggara Barat	3,76	17,65	6,03	3,99	1,33	29,01	67,23	100,00
02 Maluku Tenggara	3,69	17,89	5,99	6,08	1,47	31,43	64,88	100,00
03 Maluku Tengah	2,98	16,22	7,93	5,70	4,54	34,39	62,63	100,00
04 Buru	6,24	17,81	5,81	6,51	2,56	32,68	61,08	100,00
05 Kepulauan Aru	4,31	18,72	6,05	5,40	1,54	31,71	63,98	100,00
06 Seram Bagian Barat	5,62	18,11	7,00	5,89	2,41	33,41	60,97	100,00
07 Seram Bagian Timur	3,69	19,91	6,72	5,82	2,20	34,65	61,67	100,00
08 Maluku Barat Daya	4,29	19,75	6,43	4,25	0,57	31,00	64,71	100,00
09 Buru Selatan	8,42	21,55	8,18	6,53	1,04	37,30	54,28	100,00
71 Kota Ambon	3,26	13,04	7,05	6,14	10,08	36,31	60,43	100,00
72 Kota Tual	3,49	17,48	6,30	8,47	2,89	35,13	61,38	100,00
Maluku	4,02	16,60	6,92	5,89	4,63	34,04	61,93	100,00

Tabel 4.6.A

Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 7 – 24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten /Kota	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah					Tidak Bersekolah Lagi	Total
		SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMA dan Sederajat	Diploma I s.d. Universitas	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Maluku Tenggara Barat	0,52	41,22	15,69	9,96	3,81	70,69	28,79	100,00
02 Maluku Tenggara	0,00	38,83	15,05	16,84	2,54	73,26	26,74	100,00
03 Maluku Tengah	0,00	36,45	20,35	13,10	8,58	78,48	21,52	100,00
04 Buru	0,20	42,40	12,13	15,57	5,86	75,97	23,83	100,00
05 Kepulauan Aru	0,46	37,88	13,14	15,18	2,36	68,56	30,98	100,00
06 Seram Bagian Barat	0,00	40,84	16,44	14,94	6,11	78,33	21,67	100,00
07 Seram Bagian Timur	0,00	38,19	17,86	14,10	4,84	74,99	25,01	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,00	47,60	17,64	12,02	0,99	78,25	21,75	100,00
09 Buru Selatan	0,94	40,20	18,12	14,79	2,25	75,36	23,70	100,00
71 Kota Ambon	0,62	28,59	18,75	15,50	19,24	82,08	17,30	100,00
72 Kota Tual	0,00	36,84	14,23	18,73	7,34	77,13	22,87	100,00
Maluku	0,27	36,57	17,34	14,54	9,03	77,48	22,25	100,00

Tabel 4.6.B

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 7 – 24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten /Kota	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah					Tidak Bersekolah Lagi	Total
		SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMA dan Sederajat	Diploma I s.d. Universitas	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Maluku Tenggara Barat	0,33	40,92	15,48	10,67	3,07	70,12	29,55	100,00
02 Maluku Tenggara	0,54	41,24	15,39	13,95	4,92	75,51	23,95	100,00
03 Maluku Tengah	0,00	33,44	19,83	16,00	11,92	81,18	18,82	100,00
04 Buru	0,00	37,77	16,25	16,11	6,62	76,75	23,25	100,00
05 Kepulauan Aru	0,39	44,20	16,14	10,99	3,67	75,00	24,60	100,00
06 Seram Bagian Barat	0,10	39,76	17,97	13,89	5,12	76,74	23,16	100,00
07 Seram Bagian Timur	0,18	45,29	13,43	13,00	4,66	76,38	23,44	100,00
08 Maluku Barat Daya	1,45	47,59	16,85	10,74	1,75	76,93	21,62	100,00
09 Buru Selatan	0,93	45,39	18,14	14,11	1,98	79,62	19,46	100,00
71 Kota Ambon	0,00	29,40	16,70	15,33	20,95	82,38	17,62	100,00
72 Kota Tual	0,00	35,09	15,51	21,30	6,09	77,99	22,01	100,00
Maluku	0,18	36,59	17,01	14,68	10,47	78,75	21,07	100,00

Tabel 4.6.C

Persentase Penduduk Berumur 7 – 24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten /Kota	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah					Tidak Bersekolah Lagi	Total
		SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMA dan Sederajat	Diploma I s.d. Universitas	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01 Maluku Tenggara Barat	0,43	41,07	15,59	10,31	3,44	70,41	29,17	100,00
02 Maluku Tenggara	0,27	40,01	15,22	15,43	3,70	74,36	25,38	100,00
03 Maluku Tengah	0,00	35,04	20,10	14,46	10,14	79,74	20,26	100,00
04 Buru	0,10	40,14	14,15	15,84	6,23	76,35	23,55	100,00
05 Kepulauan Aru	0,42	41,05	14,64	13,08	3,02	71,80	27,78	100,00
06 Seram Bagian Barat	0,05	40,33	17,16	14,45	5,64	77,58	22,37	100,00
07 Seram Bagian Timur	0,09	41,77	15,62	13,55	4,75	75,69	24,22	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,69	47,60	17,26	11,41	1,35	77,62	21,69	100,00
09 Buru Selatan	0,93	42,63	18,13	14,47	2,12	77,35	21,71	100,00
71 Kota Ambon	0,30	29,00	17,71	15,41	20,11	82,23	17,46	100,00
72 Kota Tual	0,00	35,97	14,86	20,00	6,72	77,56	22,44	100,00
Maluku	0,22	36,58	17,18	14,61	9,74	78,10	21,67	100,00

Tabel 4.7.A

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Laki-Laki Berumur 5 – 24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan			
	5 – 6	7 – 12	13 – 15	16 – 18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Maluku Tenggara Barat	33,94	99,65	91,02	63,98
02 Maluku Tenggara	43,45	100,00	98,98	76,78
03 Maluku Tengah	36,41	100,00	100,00	80,80
04 Buru	30,15	99,35	95,24	70,66
05 Kepulauan Aru	29,57	100,00	87,58	65,70
06 Seram Bagian Barat	16,12	99,47	97,35	84,83
07 Seram Bagian Timur	33,12	99,40	98,67	80,85
08 Maluku Barat Daya	32,21	100,00	88,63	77,05
09 Buru Selatan	34,85	97,93	98,94	77,85
71 Kota Ambon	31,62	100,00	98,73	80,34
72 Kota Tual	42,92	99,49	97,27	85,20
Maluku	32,42	99,71	97,05	78,29

Tabel 4.7.B

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Perempuan Berumur 5 – 24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan			
	5 – 6	7 – 12	13 – 15	16 – 18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Maluku Tenggara Barat	32,06	100,00	88,56	61,09
02 Maluku Tenggara	40,02	100,00	95,24	71,68
03 Maluku Tengah	56,89	99,02	98,00	85,08
04 Buru	25,12	100,00	97,24	69,21
05 Kepulauan Aru	35,63	100,00	96,31	76,88
06 Seram Bagian Barat	39,65	100,00	98,71	81,04
07 Seram Bagian Timur	50,42	100,00	97,08	85,23
08 Maluku Barat Daya	42,62	98,54	95,88	59,89
09 Buru Selatan	57,06	98,90	92,76	77,94
71 Kota Ambon	40,77	99,21	100,00	84,24
72 Kota Tual	35,99	100,00	93,29	85,63
Maluku	43,56	99,52	97,04	79,51

Tabel 4.7.C

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 5 – 24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan			
	5 – 6	7 – 12	13 – 15	16 – 18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Maluku Tenggara Barat	33,14	99,83	89,80	62,52
02 Maluku Tenggara	41,84	100,00	97,25	74,23
03 Maluku Tengah	48,02	99,55	99,08	82,83
04 Buru	27,79	99,66	96,31	69,96
05 Kepulauan Aru	32,64	100,00	91,06	70,66
06 Seram Bagian Barat	28,86	99,73	97,96	83,06
07 Seram Bagian Timur	41,89	99,73	97,88	82,78
08 Maluku Barat Daya	37,30	99,30	92,05	69,05
09 Buru Selatan	43,31	98,41	95,71	77,89
71 Kota Ambon	35,85	99,60	99,38	82,12
72 Kota Tual	39,65	99,74	95,12	85,41
Maluku	37,94	99,62	97,05	78,86

Tabel 4.8.A

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Laki-Laki Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	99,65	71,13	48,88
02 Maluku Tenggara	100,00	71,63	72,89
03 Maluku Tengah	96,36	75,29	48,92
04 Buru	97,82	67,42	66,94
05 Kepulauan Aru	100,00	52,46	48,53
06 Seram Bagian Barat	99,47	69,11	71,38
07 Seram Bagian Timur	99,40	79,12	59,69
08 Maluku Barat Daya	100,00	72,98	57,06
09 Buru Selatan	97,93	84,46	64,59
71 Kota Ambon	87,03	78,67	68,65
72 Kota Tual	99,49	71,48	66,15
Maluku	95,93	73,42	61,26

Tabel 4.8.B

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	100,00	73,90	51,41
02 Maluku Tenggara	100,00	69,87	54,11
03 Maluku Tengah	93,18	86,02	70,65
04 Buru	98,28	75,23	57,75
05 Kepulauan Aru	96,74	66,28	41,18
06 Seram Bagian Barat	97,49	78,41	65,82
07 Seram Bagian Timur	100,00	64,75	66,91
08 Maluku Barat Daya	98,54	77,20	47,93
09 Buru Selatan	98,90	70,26	69,75
71 Kota Ambon	89,07	71,76	76,45
72 Kota Tual	100,00	67,98	70,39
Maluku	95,49	74,79	66,00

Tabel 4.8.C

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	99,83	72,51	50,16
02 Maluku Tenggara	100,00	70,81	63,52
03 Maluku Tengah	94,88	80,21	59,26
04 Buru	98,03	71,60	62,48
05 Kepulauan Aru	98,15	57,97	45,27
06 Seram Bagian Barat	98,52	73,25	68,78
07 Seram Bagian Timur	99,73	71,98	62,87
08 Maluku Barat Daya	99,30	74,97	52,80
09 Buru Selatan	98,41	77,04	66,73
71 Kota Ambon	88,05	75,16	72,22
72 Kota Tual	99,74	69,59	68,18
Maluku	95,71	74,08	63,48

Tabel 4.9.A

Persentase Penduduk Laki-Laki Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki						Jumlah
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	D-I/ D-II/ D-III	Diploma IV/ S1/S2/S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Maluku Tenggara Barat	6,20	27,81	21,45	35,74	1,10	7,71	100,00
02 Maluku Tenggara	6,16	22,11	24,46	35,48	3,47	8,32	100,00
03 Maluku Tengah	12,62	25,72	19,40	33,78	1,91	6,57	100,00
04 Buru	13,86	23,13	21,86	32,05	1,29	7,82	100,00
05 Kepulauan Aru	11,42	33,05	19,86	27,27	1,12	7,30	100,00
06 Seram Bagian Barat	12,74	21,05	22,35	37,16	1,02	5,67	100,00
07 Seram Bagian Timur	14,19	27,59	22,36	25,25	2,49	8,13	100,00
08 Maluku Barat Daya	14,86	36,52	20,88	23,34	1,52	2,88	100,00
09 Buru Selatan	17,91	26,60	21,58	26,55	1,35	6,02	100,00
71 Kota Ambon	9,98	9,98	15,10	49,74	3,30	11,90	100,00
72 Kota Tual	5,39	14,79	24,90	36,63	3,05	15,24	100,00
Maluku	11,28	21,24	19,63	37,13	2,20	8,53	100,00

Tabel 4.9.B

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki						Jumlah
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	D-I/ D-II/ D-III	Diploma IV/ S1/S2/S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Maluku Tenggara Barat	6,11	28,40	22,46	31,96	2,54	8,52	100,00
02 Maluku Tenggara	10,96	24,75	20,65	28,89	3,71	11,05	100,00
03 Maluku Tengah	12,76	26,93	20,55	27,71	3,46	8,59	100,00
04 Buru	16,05	26,87	20,20	24,61	2,98	9,28	100,00
05 Kepulauan Aru	14,31	37,79	15,74	20,81	2,72	8,64	100,00
06 Seram Bagian Barat	15,47	24,37	18,98	29,26	3,02	8,90	100,00
07 Seram Bagian Timur	22,16	29,76	17,94	19,56	3,36	7,22	100,00
08 Maluku Barat Daya	15,13	38,57	21,32	16,11	3,37	5,50	100,00
09 Buru Selatan	25,35	26,12	17,60	20,68	3,13	7,12	100,00
71 Kota Ambon	9,66	12,10	16,35	43,61	3,60	14,68	100,00
72 Kota Tual	11,50	19,91	20,15	30,43	3,22	14,79	100,00
Maluku	12,94	23,34	18,86	31,02	3,31	10,53	100,00

Tabel 4.9.C

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki						Jumlah
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	D-I/ D-II/ D-III	Diploma IV/ S1/S2/S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Maluku Tenggara Barat	6,15	28,11	21,96	33,84	1,83	8,12	100,00
02 Maluku Tenggara	8,66	23,49	22,47	32,04	3,60	9,74	100,00
03 Maluku Tengah	12,69	26,32	19,98	30,75	2,68	7,58	100,00
04 Buru	14,93	24,95	21,05	28,42	2,12	8,53	100,00
05 Kepulauan Aru	12,78	35,29	17,91	24,22	1,88	7,93	100,00
06 Seram Bagian Barat	14,09	22,68	20,69	33,27	2,00	7,26	100,00
07 Seram Bagian Timur	18,10	28,65	20,20	22,46	2,91	7,68	100,00
08 Maluku Barat Daya	15,00	37,54	21,10	19,73	2,44	4,19	100,00
09 Buru Selatan	21,50	26,37	19,66	23,71	2,21	6,55	100,00
71 Kota Ambon	9,82	11,05	15,73	46,65	3,45	13,30	100,00
72 Kota Tual	8,54	17,43	22,46	33,44	3,14	15,01	100,00
Maluku	12,11	22,29	19,24	34,08	2,75	9,52	100,00

BAB V

FERTILITAS DAN

KELUARGA BERENCANA

5.1 Konsep dan Definisi

Dalam publikasi ini digunakan konsep dan definisi sebagai berikut:

1. **Fertilitas** didefinisikan sebagai banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita.
2. **Keluarga Berencana** didefinisikan sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3. **Sterilisasi wanita/tubektomi/Metode Operasi Wanita (MOW)** didefinisikan sebagai tindakan operasi menyumbat (mengikat dan atau memotong) saluran keluar ovum, yakni tuba, sehingga perjalanan ovum dari ovarium saat ovulasi tidak sampai ke tempat pembuahan di uterus. Dengan demikian, kehadiran sperma tidak mengakibatkan konsepsi, dan tidak terjadi kehamilan.
4. **Seterilisasi pria/vasektomi/Metode Operasi Pria (MOP)** didefinisikan sebagai suatu operasi ringan yang dilakukan pada pria dengan maksud untuk mencegah terjadinya kehamilan. Operasi yang dimaksud adalah prosedur klinis untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan mengikat/memotong saluran sperma, sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses pembuahan dengan sel telur tidak terjadi. Vasektomi biasanya bersifat permanen.
5. **Intra Uterine Device (IUD)/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/spiral** didefinisikan sebagai alat KB dari bahan plastik atau tembaga, dipasang dalam rongga rahim untuk mencegah kehamilan.
6. **Suntikan** didefinisikan sebagai cara KB hormonal dengan cara menyuntikkan hormon progesteron dan atau estrogen. Suntikan diberikan pada masa interval 7 hari setelah haid, segera setelah persalinan atau keguguran atau kapan saja selama yakin tidak sedang hamil.
7. **Susuk KB/implan** didefinisikan sebagai alat KB berupa batang susuk, yang tipis dan halus seperti korek api, ditanam di bawah kulit lengan kiri (atau kanan jika kidal) bagian atas perempuan untuk mencegah kehamilan.
8. **Pil** didefinisikan sebagai alat KB berupa pil yang mengandung kombinasi progesteron dan estrogen untuk mencegah kehamilan.
9. **Kondom pria/karet KB** didefinisikan sebagai alat KB berupa kantong karet tipis dan elastis dipakai oleh pria ketika melakukan hubungan seksual untuk

mencegah kehamilan. Kondom berfungsi sebagai penampung sperma agar tidak tumpah ke vagina, sehingga konsepsi tidak terjadi.

10. **Intravag** didefinisikan sebagai alat KB berupa tisu yang dimasukkan pada vagina ketika akan melakukan hubungan seksual.
11. **Diafragma** didefinisikan sebagai alat/cara KB yang berbentuk mangkok terbuat dari karet lunak yang dimasukkan ke dalam vagina untuk menutup mulut Rahim agar sperma tidak masuk ke dalam rahim dan bertemu dengan sel telur. Diafragma biasanya digunakan bersama *spermisida* (pembunuh sperma) berupa *jelly* atau krim yang berguna untuk menutup mulut rahim (*cervix*) sehingga menghalangi sperma bertemu sel telur.
12. **Kondom wanita** didefinisikan sebagai alat/cara KB berupa karet tipis berbentuk tabung yang ujungnya terdapat semacam spong dan dimasukkan ke dalam vagina.
13. **Metode menyusui alami/Amenorrhea Laktasi (MAL)** didefinisikan sebagai kontrasepsi yang mengandalkan pemberian air susu ibu secara eksklusif (tanpa makanan dan minuman tambahan), belum haid, dan bayi berumur kurang dari 6 bulan.
14. **Pantang berkala/kalender** didasarkan pada pemikiran bahwa dengan tidak melakukan senggama pada hari-hari tertentu, yaitu pada masa subur dalam siklus bulanan maka dapat menghindarkan dari kehamilan.

5.2 Ulasan Singkat

Salah satu bentuk pembangunan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana (KB). Berbeda dengan masa lalu yang menekankan KB pada upaya menurunkan tingkat kelahiran yang masih tinggi pada saat itu, KB saat ini telah semakin berkembang dengan tujuan yang lebih luas yaitu untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami isteri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab.

Kebijakan keluarga berencana menyangkut usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Kebijakan program keluarga berencana bertujuan untuk mengatur kehamilan yang diinginkan; menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak; meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam

praktek keluarga berencana; serta mempromosikan pemberian air susu ibu secara eksklusif sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Upaya yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan keluarga berencana adalah dengan meningkatkan keterpaduan dan peran serta masyarakat; pembinaan keluarga; dan pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

Fertilitas merupakan salah satu komponen alamiah penentu laju pertumbuhan penduduk bersama dengan mortalitas dan menjadi indikator utama dalam upaya pengendalian penduduk. Pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, karena seorang wanita hanya mati satu kali tetapi ia dapat melahirkan lebih dari seorang bayi selama hidupnya. Di samping itu seseorang yang telah mati pada hari dan waktu tertentu tidak mempunyai risiko kematian yang kedua kali. Sebaliknya seorang wanita yang melahirkan seorang anak tidak berarti peluang melahirkan dari wanita tersebut berhenti. Kompleksnya pengukuran fertilitas juga disebabkan karena keterlibatan dua orang (suami dan istri). Masalah lain yang dijumpai dalam pengukuran fertilitas adalah tidak semua wanita mengalami risiko melahirkan karena ada kemungkinan beberapa dari mereka tidak mendapat pasangan untuk berumah tangga, juga pada wanita yang bercerai atau menjanda.

Ada beragam faktor yang mempengaruhi dan menentukan fertilitas baik yang berupa faktor demografi maupun faktor non-demografi. Faktor demografi di antaranya adalah struktur umur, umur perkawinan, lama perkawinan, dan proporsi penduduk berstatus kawin. Sementara itu, faktor non-demografi di antaranya kondisi sosial dan ekonomi penduduk, kondisi psikologi, serta norma yang berlaku di masyarakat.

Bab ini akan menyajikan beberapa indikator fertilitas yang dihasilkan dari Susenas, antara lain umur perkawinan pertama, umur pada saat hamil pertama, jumlah anak yang dilahirkan hidup, jumlah anak yang masih hidup dan sudah meninggal, keluarga berencana dan lain-lain.

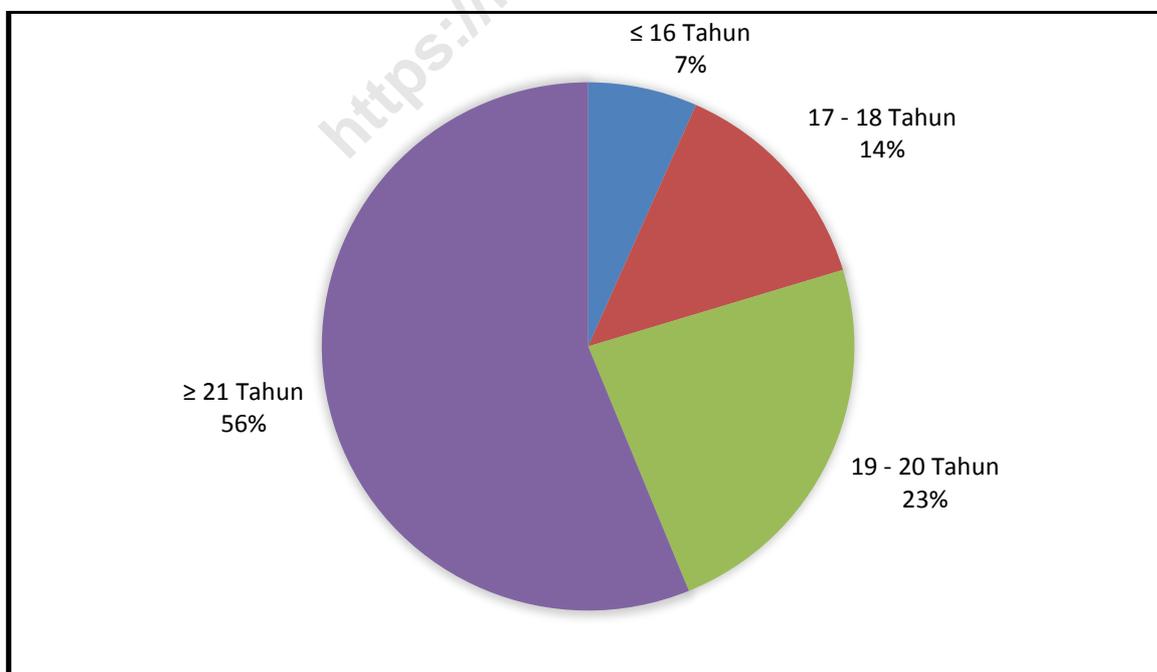
Umur perkawinan pertama seorang wanita mempengaruhi risiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama, semakin tinggi risiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik keselamatan ibu maupun anaknya. Hal ini karena pada umumnya wanita muda memiliki rahim yang belum cukup matang untuk proses berkembangnya janin, dan belum memiliki mental yang kuat untuk menghadapi masa kehamilan/melahirkan. Di sisi lain, semakin tinggi umur perkawinan pertama dari umur yang dianjurkan dalam program KB, juga semakin tinggi risiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

Tinggi rendahnya umur perkawinan pertama secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat fertilitas, semakin muda umur perkawinan pertama, maka semakin

panjang masa produktif, sehingga berpeluang menaikkan tingkat kelahiran. Sebaliknya, semakin tua umur perkawinan pertama, maka semakin singkat masa produktif, sehingga berpeluang menurunkan tingkat kelahiran. Penundaan umur perkawinan pertama dapat menjadi salah satu upaya dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara menekan tingkat kelahiran. Kondisi ekonomi, sosial, dan budaya ikut menentukan tinggi rendahnya umur perkawinan pertama. Baik umur perkawinan pertama yang terlalu muda maupun terlalu tua dapat berakibat pada tingginya risiko kesehatan ibu dan anak, karena kondisi fisik ketika mengandung dan melahirkan sangat dipengaruhi oleh usia ibu. Usia ibu yang kurang ideal selain memberikan efek pada kesehatan ibu, juga dapat berimbas pada tingkat kesehatan anak yang dilahirkan. Umur perkawinan pertama yang dianjurkan adalah antara 20 hingga 30 tahun.

Gambar 5.1 menyajikan persentase perempuan berumur 10 tahun ke atas yang tercatat pernah kawin menurut umur saat perkawinan pertama di Maluku tahun 2018. Terlihat bahwa umur perkawinan pertama dari perempuan usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin di Maluku relatif tinggi. Sebagian besar wanita usia subur yang pernah kawin di Maluku pertama kali kawin pada umur ≥ 21 tahun, yaitu sebesar 56 persen.

Gambar 5.1
Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama, 2018



Sumber: Susenas Maret 2018, diolah.

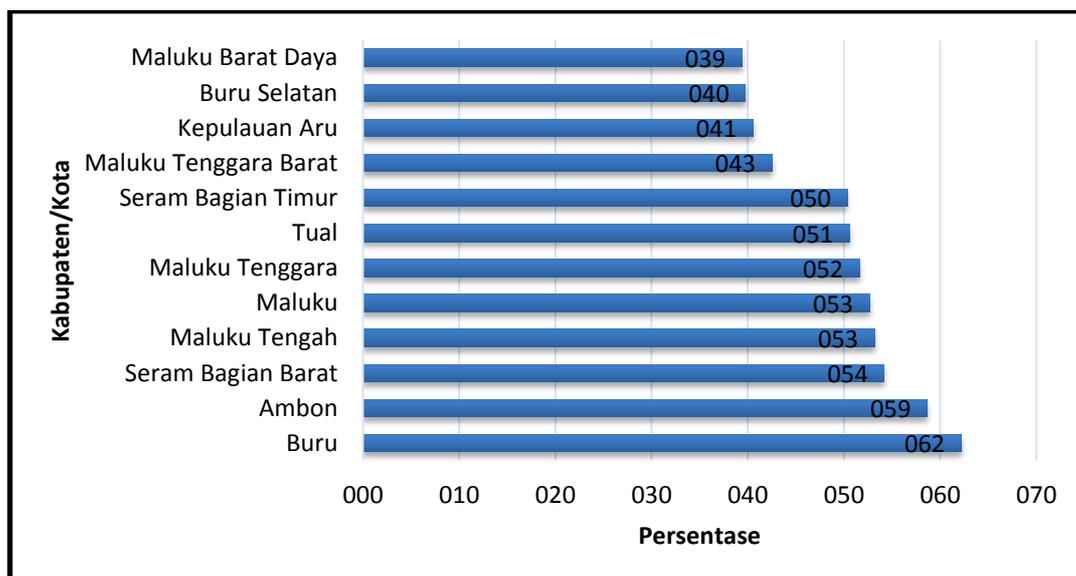
Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tenggara memiliki persentase tertinggi (65,50 dan 64,14 persen) perempuan 10 tahun ke atas pernah kawin yang perkawinan pertamanya

berumur ≥ 21 tahun, disusul kemudian Kota Tual (61,47 persen). Sementara itu, Kabupaten Buru memiliki persentase tertinggi (10,89 persen) perempuan 10 tahun ke atas pernah kawin yang perkawinan pertamanya berumur ≤ 16 tahun dan persentase terendah tercatat di Kabupaten Maluku Tenggara (3,58 persen). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Pemerintah mulai gencar menggalakkan program Keluarga Berencana (KB) beberapa waktu belakangan ini dengan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS). Umur 15—49 tahun merupakan usia subur bagi seorang wanita karena pada rentang umur tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar. Wanita yang umurnya berada pada periode ini disebut wanita usia subur (WUS) dan pasangan usia subur (PUS) bagi yang berstatus kawin.

Semakin banyak jumlah WUS, maka peluang banyaknya anak yang dilahirkan juga semakin besar. Semakin banyak jumlah anak berarti semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan anggota rumah tangganya. Dengan demikian, pengendalian jumlah anak perlu diperhatikan agar tercapai keluarga yang sejahtera. Gambar 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar wanita berumur 15—49 tahun pernah kawin di Maluku pernah/sedang menggunakan alat/cara KB sebesar 52,68 persen. Perbandingan antar kabupaten/kota untuk wanita pernah/sedang menggunakan alat/cara KB tersebut bervariasi. Persentase tertinggi tercatat di Kabupaten Buru sebesar 62,19 persen sedangkan yang terendah di Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 39,40 persen. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Gambar 5.2
Persentase Perempuan Berumur 15 – 49 Tahun Pernah Kawin yang Pernah/Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kabupaten/Kota, 2018



Sumber: Susenas Maret 2018, diolah.

Pada perempuan umur 15—49 tahun yang berstatus pernah kawin, sebesar 39,09 persen di antaranya tercatat sedang menggunakan/memakai alat/cara KB (Tabel 5.8). Dari perempuan umur 15—49 tahun yang sedang menggunakan alat/cara KB, ternyata alat/cara KB suntikan dan pil paling banyak dipilih, yaitu masing-masing tercatat sebesar 55,46 persen dan 13,58 persen. Sementara itu, penggunaan alat/cara kontrasepsi susuk KB/implant menempati urutan ketiga dengan persentase sebesar 11,23 persen, kemudian disusul oleh penggunaan alat/cara KB pantang berkala/kalender dengan persentase sebesar 8,41 persen dan alat/cara KB kondom pria/karet KB dengan persentase tercatat sebesar 7,93 persen. Persentase penggunaan alat/cara KB selain yang telah disebutkan relatif kecil di bawah 1,50 persen. Pola penggunaan alat/cara KB pada kabupaten/kota di Maluku tercatat hampir sama. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 5.4.

<https://maluku.bps.go.id>

Tabel 5.1

Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Umur Perkawinan Pertama				Jumlah
	≤ 16	17 – 18	19 – 20	21 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	5,96	15,99	29,24	48,82	100,00
02 Maluku Tenggara	3,58	12,09	20,20	64,14	100,00
03 Maluku Tengah	6,97	14,39	25,68	52,96	100,00
04 Buru	10,89	19,73	29,62	39,76	100,00
05 Kepulauan Aru	10,24	14,69	21,41	53,66	100,00
06 Seram Bagian Barat	7,24	16,25	22,56	53,95	100,00
07 Seram Bagian Timur	9,14	19,24	20,12	51,49	100,00
08 Maluku Barat Daya	3,81	10,23	26,78	59,18	100,00
09 Buru Selatan	10,83	11,84	21,10	56,22	100,00
71 Kota Ambon	4,24	9,68	20,58	65,50	100,00
72 Kota Tual	6,98	10,23	21,32	61,47	100,00
Maluku	6,64	13,68	23,51	56,18	100,00

Tabel 5.2

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 – 49 Tahun Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Berat Badan Anak Lahir Hidup Terakhir Ketika Dilahirkan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Berat Badan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Ketika Dilahirkan			Jumlah
	< 2,5 Kg	≥ 2,5 Kg	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Maluku Tenggara Barat	6,97	80,86	12,17	100,00
02 Maluku Tenggara	8,72	68,05	23,23	100,00
03 Maluku Tengah	11,40	53,80	34,80	100,00
04 Buru	12,20	54,61	33,19	100,00
05 Kepulauan Aru	10,47	47,62	41,90	100,00
06 Seram Bagian Barat	17,30	37,66	45,04	100,00
07 Seram Bagian Timur	9,24	34,72	56,04	100,00
08 Maluku Barat Daya	10,66	65,99	23,34	100,00
09 Buru Selatan	6,96	22,83	70,21	100,00
71 Kota Ambon	18,24	70,43	11,32	100,00
72 Kota Tual	13,23	77,12	9,65	100,00
Maluku	12,93	57,20	29,86	100,00

Tabel 5.3

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 – 49 Tahun Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penggunaan Alat/Cara KB di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Status Penggunaan Alat/Cara KB			Jumlah
	Pernah	Sedang	Tidak Pernah Menggunakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Maluku Tenggara Barat	13,79	28,74	57,47	100,00
02 Maluku Tenggara	17,62	34,01	48,37	100,00
03 Maluku Tengah	11,06	42,13	46,80	100,00
04 Buru	7,95	54,24	37,81	100,00
05 Kepulauan Aru	7,76	32,77	59,47	100,00
06 Seram Bagian Barat	17,12	37,07	45,81	100,00
07 Seram Bagian Timur	17,03	33,31	49,66	100,00
08 Maluku Barat Daya	15,05	24,35	60,60	100,00
09 Buru Selatan	13,40	26,36	60,24	100,00
71 Kota Ambon	15,78	42,86	41,36	100,00
72 Kota Tual	12,60	37,98	49,42	100,00
Maluku	13,59	39,09	47,32	100,00

Tabel 5.4

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 – 49 Tahun Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kabupaten/Kota dan Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan											Jumlah
	Sterilisasi Wanita/ Tubektomi/ MOW	Sterilisasi Pria/ Vasektomi/ MOP	IUD/ AKDR/ Sprial	Suntikan	Susuk KB/ Implant	Pil	Kondom Pria/ Karet KB	Intravag/ Kondom Wanita/ Diafragma	Metode Menyusui Alami	Pantang Berkala/ Kalender	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01 Maluku Tenggara Barat	1,23	0,00	0,32	57,28	29,23	4,20	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02 Maluku Tenggara	4,01	1,95	2,66	53,86	26,18	5,68	4,64	0,00	0,00	0,00	1,02	100,00
03 Maluku Tengah	0,50	0,00	0,25	54,69	9,42	17,09	7,91	0,00	0,97	9,17	0,00	100,00
04 Buru	0,55	0,00	0,01	68,58	14,60	12,26	2,70	0,21	0,00	0,00	1,09	100,00
05 Kepulauan Aru	0,00	0,00	0,62	65,46	13,71	15,38	3,66	0,00	0,00	1,16	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	0,00	0,00	0,77	65,16	11,10	10,97	4,64	0,00	0,00	4,16	3,20	100,00
07 Seram Bagian Timur	0,00	0,00	2,89	73,62	2,76	10,09	10,22	0,00	0,00	0,00	0,42	100,00
08 Maluku Barat Daya	1,63	0,00	0,00	72,12	7,65	2,13	15,14	0,00	0,00	0,00	1,33	100,00
09 Buru Selatan	0,00	0,00	0,00	74,23	2,05	10,14	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 Kota Ambon	0,84	0,00	2,42	38,84	7,01	17,01	10,83	0,00	0,00	21,61	1,44	100,00
72 Kota Tual	1,59	0,00	0,00	51,38	17,75	12,41	10,37	0,00	5,74	0,00	0,76	100,00
Maluku	0,75	0,09	1,11	55,46	11,23	13,58	7,93	0,03	0,45	8,41	0,96	100,00

BAB VI

PERUMAHAN

<https://id.aluku.com/go.id>

6.1 Konsep dan Definisi

Dalam publikasi ini digunakan konsep dan definisi sebagai berikut:

1. **Keluarga** didefinisikan sebagai hubungan yang didasarkan atas ikatan perkawinan, baik yang saat ini statusnya masih kawin atau sudah bercerai.
2. **Kepemilikan bangunan** didefinisikan sebagai status penguasaan bangunan tempat tinggal atau rumah yang ditempati. Kepemilikan bangunan dilihat dari sisi anggota rumah tangga yang mendiaminya. Status kepemilikan bangunan di antaranya:
 - a. **Milik sendiri**, jika bangunan tersebut betul-betul sudah milik kepala rumah tangga (krt) atau salah seorang anggota rumah tangga (art). Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.
 - b. **Kontrak**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt/art dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.
 - c. **Sewa**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt/art dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.
 - d. **Rumah dinas**, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu art, baik dengan membayar sewa maupun tidak.
 - e. **Bebas sewa milik orang lain**, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh art tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
 - f. **Rumah milik orang tua/sanak/saudara**, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.
 - g. **Lainnya**, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.

3. **Luas lantai** didefinisikan sebagai luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap rumah).
4. **Parket (parquetted)** didefinisikan sebagai menyusun potongan-potongan kayu untuk dijadikan penutup lantai.
5. **MCK (Mandi, Cuci, Kakus) Komunal** didefinisikan sebagai salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
6. **Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL)** didefinisikan sebagai sebuah struktur yang dirancang untuk membuang dan memisahkan limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan untuk keperluan lain. Dalam sistem pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah rumah tangga tidak ditampung dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair.
7. **Air minum layak dan bersih** didefinisikan sebagai air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung.
8. **Perpipaan** didefinisikan sebagai bila air yang digunakan disalurkan menggunakan pipa dari sumber air sampai ke rumah.
9. **Hidran umum/terminal air** didefinisikan sebagai sarana penyediaan air bersih yang sumbernya berasal dari air permukaan yang dialirkan melalui perpipaan ke tempat atau distribusi yang bersifat komunal.

6.2 Ulasan Singkat

Selain sandang dan pangan, rumah (papan) merupakan kebutuhan utama manusia. Fungsi rumah saat ini tidak hanya dipandang sebagai tempat berlindung dari panas matahari maupun hujan saja tetapi telah meluas menjadi tempat tumbuh kembang sebuah keluarga. Oleh karena itu, rumah saat ini tidak hanya dipandang sebagai bangunan semata, tetapi juga diupayakan agar mendukung kesehatan dan kesejahteraan orang yang tinggal di dalamnya. Dari sanalah konsep rumah sehat, rumah layak anak, sanitasi sehat dan layak kemudian berkembang menjadi indikator yang harus dicapai.

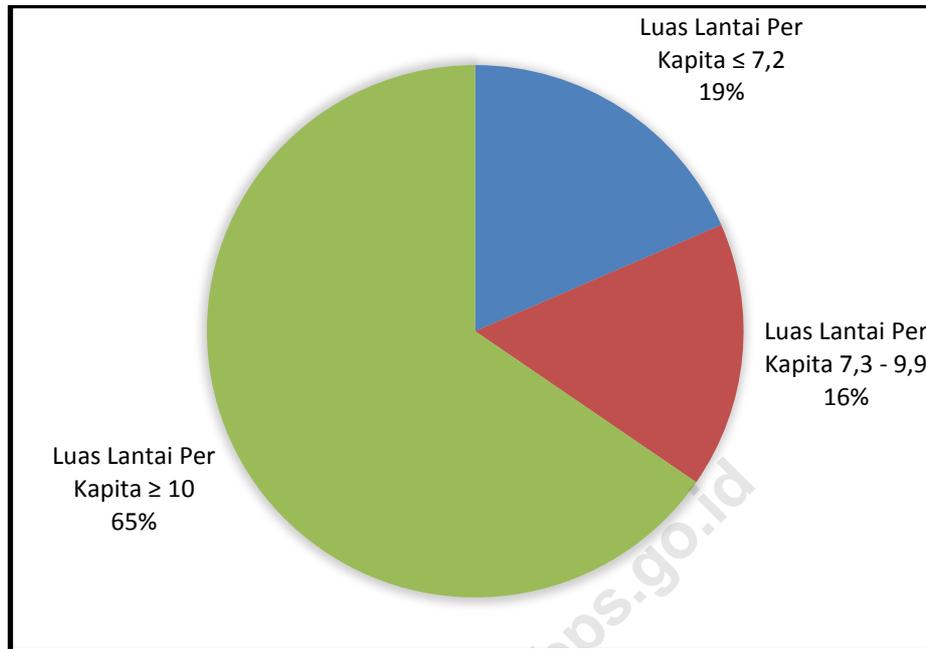
Bab ini akan menyajikan data terkait perumahan meliputi kepemilikan, kualitas bangunan (atap, lantai, dinding), tingkat kesejahteraan yang diproksi dengan luas lantai per kapita, sanitasi dan fasilitas buang air besar, sumber air, dan sebagainya.

Tabel 6.2 menyajikan persentase status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati rumah tangga di Maluku pada tahun 2018, tercatat sebesar 80,09 persen rumah tangga di Maluku sudah menempati bangunan tempat tinggal berstatus milik sendiri. Status kepemilikan bangunan tempat tinggal menurut kabupaten/kota sangat bervariasi, Kabupaten Buru Selatan memiliki persentase tertinggi (90,46 persen) rumah tangganya dengan kepemilikan bangunan tempat tinggal berstatus milik sendiri, dan terendah (69,41 persen) di Kota Ambon. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Luas lantai rumah yang ditempati rumah tangga dapat dijadikan pendekatan untuk menilai kesejahteraan rumah tangga. Sebagian besar rumah tangga di Maluku sudah menempati rumah dengan luas lantai $\geq 50 \text{ m}^2$ yaitu mencapai 59,69 persen. Ini berarti apabila ditinjau dari luas lantainya, lebih dari setengah rumah tangga di Maluku tercatat sudah menempati rumah yang memenuhi syarat standar rumah sehat (minimal 36 m^2). Fakta menarik terungkap dari hasil Susenas 2018, yaitu Kota Ambon tercatat sebagai kota dengan persentase rumah tangga yang tinggal di rumah dengan luas lantai $< 20 \text{ m}^2$ tertinggi di Maluku, yaitu 11,63 persen. Selain karena luas lahan yang terbatas, hal tersebut juga dapat disebabkan karena banyaknya rumah tangga yang tinggal di rumah sewa (indekos) dengan luas $< 20 \text{ m}^2$. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang mempunyai luas lantai minimum $7,2 \text{ m}^2$ per jiwa. Sekitar 19 persen rumah di Maluku mempunyai luas lantai $\leq 7,2 \text{ m}^2$ per jiwa (Gambar 6.1). Persentase tertinggi tercatat di Kabupaten Kepulauan Aru (35,91 persen) dan terendah di Kabupaten Buru Selatan (14,78 persen). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.4. Luas bangunan tempat tinggal sehat semestinya cukup untuk penghuni di dalamnya atau disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Luas bangunan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan kepadatan penghuni (*overcrowded*). Salah satu dampak dari hunian *overcrowded* ini adalah mudahnya penularan penyakit antar penghuni rumah.

Gambar 6.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Luas Lantai Per Kapita (M^2) di Provinsi Maluku, 2018



Sumber: Susenas Maret 2018, diolah.

Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati juga dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menggambarkan semakin baik keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Jenis atap yang digunakan merupakan salah satu faktor penentu baik buruknya kondisi dan kualitas rumah tempat tinggal.

Hasil Susenas 2018, menunjukkan sebagian besar rumah tangga di Maluku (85,05 persen) tercatat tinggal di rumah dengan atap seng. Selain menggunakan seng, juga ada sebagian rumah tangga di Maluku tercatat tinggal di rumah yang beratapkan jerami/ijuk/daun/rimba. Atap jerami/ijuk/daun/rimba banyak ditemukan di Kabupaten Kepulauan Aru. Di Kabupaten Kepulauan Aru persentase rumah tangga yang menggunakan jerami/ijuk/daun/rimba sebagai atap mencapai 16,52 persen (angka tertinggi di Maluku), Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.5.

Jenis dinding memiliki peran utama dalam menentukan kuat tidaknya struktur bangunan rumah. Di samping itu dengan tujuan untuk memenuhi standar kesehatan, jenis dinding rumah yang dipilih sebaiknya dari bahan yang kedap air sehingga dinding terhindar dari basah dan lembab serta tidak berlumut. Hasil Susenas 2018 menunjukkan sebesar 78,05 persen rumah tangga Maluku tercatat tinggal di rumah dengan dinding dari tembok dan 21,95 persen yang tinggal di rumah yang bukan tembok seperti kayu, bambu dan lainnya. Bila dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Kepulauan Aru merupakan

kabupaten dengan persentase terkecil rumah tangga yang tinggal di rumah berdinding tembok (51,63 persen).

Selain jenis atap dan dinding, jenis lantai juga dapat menjadi indikator penilaian rumah sehat. Ada bermacam-macam jenis lantai, di antaranya marmer/granit, keramik, parket, vinil, permadani, ubin, tegel, teraso, kayu, semen dan bata merah. Fungsi lantai secara umum sebagai alas pijakan kaki sehingga memberi kenyamanan ketika berjalan di atasnya. Di samping itu lantai juga dapat memberi nilai estetika suatu rumah atau bangunan. Lantai dari tanah dianggap kurang memenuhi standar kesehatan karena jika musim hujan akan menjadi lembab dan dapat menjadi media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti diare, cacingan, dan penyakit kulit. Begitu juga ketika musim panas, lantai tanah akan lebih banyak mengeluarkan debu, yang juga dapat menjadi media penyebaran penyakit. Sebagian besar rumah tangga di Maluku tercatat menempati rumah dengan jenis lantai utama terbuat dari keramik, ubin, tegel, teraso, semen, dan bata merah, yaitu sebesar 88,56 persen. Persentase rumah tinggal dengan jenis lantai dari tanah di Maluku 4,71 persen, bahkan di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Ambon persentase rumah tinggal dengan jenis lantai dari tanah kurang dari 1 persen, tercatat masing-masing sebesar 0,74 persen dan 0,74 persen. Persentase tertinggi rumah tinggal dengan lantai tanah terdapat di Kabupaten Maluku Barat Daya (10,53 persen), disusul Kabupaten Seram Bagian Timur (9,04 persen) dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (7,59 persen). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.7.

Fasilitas rumah tidak hanya penting dari sisi kenyamanan penghuninya, namun tidak kalah penting adalah dari sisi kesehatan. Tiga fasilitas dasar yang semestinya tersedia dalam setiap rumah untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan para penghuni akan dibahas pada bagian ini. Tiga fasilitas dasar tersebut adalah sumber penerangan, sumber air minum/air bersih, dan tempat buang air besar.

Sumber penerangan yang dicakup dalam publikasi ini adalah listrik dan bukan listrik. Listrik meliputi listrik yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun non-PLN. Listrik merupakan sumber penerangan yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan jenis penerangan lainnya. Hal ini disebabkan listrik lebih praktis dan modern, serta tidak menimbulkan polusi. Rumah tangga yang menggunakan listrik dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibanding rumah tangga yang tidak menggunakan listrik. Berdasarkan Tabel 6.1 terlihat bahwa hampir seluruh rumah tangga di Maluku tercatat sudah menggunakan listrik, baik yang bersumber dari PLN maupun non-PLN, hanya 7,37 persen rumah tangga yang menggunakan penerangan nonlistrik. Apabila dirinci menurut kabupaten/kota, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kota Ambon dan Kota Tual sudah lebih dari 90 persen rumah tangga tercatat menggunakan penerangan listrik PLN. Sementara itu Kabupaten Kepulauan Aru merupakan daerah dengan persentase terendah

(45,78 persen) yang rumah tangganya yang menggunakan penerangan listrik PLN. Data selengkapnya dapat dilihat di Tabel 6.8.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Rumah di Provinsi Maluku, 2018

Fasilitas Rumah	Persentase
(1)	(2)
Sumber Penerangan	
- Listrik (PLN dan non-PLN)	92,63
- Non-Listrik	7,37
Fasilitas Air Bersih	
- Sumber air minum	
• Bersih	72,19
• Layak	52,36
- Sumber air minum	
• Terlindung	90,18
• Tidak Terlindung	9,82
- Jarak pompa/sumur/mata air ke tempat penampungan limbah/kotoran/ tinja terdekat	
• < 10 m	19,59
• ≥ 10 m	67,56
• Tidak tahu	12,85
Akses ke sumber air minum	
- Membeli	36,00
- Tidak membeli	64,00
Fasilitas buang air besar	
- Ada	82,99
- Tidak ada	17,01

Sumber: Susenas Maret 2018, diolah.

Air bersih adalah kebutuhan manusia yang paling dasar. Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari tanpa makanan, tetapi akan mati tanpa minum. Air minum yang diminum pun harus bersih karena jika tidak, air dapat mengakibatkan berbagai penyakit, seperti diare dan cacangan. Ketersediaan air bersih di rumah tangga diukur dari sumber air minum yang digunakan dan jarak sumber air minum ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Sumber air minum mempengaruhi kualitas air minum. Untuk sumber air minum yang berasal dari sumber air minum layak, meliputi leding meteran, leding eceran, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Khusus untuk sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung dituntut memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter. Sementara itu, konsep air bersih meliputi air kemasan, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Hal yang sama untuk sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung dituntut memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter.

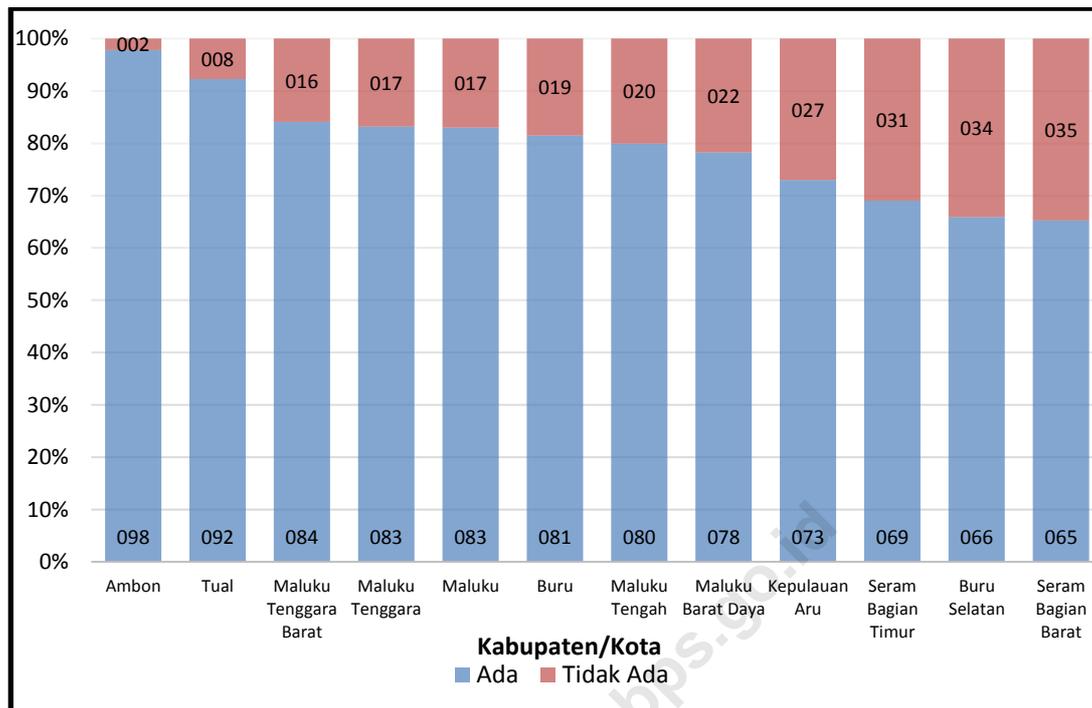
Hasil Susenas 2018 menunjukkan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak tercatat sebesar 52,36 persen. Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan daerah yang persentase rumah tangganya menggunakan sumber air minum layak tertinggi, yaitu tercatat sebesar 67,86 persen dan 60,29 persen. Sementara itu, Kota Tual tercatat sebagai daerah dengan persentase paling rendah yaitu 40,54 persen.

Jarak sumber air minum (yang berasal dari pompa, sumur, atau mata air) ke tempat penampungan kotoran sangat mempengaruhi kualitas air minum, Jarak yang sehat antara sumber air minum dan tempat penampungan tinja disepakati minimal 10 meter, Di Maluku masih terdapat 19,59 persen rumah tangga yang jarak sumber air minumnya ke tempat penampungan kotoran/tinja kurang dari 10 meter. Berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Buru merupakan daerah dengan persentase paling tinggi, yaitu sebesar 31,63 persen, disusul kemudian Kabupaten Maluku Tengah sebesar 21,85 persen. Sementara itu, paling rendah tercatat di Kota Tual (12,22 persen) rumah tangga yang sumber air minumnya berjarak < 10 meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Persentase sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk memasak/mandi/cuci/dan lain-lain dapat dilihat pada Tabel 6.12. Pada tabel tersebut terlihat bahwa terdapat sebesar 26,50 persen rumah tangga di Maluku menggunakan sumber air utama untuk memasak/mandi/cuci/dan lain-lain dari mata air terlindung disusul kemudian air yang bersumber dari sumur terlindung, yaitu sebesar 25,25 persen.

Salah satu sarana sanitasi penting dalam rumah selain sarana air bersih adalah sarana pembuangan kotoran (jamban). Jamban termasuk kelompok sarana sanitasi yang ada dalam 3 komponen penilaian rumah sehat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999. Pada tahun 2018, persentase rumah tangga di Maluku yang tercatat telah tersedia fasilitas buang air besar mencapai 82,99 persen, baik merupakan fasilitas sendiri, bersama, maupun umum (lihat Tabel 6.18). Persentase rumah tangga yang belum memiliki jamban sebesar 17,01 persen rumah tangga.

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, 2018



Sumber: Susenas Maret 2018, diolah.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan daerah dengan persentase terendah (65,23 persen) yang rumah tangganya menggunakan fasilitas buang air besar. Sementara itu, Kota Ambon merupakan daerah dengan persentase tertinggi (97,77 persen), lihat Gambar 6.3.

Salah satu aspek penting dari fasilitas pembuangan air besar yang mempengaruhi baik buruknya sanitasi adalah jenis kloset. Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus yang dibedakan antara leher angsa, plengsengan, cemplung/cubluk dan tidak memakai kloset. Berdasarkan Tabel 6.16 diketahui bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan jamban leher angsa tercatat sebesar 95,83 persen, sedangkan penggunaan kloset selain leher angsa hanya sebesar 4,17 persen. Persentase penggunaan kloset leher angsa terendah (74,57 persen) tercatat di Kabupaten Kepulauan Aru, sementara itu tertinggi (99,74 persen) berada di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Komponen lain yang penting dari fasilitas pembuangan air besar adalah tempat pembuangan akhir tinja. Beberapa jenis tempat pembuangan akhir tinja yaitu tangki, SPAL (Saluran Pembuangan Akhir Limbah), kolam/sawah, sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya. Dari beberapa jenis tempat pembuangan tinja tersebut, tangki dan SPAL yang dinilai paling memenuhi standar kesehatan karena mengurangi tercemarnya sumber air minum rumah tangga dari resapan limbah tinja.

Rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai tempat penampungan akhir tinja tercatat sangat dominan, yaitu sebesar 90,15 persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan selain tangki septik juga masih ada, seperti SPAL/pantai/tanah lapang/kebun/lainnya (1,35 persen), kolam/sawah/sungai/danau/laut (3,48 persen), dan lubang tanah (5,02 persen). Masih tingginya rumah tangga yang jambannya belum menggunakan tangki septik (9,85 persen) bisa menunjukkan perilaku tidak sehat masyarakat yang diduga akibat oleh keadaan ekonomi, keterbatasan akses/ketersediaan fasilitas, dan wawasan masyarakat sendiri. Bila dilihat menurut kabupaten/kota, kabupaten dengan persentase rumah tangga yang menggunakan tangki septik terendah adalah Kabupaten Kepulauan Aru yang hanya mencapai 65,49 persen (lihat Tabel 6.17).

Sumber bahan bakar untuk memasak dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber bahan bakar terbarukan dan sumber bahan bakar tak terbarukan. Sumber bahan bakar terbarukan contohnya adalah kayu bakar, sedangkan sumber bahan bakar tak terbarukan adalah LPG dan minyak tanah. Sumber bahan bakar untuk memasak dari kayu dianggap sebagai bahan bakar yang tidak ramah lingkungan karena menyebabkan polusi dan merusak ekologi apabila digunakan secara terus menerus tanpa dilakukan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil Susenas 2018, lebih dari separuh (62,41 persen) rumah tangga di Maluku tercatat menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak. Sementara itu, rumah tangga yang menggunakan kayu bakar untuk memasak sebesar 35,78 persen. Apabila dicermati berdasarkan kabupaten/kota, persentase tertinggi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar minyak tanah untuk memasak adalah Kota Ambon, yaitu sebesar 92,47 persen dan persentase tertinggi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar kayu adalah Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu sebesar 80,97 persen. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.18.

Tabel 6.2

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal					Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Maluku Tenggara Barat	88,06	3,15	4,27	4,20	0,33	100,00
02 Maluku Tenggara	88,45	1,89	7,36	2,01	0,30	100,00
03 Maluku Tengah	77,28	3,08	15,85	3,69	0,11	100,00
04 Buru	88,47	4,92	4,81	1,81	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	86,73	3,96	6,77	2,22	0,33	100,00
06 Seram Bagian Barat	84,72	1,58	11,50	1,91	0,29	100,00
07 Seram Bagian Timur	84,92	5,96	7,79	1,33	0,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	89,92	1,72	7,22	1,15	0,00	100,00
09 Buru Selatan	90,46	2,82	6,03	0,69	0,00	100,00
71 Kota Ambon	69,41	15,00	9,47	6,11	0,00	100,00
72 Kota Tual	87,61	4,65	6,42	1,32	0,00	100,00
Maluku	80,09	6,57	9,74	3,49	0,10	100,00

Tabel 6.3

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Luas Lantai Tempat Tinggal (m²) di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Luas Lantai Tempat Tinggal (m ²)					Jumlah
	≤ 19	20 – 49	50 – 99	100 – 149	150 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Maluku Tenggara Barat	1,90	55,48	35,76	3,79	3,07	100,00
02 Maluku Tenggara	0,86	32,34	50,37	11,49	4,93	100,00
03 Maluku Tengah	1,31	34,11	48,36	10,68	5,53	100,00
04 Buru	2,21	31,08	43,15	17,97	5,58	100,00
05 Kepulauan Aru	5,32	56,51	27,11	6,29	4,76	100,00
06 Seram Bagian Barat	0,74	34,48	50,16	12,09	2,53	100,00
07 Seram Bagian Timur	4,35	32,00	47,87	12,00	3,79	100,00
08 Maluku Barat Daya	1,10	37,01	49,88	8,75	3,27	100,00
09 Buru Selatan	2,05	31,82	47,75	13,84	4,54	100,00
71 Kota Ambon	11,63	33,58	36,71	11,01	7,07	100,00
72 Kota Tual	2,92	28,18	38,21	19,96	10,74	100,00
Maluku	4,68	35,64	42,89	11,36	5,44	100,00

Tabel 6.4

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Luas Lantai per Kapita (m²) di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Luas Lantai Tempat Tinggal (m ²)			Jumlah
	≤ 7,2	7,3 – 9,9	≥ 10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Maluku Tenggara Barat	30,96	21,32	47,72	100,00
02 Maluku Tenggara	16,95	16,36	66,69	100,00
03 Maluku Tengah	13,10	14,53	72,37	100,00
04 Buru	15,20	13,33	71,48	100,00
05 Kepulauan Aru	35,91	19,24	44,84	100,00
06 Seram Bagian Barat	16,53	15,35	68,12	100,00
07 Seram Bagian Timur	16,52	15,11	68,37	100,00
08 Maluku Barat Daya	17,07	16,13	66,79	100,00
09 Buru Selatan	14,78	17,94	67,28	100,00
71 Kota Ambon	20,36	16,99	62,64	100,00
72 Kota Tual	16,47	14,98	68,55	100,00
Maluku	18,46	16,14	65,40	100,00

Tabel 6.5

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Atap Terlulus di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Atap Terlulus						Jumlah
	Beton	Genteng	Asbes	Seng	Bambu/Kayu/ Sirap/Lainnya	Jerami/Ijuk/ Daun/Rumbia	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Maluku Tenggara Barat	0,76	1,02	21,49	69,48	0,04	7,21	100,00
02 Maluku Tenggara	0,59	0,02	8,03	89,21	0,18	1,97	100,00
03 Maluku Tengah	0,61	1,83	2,71	86,56	0,82	7,47	100,00
04 Buru	0,47	3,70	6,98	87,00	0,00	1,85	100,00
05 Kepulauan Aru	0,00	0,46	9,13	72,88	1,01	16,52	100,00
06 Seram Bagian Barat	0,92	0,68	4,87	77,02	0,25	16,26	100,00
07 Seram Bagian Timur	3,10	0,77	9,16	74,95	0,23	11,78	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,24	1,29	15,17	72,97	0,74	9,60	100,00
09 Buru Selatan	0,73	1,05	4,84	85,53	0,89	6,96	100,00
71 Kota Ambon	1,92	0,57	2,22	94,01	0,60	0,67	100,00
72 Kota Tual	0,19	0,32	8,86	87,23	2,09	1,30	100,00
Maluku	1,10	1,15	5,95	85,05	0,58	6,17	100,00

Tabel 6.6

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Dinding Terluas di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Dinding Terluas						Jumlah
	Tembok	Plesteran Anyaman Bambu/ Kawat	Kayu/Papan	Anyaman Bambu	Bambu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Maluku Tenggara Barat	85,29	0,31	12,17	1,04	0,94	0,25	100,00
02 Maluku Tenggara	92,06	0,00	7,28	0,00	0,00	0,66	100,00
03 Maluku Tengah	73,11	0,97	23,45	0,14	0,12	2,21	100,00
04 Buru	68,03	0,90	29,89	0,49	0,00	0,69	100,00
05 Kepulauan Aru	51,63	0,37	45,17	0,00	0,08	2,76	100,00
06 Seram Bagian Barat	65,50	0,00	32,39	0,00	0,00	2,12	100,00
07 Seram Bagian Timur	69,97	0,52	26,17	0,95	0,00	2,39	100,00
08 Maluku Barat Daya	83,10	1,24	6,32	3,95	2,75	2,65	100,00
09 Buru Selatan	80,04	0,00	17,91	0,19	0,36	1,51	100,00
71 Kota Ambon	88,33	0,00	8,92	0,06	0,00	2,69	100,00
72 Kota Tual	91,82	0,72	5,82	0,00	0,00	1,64	100,00
Maluku	78,05	0,43	18,91	0,37	0,21	2,04	100,00

Tabel 6.7

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Lantai Terluas di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Lantai Terluas									Jumlah
	Marmer/ Granit	Keramik	Parket/ Vinil/ Permadani	Ubin/Tegel /Teraso	Kayu/ Papan	Semen/ Bata Merah	Bambu	Tanah	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01 Maluku Tenggara Barat	0,10	27,18	0,09	13,24	2,05	49,49	0,00	7,59	0,25	100,00
02 Maluku Tenggara	0,40	38,15	0,94	0,96	1,11	55,40	0,00	3,04	0,00	100,00
03 Maluku Tengah	0,14	27,44	0,50	16,44	4,74	44,85	0,00	5,89	0,00	100,00
04 Buru	2,06	25,15	0,22	13,98	1,22	50,11	1,33	5,94	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	1,50	20,17	2,20	5,73	40,64	29,03	0,00	0,74	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	0,09	20,41	0,78	10,15	2,88	54,12	3,32	8,24	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	0,00	13,87	0,00	1,63	6,18	68,71	0,30	9,04	0,27	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,00	20,88	0,00	7,49	0,00	61,10	0,00	10,53	0,00	100,00
09 Buru Selatan	0,66	15,23	0,07	11,98	4,39	61,75	0,00	5,94	0,00	100,00
71 Kota Ambon	1,97	36,86	0,05	30,09	3,08	27,19	0,00	0,74	0,00	100,00
72 Kota Tual	0,61	41,06	1,46	1,32	1,05	49,90	0,00	4,60	0,00	100,00
Maluku	0,90	28,43	0,43	16,02	4,94	44,11	0,43	4,71	0,03	100,00

Tabel 6.8

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama Rumah di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Sumber Penerangan Utama Rumah			Jumlah
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Maluku Tenggara Barat	77,08	12,38	10,53	100,00
02 Maluku Tenggara	85,43	5,44	9,13	100,00
03 Maluku Tengah	97,17	0,00	2,83	100,00
04 Buru	92,60	3,50	3,90	100,00
05 Kepulauan Aru	45,78	12,71	41,51	100,00
06 Seram Bagian Barat	89,74	0,22	10,04	100,00
07 Seram Bagian Timur	74,19	8,92	16,88	100,00
08 Maluku Barat Daya	65,08	20,46	14,46	100,00
09 Buru Selatan	70,69	13,17	16,15	100,00
71 Kota Ambon	99,15	0,00	0,85	100,00
72 Kota Tual	91,84	6,41	1,75	100,00
Maluku	88,69	3,94	7,37	100,00

Tabel 6.9

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum								Jumlah
	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	Leding Meteran/ Eceran	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tidak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tidak Terlindung	Air Permukaan, Air Hujan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Maluku Tenggara Barat	8,65	21,36	0,28	41,91	3,15	19,43	4,25	0,96	100,00
02 Maluku Tenggara	16,15	9,80	5,43	25,50	5,53	31,03	4,98	1,58	100,00
03 Maluku Tengah	14,28	7,50	6,50	24,73	2,05	32,21	2,37	10,36	100,00
04 Buru	31,77	9,67	6,43	30,05	3,30	18,01	0,67	0,10	100,00
05 Kepulauan Aru	12,55	24,36	1,58	31,39	7,25	7,53	5,71	9,62	100,00
06 Seram Bagian Barat	6,24	0,00	9,51	16,54	5,72	50,81	4,16	7,03	100,00
07 Seram Bagian Timur	14,50	0,00	2,58	29,29	11,36	31,87	1,55	8,85	100,00
08 Maluku Barat Daya	1,14	6,80	3,42	33,04	3,36	39,72	2,34	10,18	100,00
09 Buru Selatan	5,65	11,18	0,67	19,11	4,24	56,21	2,26	0,68	100,00
71 Kota Ambon	43,85	20,32	10,09	8,18	0,56	16,85	0,16	0,00	100,00
72 Kota Tual	44,43	13,86	20,30	12,06	1,23	7,35	0,13	0,63	100,00
Maluku	23,16	12,14	7,07	21,07	3,23	26,74	2,05	4,54	100,00

Tabel 6.10

Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung/Tidak dan Mata Air Terlindung/Tidak Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat			Jumlah
	< 10 M	≥ 10 M	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Maluku Tenggara Barat	19,56	70,41	10,02	100,00
02 Maluku Tenggara	17,79	66,67	15,54	100,00
03 Maluku Tengah	21,85	66,69	11,46	100,00
04 Buru	31,63	64,63	3,75	100,00
05 Kepulauan Aru	16,79	70,42	12,79	100,00
06 Seram Bagian Barat	15,64	73,17	11,20	100,00
07 Seram Bagian Timur	15,24	65,75	19,00	100,00
08 Maluku Barat Daya	15,98	57,09	26,94	100,00
09 Buru Selatan	19,05	62,81	18,14	100,00
71 Kota Ambon	19,66	70,17	10,17	100,00
72 Kota Tual	12,22	65,71	22,07	100,00
Maluku	19,59	67,56	12,85	100,00

Tabel 6.11

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Cara Memperoleh Air Minum di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Cara Memperoleh Air Minum		Jumlah
	Membeli	Tidak Membeli	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	27,38	72,62	100,00
02 Maluku Tenggara	28,68	71,32	100,00
03 Maluku Tengah	20,26	79,74	100,00
04 Buru	37,36	62,64	100,00
05 Kepulauan Aru	27,62	72,38	100,00
06 Seram Bagian Barat	12,85	87,15	100,00
07 Seram Bagian Timur	14,50	85,50	100,00
08 Maluku Barat Daya	12,71	87,29	100,00
09 Buru Selatan	17,18	82,82	100,00
71 Kota Ambon	66,42	33,58	100,00
72 Kota Tual	68,42	31,58	100,00
Maluku	36,00	64,00	100,00

Tabel 6.12

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Memasak/Mandi/Cuci/DII di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Memasak/Mandi/Cuci/DII									Jumlah
	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	Leding Meteran/ Eceran	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tidak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tidak Terlindung	Air Permukaan (Sungai, Danau/ Waduk, Kolam, Irigasi)	Air Hujan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01 Maluku Tenggara Barat	0,26	27,94	0,33	45,38	5,58	14,50	3,67	0,81	1,53	100,00
02 Maluku Tenggara	0,00	16,90	8,33	30,55	6,68	29,84	5,20	0,63	1,88	100,00
03 Maluku Tengah	0,22	12,74	11,77	25,40	4,73	35,60	1,61	1,25	6,68	100,00
04 Buru	0,41	20,85	13,97	37,89	5,95	18,07	0,47	2,39	0,00	100,00
05 Kepulauan Aru	0,01	33,70	1,70	33,30	8,93	7,24	5,01	4,72	5,38	100,00
06 Seram Bagian Barat	0,19	0,00	16,16	16,18	8,96	44,46	5,00	9,05	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	0,27	0,00	8,01	36,37	22,15	27,52	0,71	3,54	1,42	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,00	7,47	3,34	34,21	2,72	40,33	1,75	0,00	10,18	100,00
09 Buru Selatan	0,00	11,18	3,39	21,27	4,43	50,79	0,73	8,20	0,00	100,00
71 Kota Ambon	0,31	30,67	30,13	16,13	1,29	18,17	0,23	0,28	2,79	100,00
72 Kota Tual	0,45	14,67	57,96	15,20	3,18	7,27	0,15	0,00	1,12	100,00
Maluku	0,23	18,32	16,98	25,25	5,52	26,50	1,78	2,17	3,24	100,00

Tabel 6.13

Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Memasak/Mandi/Cuci/Dll dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung/Tidak dan Mata Air Terlindung/Tidak Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat			Jumlah
	< 10 M	≥ 10 M	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Maluku Tenggara Barat	27,13	63,76	9,11	100,00
02 Maluku Tenggara	18,92	64,10	16,98	100,00
03 Maluku Tengah	19,66	68,67	11,66	100,00
04 Buru	33,14	63,43	3,43	100,00
05 Kepulauan Aru	19,61	67,91	12,48	100,00
06 Seram Bagian Barat	17,33	72,26	10,42	100,00
07 Seram Bagian Timur	22,83	57,98	19,19	100,00
08 Maluku Barat Daya	15,48	56,38	28,14	100,00
09 Buru Selatan	21,98	63,58	14,44	100,00
71 Kota Ambon	22,33	64,80	12,86	100,00
72 Kota Tual	14,72	57,34	27,94	100,00
Maluku	21,42	65,19	13,39	100,00

Tabel 6.14

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih, dan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum Bersih*)	Sumber Air Minum Layak**)
(1)	(2)	(3)
01 Maluku Tenggara Barat	75,54	67,86
02 Maluku Tenggara	67,86	53,29
03 Maluku Tengah	63,39	58,66
04 Buru	76,86	45,10
05 Kepulauan Aru	64,04	56,84
06 Seram Bagian Barat	61,70	55,47
07 Seram Bagian Timur	56,02	48,01
08 Maluku Barat Daya	51,25	60,29
09 Buru Selatan	65,56	59,91
71 Kota Ambon	88,59	44,74
72 Kota Tual	84,34	40,54
Maluku	72,19	52,36

*) Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja \geq 10 m]

***) Terdiri dari air leding, air hujan, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja \geq 10 m]

Tabel 6.15

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Fasilitas Buang Air Besar				Jumlah
	Sendiri	Bersama	MCK Komunal/ Umum, Ada Tidak Digunakan	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	72,21	5,60	6,25	15,95	100,00
02 Maluku Tenggara	76,15	3,95	3,08	16,82	100,00
03 Maluku Tengah	70,79	3,90	5,22	20,09	100,00
04 Buru	68,20	6,41	6,83	18,57	100,00
05 Kepulauan Aru	44,04	7,77	21,18	27,01	100,00
06 Seram Bagian Barat	47,20	7,56	10,47	34,77	100,00
07 Seram Bagian Timur	54,02	7,63	7,36	30,99	100,00
08 Maluku Barat Daya	62,51	5,22	10,46	21,80	100,00
09 Buru Selatan	51,53	4,32	10,01	34,14	100,00
71 Kota Ambon	78,81	17,17	1,79	2,23	100,00
72 Kota Tual	78,59	4,54	9,13	7,74	100,00
Maluku	68,02	8,75	6,22	17,01	100,00

Tabel 6.16

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kloset				Jumlah
	Leher Angsa	Plengsengan dengan Tutup	Plengsengan tanpa Tutup	Cemplung/ Cubluk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	98,86	0,38	0,45	0,31	100,00
02 Maluku Tenggara	99,32	0,00	0,13	0,56	100,00
03 Maluku Tengah	94,69	0,84	0,37	4,11	100,00
04 Buru	88,57	0,00	0,04	11,39	100,00
05 Kepulauan Aru	74,57	0,37	2,43	22,63	100,00
06 Seram Bagian Barat	99,74	0,00	0,26	0,00	100,00
07 Seram Bagian Timur	95,68	0,00	0,00	4,32	100,00
08 Maluku Barat Daya	97,10	1,79	0,75	0,36	100,00
09 Buru Selatan	97,50	0,00	0,89	1,61	100,00
71 Kota Ambon	97,68	1,19	0,24	0,89	100,00
72 Kota Tual	99,49	0,00	0,01	0,50	100,00
Maluku	95,83	0,69	0,34	3,13	100,00

Tabel 6.17

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Tempat Pembuangan Akhir Tinja				Jumlah
	Tangki Septik	SPAL/Pantai/Tanah Lapang/Kebun/Lainnya	Kolam/Sawah/ Sungai/ Danau/ Laut	Lubang Tanah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	97,57	0,84	0,31	1,27	100,00
02 Maluku Tenggara	94,17	2,02	0,65	3,16	100,00
03 Maluku Tengah	91,86	0,08	1,75	6,31	100,00
04 Buru	82,01	2,08	4,55	11,37	100,00
05 Kepulauan Aru	65,49	4,26	22,96	7,29	100,00
06 Seram Bagian Barat	97,53	0,99	0,72	0,76	100,00
07 Seram Bagian Timur	94,25	0,00	1,58	4,17	100,00
08 Maluku Barat Daya	90,20	1,70	0,00	8,11	100,00
09 Buru Selatan	91,99	0,73	3,36	3,93	100,00
71 Kota Ambon	89,49	2,11	4,97	3,43	100,00
72 Kota Tual	87,47	0,00	0,50	12,03	100,00
Maluku	90,15	1,35	3,48	5,02	100,00

Tabel 6.18

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar Utama yang Digunakan untuk Memasak di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Bahan Bakar Utama untuk Memasak					Tidak Memasak di Rumah	Jumlah
	Listrik	Elpiji 5,5 kg/ Bluegaz, Elpiji 12 kg/ 3 kg	Minyak Tanah	Kayu Bakar	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Maluku Tenggara Barat	0,00	0,00	56,37	43,41	0,00	0,22	100,00
02 Maluku Tenggara	0,56	0,41	44,23	54,30	0,00	0,49	100,00
03 Maluku Tengah	0,00	0,00	69,53	30,15	0,00	0,32	100,00
04 Buru	0,52	0,06	55,82	43,49	0,00	0,11	100,00
05 Kepulauan Aru	0,00	0,73	50,94	48,33	0,00	0,00	100,00
06 Seram Bagian Barat	0,00	0,13	26,90	72,81	0,00	0,16	100,00
07 Seram Bagian Timur	0,00	0,00	32,82	65,51	0,00	1,67	100,00
08 Maluku Barat Daya	0,28	0,00	18,30	80,97	0,46	0,00	100,00
09 Buru Selatan	0,00	0,00	24,40	75,60	0,00	0,00	100,00
71 Kota Ambon	0,40	2,38	92,47	2,54	0,00	2,21	100,00
72 Kota Tual	0,00	0,39	77,04	22,57	0,00	0,00	100,00
Maluku	0,19	0,75	62,41	35,78	0,02	0,85	100,00

BAB VII
TEKNOLOGI DAN
KOMUNIKASI

<https://malukuaps.go.id>

7.1 Konsep dan Definisi

Dalam publikasi ini digunakan konsep dan definisi sebagai berikut:

1. **Telepon seluler (HP)** didefinisikan sebagai perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portable, mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Selain berfungsi sebagai telepon, telepon seluler modern biasanya mendukung layanan tambahan, seperti *Short Messages Services (SMS)*, *Multimedia Messages Service (MMS)*, *e-mail*, dan akses Internet, aplikasi bisnis dan permainan, serta fotografi. Saat ini, Indonesia mempunyai dua sistem jaringan telepon bergerak seluler, yaitu *Global System for Mobile Telecommunications (GSM)* dan *Code Division Multiple Access (CDMA)*.
2. **Komputer** mengacu pada komputer desktop, laptop (*portable*), atau tablet (atau komputer genggam yang serupa).
 - **Personal Computer (PC)/Desktop** didefinisikan sebagai komputer yang biasanya tetap di satu tempat, biasanya pengguna ditempatkan di depannya, di belakang *keyboard*.
 - **Laptop (Portable)** adalah didefinisikan sebagai komputer yang cukup kecil untuk dibawa dan biasanya memungkinkan tugas yang sama sebagai komputer *desktop*, juga mencakup *notebook* dan *netbook* tetapi tidak termasuk *tablet* dan sejenisnya komputer genggam.
 - **Tablet (atau sejenisnya komputer genggam)** didefinisikan sebagai komputer yang terintegrasi ke layar sentuh datar, yang dioperasikan dengan menyentuh layar tanpa menggunakan *keyboard* fisik. Dalam hal ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi, seperti set TV pintar, dan perangkat dengan telepon sebagai fungsi utamanya, seperti *smartphone*. Tablet meskipun bisa digunakan untuk menelpon, tetapi tidak dimasukkan dalam kelompok telepon seluler karena fungsi utama tablet adalah sebagai computer.
3. **Internet** didefinisikan sebagai sebuah jaringan komputer publik di seluruh dunia. Internet menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk *World Wide Web* dan *e-mail*, berita, hiburan dan *file* data.
4. **Telepon tetap nirkabel atau Fixed Wireless Access (FWA)** didefinisikan sebagai jaringan transmisi nirkabel lokal yang menggunakan teknologi seluler,

gelombang mikro atau radio untuk menghubungkan sinyal kepada pelanggan di lokasi yang tetap ke sentral lokal. Lisensi FWA menggunakan teknologi CDMA (*Code Division Multiple Access*) yang mengikuti nomor telepon biasa dengan kode area tertentu yang tidak bisa dibawa ke luar area tersebut, kecuali dengan mengganti sementara dengan nomor kode area daerah setempat, Contoh: Flexy, StarOne dan Esia.

7.2 Ulasan Singkat

Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Lebih daripada sebelumnya, manusia kini lebih terhubung dengan sesamanya tanpa memandang jarak, ruang, dan waktu melalui teknologi. Dengan kemajuan teknologi saat ini kehidupan manusia dipermudah dan ditingkatkan kualitasnya.

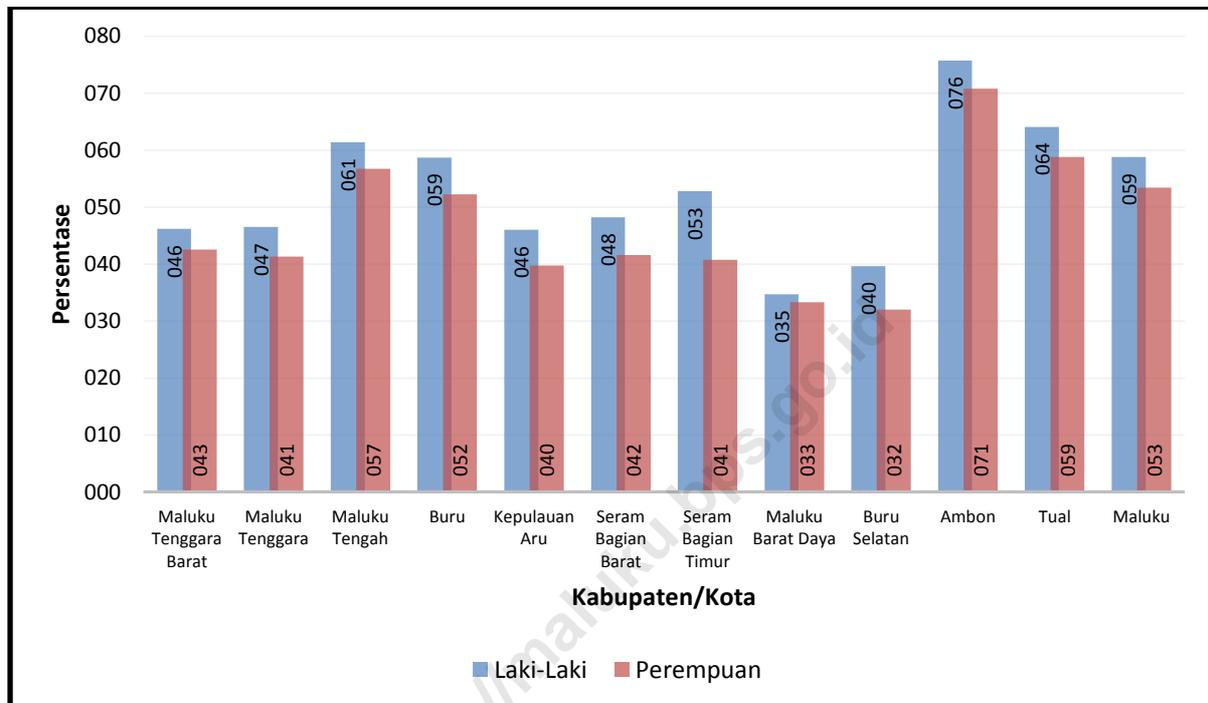
Perkembangan teknologi dewasa ini khususnya internet dipercaya telah mendorong manusia untuk menambah pilihan-pilihan dalam hidupnya, membuka pasar yang lebih luas, membuka cakrawala ilmu pengetahuan yang seolah tak terbatas, dan kesempatan memperluas jaringan sosial. Kini penduduk tua dan muda, di desa dan di kota secara hampir merata sudah menikmati kemajuan teknologi ini.

Sesuai dengan perkembangan teknologi, alat komunikasi seperti telepon, telepon seluler (*handphone*), dan komputer menjadi salah satu kebutuhan yang semakin penting untuk dipenuhi. *Public Switched Telephone Network* (PSTN) yang merupakan jaringan telepon tetap dengan kabel sudah dianggap tidak efisien dan tidak fleksibel sehingga banyak ditinggalkan oleh penggunanya. Seperti terlihat pada Tabel 7.1, tercatat hanya sebesar 1,12 persen rumah tangga di Maluku memiliki/menguasai telepon rumah/(PSTN). Apabila dilihat menurut kabupaten/kota terlihat Kota Ambon tercatat mempunyai persentase tertinggi (2,74 persen) rumah tangganya memiliki/menguasai telepon rumah. Disusul kemudian Kabupaten Maluku Tenggara Barat (1,27 persen) dan Kabupaten Kepulauan Aru (1,04 persen). Pada Tabel 7.1, juga dapat dicermati persentase rumah tangga yang memiliki komputer/laptop. Tercatat sebesar 20,98 persen rumah tangga di Maluku memiliki komputer/laptop, Kota Ambon dan Kota Tual tercatat memiliki persentase tertinggi, yaitu sebesar 41,42 persen dan 26,41 persen, sedangkan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan persentase terendah, yaitu tercatat sebesar 5,41 persen.

Telepon rumah sudah mulai ditinggalkan karena dianggap tidak efisien dan tidak fleksibel. Hal ini tercermin pada Tabel 7.2, persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang memiliki/menguasai telepon seluler (*handphone*) tercatat mencapai 56,13 persen, sementara hanya sebesar 1,12 persen rumah tangga di Maluku memiliki/menguasai telepon rumah/PSTN. Dengan semakin murahnya harga perangkat telepon seluler, masyarakat

ternyata sudah beralih ke telepon seluler yang dianggap lebih efisien dan fleksibel dibanding dengan telepon rumah.

Gambar 7.1
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018



Sumber: Susenas Maret 2018, diolah.

Apabila dilihat pada Gambar 7.1, persentase penduduk laki-laki yang memiliki/menguasai telepon seluler pada seluruh kabupaten/kota di Maluku tercatat lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Kota Ambon dan Kota Tual merupakan daerah dengan persentase tertinggi pertama dan kedua yang penduduknya memiliki/menguasai telepon seluler, baik penduduk laki-laki maupun perempuan.

Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler (HP) dalam 3 bulan terakhir dapat dicermati pada Tabel 7.3. Secara umum persentase penduduk laki-laki yang menggunakan telepon seluler tercatat lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. Tercatat sebesar 68,17 persen penduduk laki-laki di Maluku menggunakan telepon seluler, sementara untuk penduduk perempuan tercatat sebesar 66,02 persen. Persentase penggunaan telepon seluler tertinggi di Kota Ambon yaitu tercatat sebesar 78,85 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Maluku Barat Daya tercatat sebesar 43,59 persen.

Pada Tabel 7.4, tercermin persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan computer. Komputer yang dimaksud disini termasuk *personal computer/PC*,

desktop, laptop, notebook, dan tablet. Tercatat sebesar 17,45 persen penduduk berumur 5 tahun ke atas di Maluku menggunakan komputer untuk mendukung aktivitasnya. Apabila dipilah berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang menggunakan komputer tercatat lebih tinggi (44,20 persen) dibandingkan penduduk perempuan (34,72 persen).

Pertukaran informasi maupun cara berkomunikasi melalui internet adalah cara baru sebagai lompatan teknologi yang menempatkan manusia berada pada tempat berbeda dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan Tabel 7.5 dapat dilihat bahwa persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet tercatat sebesar 29,79 persen. Termasuk mengakses internet adalah penduduk yang mengakses *Facebook, Twitter, BlackBerry Messenger (BBM)*, dan *WhatsApp (WA)*. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, ada sedikit kesenjangan persentase penduduk umur 5 tahun ke atas yang mengakses internet, dimana persentase penduduk laki-laki tercatat lebih tinggi (30,92 persen) dibanding penduduk perempuan (28,64 persen). Secara umum, Kabupaten Maluku Barat Daya tercatat memiliki persentase terendah (5,05 persen) penduduknya yang mengakses internet, sedangkan tertinggi ada di Kota Ambon (52,90 persen).

Tabel 7.1

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah (PSTN), Komputer/Laptop Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Telepon Rumah (PSTN)	Komputer/Laptop
(1)	(2)	(3)
01 Maluku Tenggara Barat	1,27	16,25
02 Maluku Tenggara	0,76	15,51
03 Maluku Tengah	0,46	11,90
04 Buru	0,00	16,57
05 Kepulauan Aru	1,04	17,01
06 Seram Bagian Barat	0,60	9,87
07 Seram Bagian Timur	0,00	9,79
08 Maluku Barat Daya	0,00	5,41
09 Buru Selatan	0,00	6,86
71 Kota Ambon	2,74	41,42
72 Kota Tual	0,97	26,41
Maluku	1,12	20,98

Tabel 7.2

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	46,18	42,53	44,36
02 Maluku Tenggara	46,52	41,30	43,85
03 Maluku Tengah	61,38	56,71	59,06
04 Buru	58,71	52,22	55,56
05 Kepulauan Aru	46,01	39,75	42,97
06 Seram Bagian Barat	48,19	41,59	44,95
07 Seram Bagian Timur	52,82	40,77	46,81
08 Maluku Barat Daya	34,72	33,28	34,01
09 Buru Selatan	39,64	32,02	35,96
71 Kota Ambon	75,73	70,80	73,26
72 Kota Tual	64,06	58,82	61,40
Maluku	58,82	53,40	56,13

Tabel 7.3

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	50,34	50,52	50,43
02 Maluku Tenggara	66,62	61,75	64,13
03 Maluku Tengah	72,08	70,92	71,50
04 Buru	69,15	68,08	68,63
05 Kepulauan Aru	49,54	42,48	46,10
06 Seram Bagian Barat	64,67	63,24	63,97
07 Seram Bagian Timur	63,24	54,17	58,71
08 Maluku Barat Daya	43,82	43,36	43,59
09 Buru Selatan	53,66	50,48	52,13
71 Kota Ambon	79,62	78,09	78,85
72 Kota Tual	78,88	76,62	77,73
Maluku	68,17	66,02	67,10

Tabel 7.4

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Dekstop/Laptop/Notebook/Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	9,83	10,45	10,14
02 Maluku Tenggara	12,47	10,28	11,35
03 Maluku Tengah	13,81	14,15	13,98
04 Buru	9,17	12,79	10,93
05 Kepulauan Aru	13,46	13,96	13,70
06 Seram Bagian Barat	8,92	9,51	9,21
07 Seram Bagian Timur	7,77	6,21	6,99
08 Maluku Barat Daya	5,44	5,56	5,50
09 Buru Selatan	4,73	4,16	4,46
71 Kota Ambon	34,41	33,47	33,94
72 Kota Tual	25,67	19,86	22,72
Maluku	17,50	17,40	17,45

Tabel 7.5

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	15,40	14,15	14,78
02 Maluku Tenggara	18,90	15,23	17,02
03 Maluku Tengah	31,70	28,50	30,11
04 Buru	24,93	22,43	23,71
05 Kepulauan Aru	22,28	20,54	21,43
06 Seram Bagian Barat	18,47	16,89	17,69
07 Seram Bagian Timur	17,79	12,46	15,13
08 Maluku Barat Daya	6,08	4,00	5,05
09 Buru Selatan	6,43	7,14	6,77
71 Kota Ambon	53,76	52,05	52,90
72 Kota Tual	37,78	32,15	34,92
Maluku	30,92	28,64	29,79

BAB VIII
KEADAAN SOSIAL
EKONOMI RUMAH
TANGGA LAINNYA

8.1 Konsep dan Definisi

Dalam publikasi ini digunakan konsep dan definisi sebagai berikut:

1. **Beras murah/raskin** didefinisikan sebagai program bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin berupa pendistribusian beras khusus kepada keluarga miskin yang harganya telah disubsidi oleh pemerintah.
2. **Kartu Indonesia Pintar (KIP)** didefinisikan sebagai kartu yang diberikan oleh Pemerintah sebagai penanda/identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak memperoleh bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
3. **Program Indonesia Pintar (PIP)** didefinisikan sebagai bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan langsung kepada siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. **Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)** didefinisikan sebagai kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2013.
5. **Korban Kejahatan** didefinisikan sebagai seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau mengalami tindak kejahatan atau usaha/percobaan usaha kejahatan.

8.2 Ulasan Singkat

Salah satu butir Nawa Cita adalah mengenai peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program perlindungan sosial. Berbagai program perlindungan sosial telah diluncurkan oleh pemerintah, di antaranya Program Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Beras Sejahtera/Rastra (sebelumnya disebut Beras Untuk Rakyat Miskin/Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain-lain.

Susenas Maret 2018 mencatat beberapa informasi sosial ekonomi lainnya yang berkaitan dengan monitoring kebijakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program perlindungan. Informasi tersebut di antaranya mengenai pembelian/penerimaan beras miskin, penerimaan kredit usaha, penerimaan Bantuan Siswa Miskin, kepemilikan aset, kepemilikan/penerimaan jaminan sosial, dan penerimaan kartu perlindungan sosial.

Program Beras Sejahtera (Rastra) merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Program ini dijalankan pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu, Rastra bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Penerima manfaat menebus raskin dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga beras di pasaran, yaitu sebesar Rp1.600,00,- per kilogram karena sudah disubsidi oleh pemerintah. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial dan pengentasan penduduk miskin, program raskin juga berguna untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

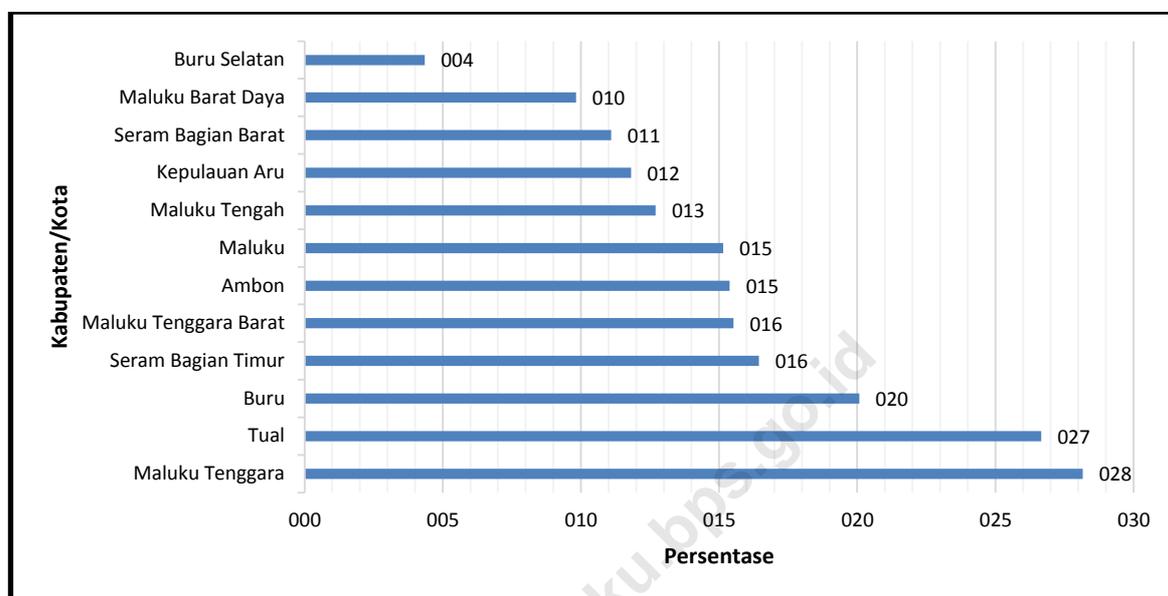
Tabel 8.1 menunjukkan bahwa sebesar 49,62 persen rumah tangga di Maluku tercatat membeli/mendapatkan raskin. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki persentase tertinggi (80,44 persen) rumah tangganya membeli/mendapatkan raskin. Disusul kemudian Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Buru Selatan dengan persentase berturut-turut tercatat sebesar 74,43 persen dan 74,09 persen. Kota Ambon memiliki persentase terendah, tercatat sebesar 14,20 persen. Apabila dicermati jumlah kilogram pembelian/penerimaan raskin, tercatat sebesar 4,95 persen rumah tangga di Maluku membeli raskin dengan jumlah < 15 kg selama 3 bulan terakhir, dan tercatat sebesar 41,93 persen membeli raskin dengan jumlah 15-29 kg. Sementara itu tercatat sebesar 37,39 persen rumah tangga di Maluku membeli raskin dengan jumlah 30-45 kg. Pola jumlah pembelian raskin hamper mirip pada masing-masing kabupaten/kota di Maluku kecuali Kabupaten Maluku Barat Daya yang membeli/mendapatkan raskin > 45 kg selama 3 bulan terakhir tercatat persentasenya paling besar, yaitu 63,76 persen.

Dalam bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerintah mencanangkan program pemberian kredit usaha yang ditujukan kepada masyarakat ekonomi rendah dengan syarat-syarat tertentu. Pemberian kredit tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan modal usaha skala kecil.

Gambar 8.1 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga di Maluku yang tercatat menerima kredit usaha selama setahun terakhir adalah sebesar 15,15 persen. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki persentase terbesar, yaitu sekitar 28,16 persen rumah tangganya menerima kredit usaha selama setahun terakhir, disusul kemudian Kota Tual (26,65 persen) dan Kabupaten Buru (20,07 persen). Ada beberapa macam kredit usaha yang diterima oleh rumah tangga di Maluku, jenis kredit usaha yang berasal dari Bank Umum selain Kredit Usaha Rakyat menempati persentase terbesar, tercatat sebesar 36,57 persen. Disusul

kemudian jenis Kredit Usaha Rakyat (29,47 persen) dan jenis kredit Bank Perkreditan Rakyat (9,61 persen). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.2.

Gambar 8.1
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2018



Sumber: Susenas Maret 2018, diolah.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2015 yang merupakan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag), PIP adalah program nasional yang dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah hingga anak lulus Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandarisasi). Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Hasil Susenas Maret 2018 menunjukkan sebesar 10,86 persen rumah tangga di Maluku tercatat menerima PIP selama periode Agustus 2017 hingga Maret 2018. Dari total rumah tangga yang menerima PIP tercatat sebesar 64,21 persen rumah tangga menerima PIP SD sederajat, sebesar 34,42 persen menerima PIP SMP sederajat dan sebesar 26,45 persen rumah tangga menerima PIP Sekolah Menengah sederajat. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.3.

Kepemilikan aset merupakan indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga, semakin banyak aset yang dimiliki oleh rumah tangga menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Di Maluku, secara umum hasil Susenas Maret 2018 menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki aset tanah/lahan tercatat sebesar 67,26 persen, rumah tangga memiliki aset lemari es/kulkas sebesar 45,23 persen, rumah tangga memiliki aset sepeda motor tercatat sebesar 43,56 persen, rumah tangga memiliki aset televisi layar datar (minimal 30 inci) sebesar 14,62 persen, rumah tangga memiliki aset emas perhiasan (minimal 10 gram) sebesar 13,23 persen, rumah tangga memiliki aset perahu sebesar 7,80 persen, rumah tangga memiliki aset AC tercatat sebesar 7,33 persen dan rumah tangga memiliki aset mobil tercatat sebesar 4,43 persen. Sementara itu, kepemilikan aset tabung gas 5,5 kg atau lebih besar, pemanas air, dan perahu motor hanya sebesar < 3,5 persen. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.4.

Jaminan sosial jaminan sosial (*Social Security*) secara luas didefinisikan sebagai sistem perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi risiko-risiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat berkurangnya penghasilan. Jaminan sosial yang dicakup dalam Susenas Maret 2018, antara lain jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, dan pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK). Secara umum, persentase rumah tangga di Maluku yang tercatat memiliki atau menerima jaminan sosial setahun terakhir relatif masih rendah. Persentase rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan pensiun/veteran sebesar 7,99 persen, sedangkan persentase rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, dan pesangon PHK berturut-turut sebesar 3,00 persen, 2,80 persen, 2,80 persen, dan 0,91 persen. Data selengkapnya menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 8.5.

Pada Tabel 8.6, dapat dilihat persentase rumah tangga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yaitu tercatat sebesar 13,77 persen. Persentase rumah tangga yang menerima kartu dan dapat menunjukkan kartu tercatat sebesar 10,32 persen, sedangkan yang tidak dapat menunjukkan kartu sebesar 3,45 persen.

Variabel terkait penduduk yang menjadi korban kejahatan juga diperoleh pada Susenas Maret 2018. Dari Tabel 8.7, dapat diketahui bahwa sebesar 1,30 persen penduduk Maluku tercatat menjadi korban kejahatan pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, tidak ada kesenjangan yang cukup berarti antara persentase penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan (1,48 persen) dibandingkan persentase penduduk perempuan yang menjadi korban kejahatan (1,13 persen).

Tabel 8.1

Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Beras Miskin (Raskin) Selama 3 Bulan Terakhir (Desember 2017 – Februari 2018) Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Beras yang Dibeli di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	% Rumah Tangga yang Membeli/ Mendapatkan Beras Raskin	Jumlah Beras yang Dibeli (Kg)				Jumlah
		< 15	15 – 29	30 – 45	> 45	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Maluku Tenggara Barat	58,56	1,11	18,53	48,40	31,96	100,00
02 Maluku Tenggara	53,88	2,80	41,53	42,52	13,15	100,00
03 Maluku Tengah	62,32	6,75	41,78	32,08	19,38	100,00
04 Buru	55,11	2,66	45,99	43,98	7,36	100,00
05 Kepulauan Aru	74,43	3,51	30,35	52,69	13,45	100,00
06 Seram Bagian Barat	71,33	0,76	54,84	42,63	1,77	100,00
07 Seram Bagian Timur	58,68	0,00	66,47	30,80	2,74	100,00
08 Maluku Barat Daya	80,44	0,00	1,26	34,98	63,76	100,00
09 Buru Selatan	74,09	11,69	59,44	26,85	2,02	100,00
71 Kota Ambon	14,20	12,59	42,31	33,62	11,47	100,00
72 Kota Tual	53,40	17,20	51,62	25,53	5,66	100,00
Maluku	49,62	4,95	41,93	37,39	15,74	100,00

Tabel 8.2

Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kredit Usaha di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	% Rumah Tangga yang Ada Anggota Rumah Tangganya Menerima Kredit Usaha	Jenis Kredit Usaha									
		Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Bank Umum Selain KUR	Bank Perkreditan Rakyat	Koperasi	Perorangan dengan Bunga	Pegadaian	Perusahaan Leasing	Kelompok Usaha Bersama (KUBE/ KUB)	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01 Maluku Tenggara Barat	15,52	22,88	38,25	20,56	2,83	3,40	0,40	6,56	1,44	0,00	3,69
02 Maluku Tenggara	28,16	17,38	34,91	13,97	5,81	3,01	5,68	0,66	0,38	23,63	7,05
03 Maluku Tengah	12,71	49,07	25,61	5,86	5,44	7,92	7,00	0,75	0,00	1,73	4,49
04 Buru	20,07	40,76	35,67	14,94	1,89	0,00	3,01	0,00	1,95	2,35	3,01
05 Kepulauan Aru	11,81	21,96	73,65	1,14	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
06 Seram Bagian Barat	11,10	37,67	38,81	9,17	3,42	10,44	0,00	1,07	2,58	1,93	1,80
07 Seram Bagian Timur	16,45	40,13	45,35	1,38	11,95	5,97	6,80	1,75	4,33	0,00	5,19
08 Maluku Barat Daya	9,83	33,32	43,05	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	2,28	0,00	16,02
09 Buru Selatan	4,35	6,55	64,64	7,20	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00
71 Kota Ambon	15,39	15,06	33,37	11,85	19,93	1,12	8,90	9,58	0,00	0,00	6,52
72 Kota Tual	26,65	29,14	45,37	3,29	10,97	1,13	13,84	0,00	3,12	1,34	2,23
Maluku	15,15	29,47	36,57	9,61	9,46	3,82	6,04	3,49	1,04	3,16	5,00

Tabel 8.3

Persentase Rumah Tangga Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis PIP yang Diterima di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Persentase Rute yang ada Anggota Rutanya Menerima PIP	Jenis Program Indonesia Pintar		
		PIP SD Sederajat	PIP SMP Sederajat	PIP SMA Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Maluku Tenggara Barat	8,34	80,16	45,97	5,39
02 Maluku Tenggara	11,87	73,93	34,47	24,37
03 Maluku Tengah	13,33	63,11	18,76	32,77
04 Buru	12,40	71,59	38,24	22,36
05 Kepulauan Aru	7,34	73,51	15,72	29,63
06 Seram Bagian Barat	23,04	59,09	56,20	28,75
07 Seram Bagian Timur	9,58	52,62	29,28	39,42
08 Maluku Barat Daya	9,39	84,99	25,54	6,40
09 Buru Selatan	13,62	77,13	19,78	13,19
71 Kota Ambon	5,69	54,57	37,12	25,05
72 Kota Tual	9,79	59,43	51,56	23,55
Maluku	10,86	64,21	34,42	26,45

Tabel 8.4

Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Aset Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kepemilikan Aset di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Aset yang Dimiliki										
	Tabung Gas 5,5 Kg Atau Lebih	Lemari Es/ Kulkas	AC	Pemanas Air	Emas/ Perhiasan (Minimal 10 Gram)	Sepeda Motor	Perahu	Perahu Motor	Mobil	Telivisi Layar Datar (Minimal 30 Inch)	Tanah/ Lahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01 Maluku Tenggara Barat	0,24	28,10	5,33	0,68	6,25	34,49	15,40	8,62	1,18	6,62	82,20
02 Maluku Tenggara	0,61	38,94	4,30	0,00	6,34	37,02	11,04	8,36	4,38	6,95	59,77
03 Maluku Tengah	0,62	44,93	4,13	0,50	8,94	46,19	4,11	1,01	2,61	7,70	66,67
04 Buru	1,08	45,55	4,64	4,50	13,67	63,18	3,46	1,45	5,58	11,91	85,67
05 Kepulauan Aru	1,03	25,83	6,84	2,19	11,07	23,85	22,93	10,52	2,46	11,53	85,28
06 Seram Bagian Barat	0,14	30,90	2,07	0,51	7,84	31,79	14,66	6,37	1,60	4,03	68,34
07 Seram Bagian Timur	0,00	22,59	2,64	2,40	7,51	30,01	24,54	5,09	3,52	5,74	74,37
08 Maluku Barat Daya	0,30	12,96	0,68	0,60	4,03	25,61	10,48	5,16	1,16	1,42	27,09
09 Buru Selatan	0,00	19,03	0,57	0,99	3,28	34,16	13,09	4,32	1,13	3,38	94,92
71 Kota Ambon	2,77	69,44	15,83	1,70	24,47	51,32	0,74	0,70	8,25	33,07	57,65
72 Kota Tual	1,34	56,09	10,11	2,08	18,26	56,02	4,11	3,58	6,80	15,17	73,43
Maluku	1,17	45,23	7,33	1,41	13,23	43,56	7,80	3,34	4,43	14,62	67,26

Tabel 8.5

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Sosial di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Jaminan Sosial				
	Jaminan Pensiun/ Veteran	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Jaminan/ Asuransi Kematian	Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Maluku Tenggara Barat	11,98	7,81	7,39	7,68	0,11
02 Maluku Tenggara	14,11	4,72	4,08	4,28	1,15
03 Maluku Tengah	5,09	1,10	1,85	1,26	0,76
04 Buru	5,79	2,66	0,02	1,83	0,22
05 Kepulauan Aru	6,64	5,84	6,08	6,01	2,29
06 Seram Bagian Barat	5,91	1,94	0,59	1,32	0,33
07 Seram Bagian Timur	8,39	6,63	7,57	7,10	6,06
08 Maluku Barat Daya	7,55	1,30	0,83	3,71	1,11
09 Buru Selatan	3,82	0,00	0,38	0,38	0,38
71 Kota Ambon	8,54	1,49	2,47	0,70	0,00
72 Kota Tual	22,03	14,57	5,94	14,57	2,54
Maluku	7,99	3,00	2,80	2,80	0,91

Tabel 8.6

Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis PIP di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Ya, Dapat Menunjukkan Kartu	Ya, Tidak Dapat Menunjukkan Kartu	Tidak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Maluku Tenggara Barat	9,18	4,37	86,45	100,00
02 Maluku Tenggara	7,15	4,17	88,68	100,00
03 Maluku Tengah	18,36	4,06	77,58	100,00
04 Buru	11,18	3,13	85,69	100,00
05 Kepulauan Aru	8,63	6,48	84,89	100,00
06 Seram Bagian Barat	20,88	4,49	74,62	100,00
07 Seram Bagian Timur	3,41	2,20	94,39	100,00
08 Maluku Barat Daya	22,82	11,31	65,87	100,00
09 Buru Selatan	7,13	1,19	91,69	100,00
71 Kota Ambon	2,31	1,28	96,41	100,00
72 Kota Tual	3,53	3,60	92,87	100,00
Maluku	10,32	3,45	86,23	100,00

Tabel 8.7

Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Dalam Periode 1 Januari – 31 Desember 2017 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Maluku Tenggara Barat	2,57	1,63	2,10
02 Maluku Tenggara	1,24	0,42	0,83
03 Maluku Tengah	1,18	0,70	0,94
04 Buru	1,40	0,61	1,02
05 Kepulauan Aru	0,72	0,70	0,71
06 Seram Bagian Barat	1,28	1,07	1,18
07 Seram Bagian Timur	1,03	0,76	0,90
08 Maluku Barat Daya	0,81	0,39	0,60
09 Buru Selatan	0,82	0,54	0,69
71 Kota Ambon	1,91	2,16	2,03
72 Kota Tual	2,47	0,39	1,42
Maluku	1,48	1,13	1,30

<https://maluku.bps.go.id>



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA
— Enlighten The Nation —



BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI MALUKU

BPS-Statistics of Maluku Province

Jln Wolter Monginsidi, Passo - Ambon 97232

Telp : (0911) 361320, 361320, Fax : (0911) 391319

Email : bps8100@bps.go.id

